



Peran **Community Development** Perusahaan Industri & Dampaknya pada Masyarakat Sekitarnya

Studi Kasus di PT. Ades Waters Indonesia dan PT. Aqua Golden Missisipi



Peran **Community Development** Perusahaan Industri & Dampaknya pada Masyarakat Sekitarnya

Studi Kasus di PT. Ades Waters Indonesia dan PT. Aqua Golden Missisipi

1002-51-14
1002/09



Penulis :
Ujud Tahajuddin
D.T.P. Kusumawardhani

Editor :
Ujud Tahajuddin



Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

KATALOG DALAM TERBITAN

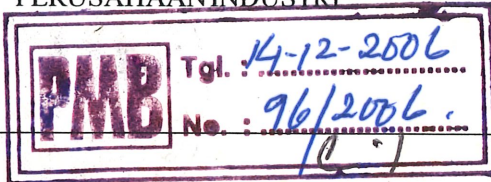
Tahajuddin, Ujud

Peran Community Development Perusahaan Industri & Dampaknya pada Masyarakat Sekitarnya (Studi Kasus di PT. Ades Waters Indonesia dan PT. Aqua Golden Missisipi)/Ujud Tahajuddin; D.T.P. Kusumawardhani - Jakarta : LIPI, 2006

viii, 121 hal, 21 cm

ISBN 979-26-2480-5

1. COMMUNITY DEVELOPMENT
2. PERUSAHAAN INDUSTRI



307.14

Penerbit : LIPI Press, Anggota IKAPI
Jl. Gondangdia Lama 39, Menteng, Jakarta 10350
Telp. 314 0228, 314 6942 Fax. 314 4591
e-mail : bmrlipi@uninet.net.id
lipipress@uninet.net.id

Peran Community Development Perusahaan Industri & Dampaknya pada Masyarakat Sekitarnya

Copyright© 2006 Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI
Gedung Widya Graha, Lt. VI & IX
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
Telp/Fax. : (021) 5701232

Sumber Gambar Sampul : Website [http://: www.aqua.com](http://www.aqua.com)

KATA PENGANTAR

Penelitian “Evaluasi Program *Community Development* di Lingkungan Perusahaan Air Mineral” merupakan salah satu kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) Tahun Anggaran 2006. Penelitian *Community Development* terdiri dari beberapa seri penelitian yang dimulai pada tahun 2006 dan rencananya akan dilaksanakan selama empat tahun dengan obyek (dalam hal ini adalah perusahaan industri) yang berbeda.

Selama ini dampak keberadaan perusahaan industri terhadap masyarakat sekitarnya telah menjadi sorotan para pemerhati industrialisasi, baik dari kalangan pemerintah maupun LSM. Terkait dengan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan, sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan tentang kewajiban perusahaan industri untuk melakukan *community development* di lingkungan sekitar lokasi perusahaan. Diharapkan dengan adanya *community development*, masyarakat sekitarnya akan mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan tersebut di wilayahnya. Oleh sebab itu perusahaan berupaya untuk membuat berbagai program *community development*, sebagai salah satu kepeduliannya terhadap masyarakat sekitarnya.

Penelitian ini menghasilkan pengidentifikasian dan penganalisisan pola pelaksanaan *community development* oleh perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan berbagai kelebihan dan kelemahan di setiap aspeknya. Hasil dari penelitian ini akan membantu kegiatan penelitian-penelitian berikutnya dalam upaya memformulasikan model *community development* yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan industri pada umumnya dan perusahaan AMDK khususnya dalam melaksanakan *community development*, agar mampu mencapai efektivitas optimal.

Kami sadari betul bahwa penelitian ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan/dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terkait di pusat maupun di daerah, baik dari instansi, perusahaan, LSM, masyarakat maupun individu yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya kepada peneliti selama kegiatan penelitian berjalan.

Laporan hasil penelitian ini telah dibahas secara mendalam pada seminar hasil penelitian PMB-LIPI, yang diselenggarakan pada bulan September 2006. Kendati demikian, kami menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak akan terlepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati kami sangat antusias untuk menerima kritikan dan saran yang sangat membantu kami guna penyempurnaan laporan penelitian PMB-LIPI di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi para akademisi maupun para praktisi.

Akhir kata kami ucapkan selamat membaca dan semoga mendapatkan manfaatnya.

Jakarta, Desember 2006

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan - LIPI

Ttd

Dr. M. Hisyam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR DIAGRAM.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Penelitian	4
1.3. Tujuan dan Sasaran	5
1.4. Ruang Lingkup.....	6
1.5. Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1. Model-Model Responsibilitas Sosial	7
1.5.2. Tingkatan Responsibilitas Sosial	8
1.5.3. Evolusi Responsibilitas Sosial	10
1.6. Metodologi	12
1.6.1. Pendekatan	12
1.6.2. Model Analisis	12
1.6.3. Metode Pengumpulan Data	16
1.6.4. Analisis Data	16
1.7. Lokasi Penelitian.....	16
BAB II PROFIL DAERAH PENELITIAN	18
2.1. Profil Daerah Kabupaten Pasuruan	18
2.1.1. Kependudukan.....	21
2.1.2. Pendidikan	25
2.1.3. Ketenagakerjaan	29
2.1.4. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi	36
2.1.5. Sektor Industri	37

2.2. Profil Daerah Kabupaten Sukabumi	44
2.2.1. Kependudukan	49
2.2.2. Pendidikan	54
2.2.3. Ketenagakerjaan	58
2.2.4. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi	59
2.2.5. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	66
BAB III TEMUAN LAPANGAN <i>COMMUNITY</i> <i>DEVELOPMENT</i> PERUSAHAAN AMDK	69
3.1. Kabupaten Pasuruan.....	69
3.1.1. Pemberdayaan Makro Kabupaten Pasuruan.....	69
3.1.2. PT. Ades Waters Indonesia, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kab. Pasuruan, Jatim.....	74
3.2. Kabupaten Sukabumi	87
3.2.1. Pemberdayaan Makro Kabupaten Sukabumi ...	87
3.2.2. PT. Aqua Golden Missisipi, Desa Mekar Sari, Kecamatan Cicurug, Kab. Sukabumi, Jabar	90
BAB IV KOMPARASI TEMUAN LAPANGAN	104
BAB V KESIMPULAN	112
DAFTAR KEPUSTAKAAN	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.	Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.....	20
Tabel 2.1.2.	Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasuruan.....	22
Tabel 2.1.3.	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.....	24
Tabel 2.1.4.	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD dan SLTP di Kabupaten Pasuruan	27
Tabel 2.1.5.	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SLTA dan SMK di Kabupaten Pasuruan	28
Tabel 2.1.6.	Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasuruan	30
Tabel 2.1.7.	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pasuruan	31
Tabel 2.1.8.	Jumlah Pencari Kerja, Penempatan dan Permintaan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasuruan...	32
Tabel 2.1.9.	Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Jabatan dan Berasal dari Kabupaten Pasuruan	35
Tabel 2.1.10.	Jumlah Perusahaan yang Menampung Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi dan Kewarganegaraan	36
Tabel 2.1.11.	Banyaknya Industri Besar - Sedang Menurut Jenis Industri di Kabupaten Pasuruan	42
Tabel 2.1.12.	Persebaran Industri AMDK di Kabupaten Pasuruan...	43
Tabel 2.2.1.	Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sukabumi	48

Tabel 2.2.2.	Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi	50
Tabel 2.2.3.	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sukabumi	52
Tabel 2.2.4.	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD dan SLTP di Kabupaten Sukabumi.....	54
Tabel 2.2.5.	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SLTA dan SMK di Kabupaten Sukabumi.....	56
Tabel 2.2.6.	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukabumi	58
Tabel 2.2.7.	Jumlah Pencari Kerja yang Memperoleh Penempatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sukabumi	59
Tabel 2.2.8.	Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 dan 2004 (Dalam Persen)	60
Tabel 2.2.9.	Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004 Kabupaten Sukabumi	63
Tabel 2.2.10.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sukabumi per Sektor Tahun 2003-2004 (Dalam Persen)	64
Tabel 2.2.11.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Tahun 2000-2004 (Dalam Persen)	65
Tabel 2.2.12.	Persebaran Industri AMDK di Kabupaten Sukabumi	67
Tabel 3.1.1.	Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Ades Waters Indonesia Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan	78

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1	Hierarki Responsibilitas Sosial.....	10
Diagram 2	Model Analisis Dampak Program.....	14
Diagram 2.1.1.	Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Industri di Kabupaten Pasuruan.....	33
Diagram 2.1.2.	Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Jabatan di Kabupaten Pasuruan.....	34
Diagram 2.1.3.	Komposisi Industri Besar – Sedang Berdasarkan Jenis Industri di Kabupaten Pasuruan.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1. Peta Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur	18
Gambar 2.1.2. Peta Kepadatan Industri Besar – Sedang di Kabupaten Pasuruan	39
Gambar 2.2.1. Peta Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dampak perusahaan industri terhadap masyarakat sekitarnya menjadi salah satu obyek yang menjadi sorotan para pengamat industrialisasi. Dalam dekade terakhir ini sering terjadi perdebatan kritis yang mempertanyakan relasi antara organisasi perusahaan industri dengan masyarakat. Persoalan ini menarik karena memiliki banyak dimensi yang antara lain menyangkut aspek ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai kajian yang telah dilakukan ternyata mengungkapkan temuan-temuan yang bervariasi, dari mulai adanya perkembangan ekonomi sebagai *multiplier effect* aktivitas industri, sampai pada keterasingan masyarakat sekitar terhadap industrialisasi, kerugian masyarakat karena limbah industri dan adanya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat akibat berlangsungnya industrialisasi. Singkat kata, cukup banyak biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat akibat terjadinya industrialisasi.

Berbagai kajian juga telah menggambarkan banyaknya perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Penegasan semacam itu antara lain ditegaskan oleh David Crowther yang mengungkapkan bahwa "*The decade has seen protests concerning the actions of organisations, exposures of corporate exploitation and unfolding accounting scandals. At the same time ethical behaviour and a concern for the environment have been shown to have a positive correlation with corporate performance. The nature of corporate social responsibility is therefore a topical one for business and academics*".¹ Perselisihan

¹ David Crowther, Professor of Corporate Social Responsibility, De Montfort University, UK, special issue of Social Responsibility Journal, Homepage of the Social Responsibility Research Network (SRRNet).

yang terjadi seringkali mengakibatkan terganggu atau terhentinya aktivitas perusahaan industri tersebut. Sebagai contoh diperlihatkan oleh kasus perselisihan yang terjadi di awal tahun 2006 antara PT. Freeport dengan masyarakat sekitarnya di daerah Timika yang berakhir dengan pemblokiran akses masuk ke PT. Freeport oleh masyarakat Timika, sehingga mengakibatkan terhentinya operasi perusahaan. Bahkan ketika konflik yang terjadi akan dijemputani penyelesaiannya oleh MRP dan DPR, berakhir dengan peristiwa perusakan terhadap 20 unit kendaraan.²

Untuk meredam atau mengurangi terjadinya perselisihan semacam itu berbagai upaya telah dilakukan baik dalam skala mikro oleh perusahaan industri seperti pemberian quota prioritas dalam merekrut karyawan yang berasal dari daerah sekitarnya, maupun dalam skala makro oleh pemerintah seperti ketentuan tentang pengelolaan limbah industri³ dan kewajiban melakukan *community development* (CD) bagi perusahaan-perusahaan tertentu⁴. Semua upaya tersebut dilakukan supaya perusahaan industri tetap dapat melanjutkan aktivitasnya, dan masyarakat sekitarnya juga memperoleh *benefit* dari adanya perusahaan industri di wilayahnya. *"It is apparent that any actions which an organisation undertakes will have an effect not just upon itself but also upon the external environment within which that organisation resides. In considering the effect of the organisation upon its external environment it must be recognised that this environment includes both the business environment in which the firm is operating, the local societal*

² Lihat surat kabar "Kompas" terbitan 22, 23, 24 Pebruari, dan 15 Maret 2006.

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ SKMBUMN Nomor 236/MBU/ Tahun 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

environment in which the organisation is located and the wider global environment”.⁵

Kebijakan pemerintah tentang kewajiban perusahaan industri untuk melakukan *community development* di lingkungan sekitar lokasi perusahaan pada dasarnya merupakan hal positif untuk mendekatkan perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Program-program *community development* menjadi salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Dengan adanya *community development*, diharapkan masyarakat sekitarnya merasa ikut memperoleh manfaat dari adanya perusahaan tersebut di wilayahnya.

Akan tetapi seringkali program-program *community development* kurang mengacu secara ketat pada ide dasar tentang maksud dan tujuan *community development*. Program-program *community development* sering dilakukan tanpa arah yang jelas, ⁶sehingga walaupun program ini sudah berjalan relatif lama, pada umumnya hasilnya masih belum nampak secara nyata. Ide *community development* untuk mengembangkan kemampuan agar tercapai kemandirian masyarakat sekitarnya tidak tercipta, yang sering terjadi malahan ketergantungan yang lebih besar dari sebagian anggota masyarakat kepada perusahaan. Disinyalir, hal ini terjadi antara lain karena pelaksanaan program *community development* tidak disertai perencanaan yang matang dan komprehensif, di samping monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program *community development* masih kurang atau tidak dilakukan, baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah. Padahal evaluasi itu penting untuk memperoleh umpan balik yang dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan implementasi program-program *community development*.

⁵ Opcit

⁶ Lihat Ujud Tahajuddin, et al, 2005, “Community Development Industri Petrokimia”, Internal Report, Pranata Pola Cipta, Jakarta.

Menyadari hal ini, beberapa perusahaan pertambangan yang relatif besar seperti PT. Freeport dan PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dalam skala mikro memang telah melakukan evaluasi terhadap program-program *community development* yang mereka lakukan untuk kepentingan peningkatan efektivitas dan efisiensinya. Tetapi bila dilihat dalam skala makro, persentase perusahaan yang melakukan evaluasi terhadap program *community development*-nya relatif rendah. Sedangkan dari pihak pemerintah, belum pernah melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program *community development* perusahaan-perusahaan industri tersebut. Padahal sebenarnya ide tentang *community development* memiliki nilai yang sangat strategis dan kumulatif biaya untuk melaksanakan program *community development* tersebut dapat dikatakan relatif besar. Bila seluruh program *community development* tersebut direncanakan dan dilakukan secara benar, akan dapat berperan sebagai embrio dalam melakukan transformasi kemampuan dan kemandirian masyarakat di sekitar lokasi perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, untuk mereposisi program-program *community development* agar mencapai efektivitas optimal, maka evaluasi terhadap berbagai program *community development* perusahaan-perusahaan industri perlu dilakukan, untuk dapat mengetahui bagaimana program tersebut direncanakan dan dilaksanakan, menemukan berbagai keunggulan, kelemahan dan bahkan penyimpangan-penyimpangan, untuk kemudian menyelaraskannya dengan ide tentang maksud dan tujuan *community development* tersebut.

1.2. Masalah Penelitian

Implementasi program-program *community development* oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) melibatkan beberapa *stakeholder*. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan program-program *community development* ditentukan oleh beberapa aspek, antara lain: Unit Pelaksana *community development* yang ada di

perusahaan, kualitas program *community development*, respon masyarakat terhadap program *community development* tersebut dan peranan *stakeholders* lain seperti pemerintah daerah dan LSM. Berdasarkan realitas tersebut, maka yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah:

- (1) Bagaimana kondisi unit kerja di perusahaan yang melaksanakan *community development*, yang menyangkut kewenangan, mekanisme tata kerja, personalia, dan biaya operasionalisasi *community development*?
- (2) Bagaimana kualitas program *community development* yang menyangkut kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan dengan tujuan *community development*?
- (3) Bagaimana respon masyarakat terhadap program *community development* yang menyangkut persepsi, sikap dan tanggapan masyarakat terhadap program *community development*?
- (4) Bagaimana peranan pemerintah daerah dan kalangan LSM dalam perencanaan dan pelaksanaan *community development*?

1.3. Tujuan dan Sasaran

Dengan banyaknya jenis perusahaan industri yang melakukan *community development* antara lain perusahaan industri yang mengeksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan, dan industri pengolahan seperti perusahaan pupuk dan sebagainya, identifikasi pelaksanaan *community development* dilakukan secara bertahap. Sasaran penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis pola pelaksanaan *community development* oleh perusahaan yang bergerak di bidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan model yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan air minum dalam kemasan dalam melaksanakan *community development*, agar mampu mencapai efektivitas optimal. Untuk dapat memformulasikan model tersebut,

perlu diidentifikasi pola pelaksanaan *community development* yang dilakukan sampai saat ini dan menganalisis berbagai kelebihan dan kelemahan di setiap aspeknya.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup hanya pada *community development* yang dilaksanakan oleh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK). Dasar pertimbangannya, karena pada akhir-akhir ini perusahaan air minum dalam kemasan tumbuh dengan pesat, sehingga eksploitasi terhadap air tanah menjadi semakin luas dan akan mempengaruhi kelestarian lingkungan.

Secara substansial, penelitian ini akan mencakup aspek kelembagaan unit pelaksana *community development* di perusahaan, kualitas perencanaan dan pelaksanaan *community development*, respon masyarakat yang menjadi sasaran *community development*, dan peranan pemerintah daerah serta LSM dalam perencanaan dan implementasi *community development*.

1.5. Kerangka Konseptual

Secara konseptual terdapat kontrak sosial yang efektif antara perusahaan industri dengan para *stakeholders*-nya. Fenomena terbaru menunjukkan adanya tuntutan dari para *stakeholders* untuk memperoleh apa yang menjadi haknya. Pandangan ekonomi yang mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab hanya terhadap pemilik perusahaan atau pemegang saham sudah tidak lagi memadai. Oleh karena itu, sekarang ini suatu perusahaan dituntut untuk mengambil tanggungjawab yang lebih luas yang meliputi *community development*.

1.5.1. Model-Model Responsibilitas Sosial

Sejauh mana korporasi bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial terletak pada dua teori eksklusif, yakni Teori Korporasi Tradisional dan Teori “Metrokorporasi”. Pada Korporasi Tradisional pemegang saham adalah raja, dan tujuannya adalah mendapatkan *maximum profits*. Pekerjaan manajer, kurang lebih adalah mengendalikan perusahaan ke arah profit. Tidak ada sumberdaya yg diberikan ke luar. Dalam konteks ini Korporasi merasa tidak memiliki responsibilitas publik, kecuali satu-satunya responsibilitas adalah masalah peraturan (legal). Dalam Korporasi Tradisional serikat-serikat pekerja akan mengurus para karyawan; sementara korporasi harus mengurus dirinya sendiri.⁷

Sebaliknya, metrokorporasi sama ekstrimnya dalam hal responsibilitas sosial sebagaimana korporasi tradisional yang merasa tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini perusahaan dianggap merupakan institusi sosial dan dengan demikian merasa bahwa kewajibannya adalah melayani masyarakat. Dia tidak mengkhususkan dirinya untuk kegiatan bisnis murni. Dia menekankan hak dan kewajibannya sebagai satu “warga negara” dan berupaya untuk terlibat dalam berbagai bentuk kebajikan, sosial, dan proyek-proyek perbaikan kultural, meskipun pendukung yang terlibat dalam metrokorporasi memahami bahaya teori ini bahwa perusahaan ini mungkin menjadi terlalu paternalistik, dan turut campur terlalu jauh terhadap pihak yang akan ditolongnya.

Dengan demikian, terdapat dua posisi ekstrim dalam kaitannya dengan hubungan etis (*ethical relationship*) antara bisnis profit dan bisnis *service* (layanan) yaitu :

⁷ Walaupun teori tradisional ini telah seringkali diserang sebagai berpandangan sempit dan kontra produktif, namun masih banyak ahli-ahli yang menjadi pendukung pengaturan yang simplistik ini (misal : Theodore Levitt, profesor dari Harvard yang menyatakan bahwa urusan bisnis adalah profit).

- (1) Bahwa bisnis seharusnya tidak melakukan hal lain kecuali memaksimalkan profit, dan
- (2) Bahwa bisnis harus merupakan semua hal tentang *profit motives* dan ukuran profit dilihat dari apa yang dilakukan untuk kebaikan sosial.

Dengan adanya 2 ekstrim ini, maka relatif mudah melihatnya bahwa jawabannya pasti terletak di satu titik di antaranya. Profit adalah penting untuk membayar *service* (layanan), tetapi profit tidak akan berlangsung lama bila situasi sosial menjadi berantakan dan hancur. Oleh karena itu kedua aspek tersebut adalah penting, sehingga harus dicari keseimbangannya.⁸

1.5.2. Tingkatan Responsibilitas Sosial

Pada umumnya, peraturan (legal) mensyaratkan suatu tingkat responsibilitas sosial tertentu kepada perusahaan supaya dapat berfungsi dalam masyarakat. Misalnya upah karyawan harus dibayar di atas upah minimum. Persyaratan terhadap kontrol jenis polusi tertentu dan larangan terhadap diskriminasi. Dengan demikian, ketika suatu perusahaan bertindak melebihi persyaratan yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan, berarti perusahaan tersebut menjalankan responsibilitas sosial.

Salah satu model yang dikembangkan oleh kamar dagang Amerika Serikat (Robert M. Fulmer: 465) telah mengidentifikasi 4 level responsibilitas sosial perusahaan. Pertama, level terendah tentang responsibilitas sosial perusahaan adalah : perusahaan yang

⁸ Para manajer yang berada pada posisi kepemimpinan harus menyadari bahwa dibutuhkan pertimbangan yang mendalam untuk menentukan posisi antara bisnis profit dan bisnis *service*. Faktanya jelas bahwa bila manajer tidak tahu mengapa mereka melakukan pekerjaannya, maka mungkin mereka melakukannya dengan buruk dan tidak mungkin berlangsung lama.

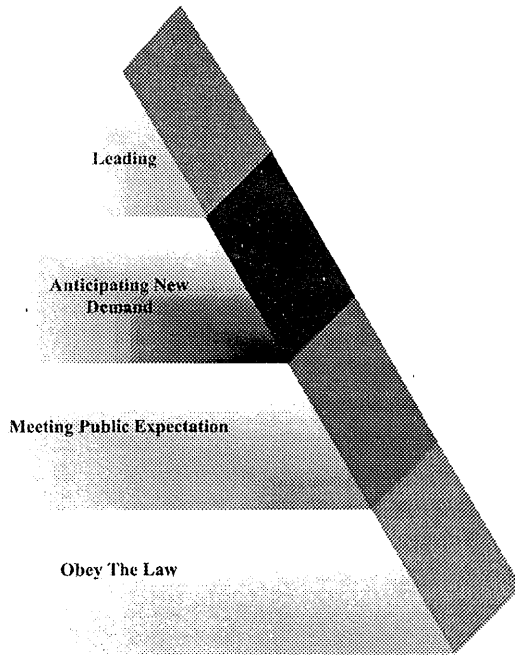
bergerak dengan cara sedemikian rupa sekedar memenuhi persyaratan legal yang dibutuhkannya untuk berada dalam bisnis yang bersangkutan. Manajer korporasi tradisional atau manajer yang berorientasi memaksimalkan profit mungkin akan tetap berada di level ini.

Kedua adalah perusahaan yang sedikit lebih bertanggung jawab karena mau bergerak melebihi persyaratan hukum dengan berupaya memenuhi ekspektasi publik yang sudah diketahuinya.

Ketiga adalah level responsibilitas yang lebih tinggi yang diperlihatkan oleh perusahaan yang berupaya mengantisipasi permintaan-permintaan sosial baru sebelum berkembangnya gelombang besar opini publik.

Level terakhir dari responsibilitas adalah di mana suatu perusahaan melaksanakan kepemimpinan dalam membangun standar baru dari performa bisnis.

Diagram 1: Hierarkhi Responsibilitas Sosial



Sumber : Fulmer, Robert M. (1988) *The New Management*, Fourth Edition, Macmillan Publishing Company, USA.

1.5.3. Evolusi Responsibilitas Sosial

Sikap komunitas bisnis terhadap responsibilitas sosial terus berubah. Menurut Robert Hay dan Ed Gray⁹ sikap ini telah melalui tiga fase yang berbeda:

- (1) Pada tahap awal para manajer bisnis percaya bahwa satu-satunya tujuan bisnis adalah memaksimalkan profit. Pandangan ini

⁹ "Social Responsibilities of Business Managers," *Academy of Management Journal* (March 1974), pp. 135-138.

berasal dari Adam Smith yang meyakini bahwa dorongan individual untuk mendapatkan maksimum profit dan regulasi pasar yang kompetitif dapat berinteraksi untuk menghasilkan jumlah terbesar kemakmuran nasional dan barang-barang publik yang maksimum. Posisi ini diterima selama paruh awal abad 20 karena mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara agregat. Menurut model dari Kamar Dagang Amerika seperti tampak pada gambar terdahulu, Tahap ini merupakan level terendah dari tanggung jawab sosial yaitu memenuhi hukum/aturan.

- (2) Pada 1920–1930 an karena difusi kepemilikan dari korporasi-korporasi di Amerika Serikat dan perkembangan masyarakat yang pluralistik menghasilkan kemunculan dari konsep *trusteeship*. Menurut konsep ini manajer korporasi bertanggung-jawab untuk memelihara keseimbangan yang adil antara klaim-klaim pelanggan, karyawan, *supplier*, kreditor, dan komunitas, serta pemegang saham. Konsep *trusteeship* termasuk memenuhi ekspektasi publik yang diketahui dan sedikit partisipasi dalam tujuan sosial. Dengan demikian merupakan level kedua dalam tahapan tanggung jawab sosial.
- (3) Yang lebih mutakhir adalah munculnya konsep kualitas hidup (*quality of life*). Setelah Negara semakin makmur, isunya bergeser pada masalah lingkungan karena kelangkaan dari *basic goods* dan *services* tidak lagi menjadi problem yang fundamental. Perhatian bergeser pada masalah kemunduran kota, polusi udara dan air, kerusakan *landscape*. Pergeseran penekanan ini dibarengi dengan *demand* sosial bahwa bisnis tersebut harus menggunakan teknologi dan *managerial skill*nya untuk membantu memecahkan problem-problem besar tersebut sehingga memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua warga negara. Dengan demikian konsep ini merupakan level ketiga dan keempat dari hierarki tanggung jawab sosial. Konsep kualitas hidup ini akan lebih agresif dalam mengantisipasi *demand* sosial baru dan akan

bergerak pada *genuine leadership* dalam area etika dan masalah sosial.

1.6. Metodologi

1.6.1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Unit analisis penelitian ini adalah organisasi perusahaan yang mengelola *community development* dan program *community development* yang akan diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya dikaitkan dengan tujuan *community development*. Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

1.6.2. Model Analisis

Setiap proses evaluasi pada intinya adalah merupakan pengukuran atas derajat kesamaan (*congruency*) antara yang ingin dicapai dengan apa yang telah dicapai. Analisis dampak ini diperlukan guna mengetahui apakah program *community development* yang dilakukan perusahaan industri itu telah memberikan dampak sebagaimana dituntut dalam formulasi teoritis-normatifnya.

Untuk perusahaan BUMN, *community development* ini berlandaskan pada ketentuan normatif Keputusan Menteri BUMN Nomor 236/MBU/2003. Instruksi ini menentukan bahwa program *community development* bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar industri. Penelitian evaluasi *community development* tidak hanya diarahkan untuk melihat kegiatan *community development* yang memfokuskan pada aspek-aspek konkrit seperti pembangunan infrastruktur tetapi juga melihat pada peningkatan kemampuan masyarakat (*capacity building*) yaitu kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahannya (*improving the ability of people to deal*

with their problems). Dalam konteks ini terdapat empat kemampuan yang harus dilihat yaitu:

- kemampuan untuk mengantisipasi dan mempengaruhi perubahan
- kemampuan untuk membuat keputusan informal
- kemampuan untuk menarik dan menyerap sumberdaya; serta
- kemampuan untuk mengelola sumberdaya guna mencapai tujuannya

Dalam kaitannya dengan evaluasi *community development*, kerangka penelitian evaluasi ini mengacu pada model “*Three Way Fit*” (Kesesuaian Tiga Arah). Dalam model ini harus dilihat *kapasitas kelembagaan, proses, dan output* program *community development*. Dimensi kelembagaan harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme konversi aspirasi dan kebutuhan obyektif masyarakat menjadi kebutuhan organisasi pelaksana program, melengkapinya dengan berbagai sumber dan memobilisasinya disertai dengan proses yang sesuai agar *output* program sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Beberapa indikator berikut dijadikan acuan di lapangan, yaitu:

(1) Sikap dan Perilaku Unit pelaksanakan program

- a. Kesadaran akan aspek *capacity building* dalam program *community development*
- b. Modal sosial dan komitmen akan program *community development*
- c. Sensitivitas terhadap masalah dan pemahaman yang baik terhadap pemecahannya
- d. Alokasi dana dan waktu untuk program *community development*

(2) Proses Program *community development*

- e. Metode identifikasi kebutuhan dan analisis situasi
- f. Metode formulasi program: partisipatif atau non partisipatif
- g. Metode mengintegrasikan program ke dalam perencanaan lokal

- h. Metode memobilisasi sumber daya lokal untuk mendukung pelaksanaan *community development*
- i. Pengaturan wahana struktural untuk pelaksanaan *community development*
- j. Supervisi, monitoring, evaluasi dan sistem pelaporan
- k. Metode membangkitkan partisipasi masyarakat
- l. Membangun jaringan sosial.

(3) *Output Program community development*

- m. *Outreach capability* yaitu kemampuan menjangkau kelompok sasaran yang secara obyektif sesuai kualifikasi.
- n. Peningkatan pendapatan masyarakat
- o. *Self-sustaining capacity* yaitu terciptanya kemampuan kelompok sasaran dalam pengembangan *community development*
- p. *Snow-balling effect* yaitu ada dampak lanjutan positif kepada masyarakat sekitarnya.
- q. Terciptanya kesesuaian program dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Setelah itu, penelitian evaluasi ini dapat menentukan model analisis dampak. Secara skematis, model ini dapat dilihat dalam bentuk diagram berikut:

Digram 2
Model Analisis Dampak Program

<i>Input Program</i>	Dampak		
	Langsung	Tidak langsung	Output
<ul style="list-style-type: none"> - Sumber: dana, daya dan kelembagaan - Kebijakan <i>community development</i> - Kegiatan <i>community development</i> 	Peningkatan <i>capacity building</i>	Peningkatan pendapatan	Peningkatan tingkat <i>social wellbeing</i>

Selanjutnya adalah penentuan indikator untuk mengukur *congruency* antara sasaran teoritis-normatif dan prestasi aktual program. Penentuan indikator ini mengacu pada skema Korten di atas. Asumsinya adalah bahwa jika program *community development* berhasil, maka harus ada mekanisme artikulasi aspirasi yang memberdayakan masyarakat memperoleh akses dalam pengambilan keputusan. Hal ini harus ada kelembagaan yang mengintegrasikan input dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian lembaga itu harus memiliki kemampuan menangkap kebutuhan subyektif masyarakat dan peningkatan pendapatannya. Oleh karena itu beberapa hal berikut menjadi bahan penelitian lapangan, yaitu:

- (1) Kesejajaran antara metode penyaringan aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan keputusan dalam unit pelaksana tugas:
 - a. Metode identifikasi permasalahan pada tingkat pelaksana tugas
 - b. Metode formulasi proyek dalam perusahaan
 - c. Metode pengintegrasian program *community development* dalam rencana pembangunan daerah.
- (2) Kesesuaian antara tugas yang digariskan dalam program *community development* dengan kemampuan unit pelaksana tugas:
 - d. Kualifikasi personal
 - e. Gaya kepemimpinan
 - f. Kesiediaan dan kemampuan penerapan ide *bottom up planning*
 - g. Orientasi pada *equal participation* dan *equity*
 - h. Wawasan tentang program *community development*
- (3) Kesesuaian antara *output* program dengan kebutuhan kelompok sasaran (masyarakat):
 - i. *Social concern* kelompok sasaran
 - j. Kebutuhan subyektif masyarakat
 - k. Tujuan program *community development*

- l. Sasaran program
- m. Kesesuaian antara *subyektif needs* dan *social concerns*.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara pengumpulan data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang menyangkut ketentuan tentang unit pelaksanaan *community development* dan program-program *community development*. Sementara itu data primer diperoleh dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di daerah yang dipilih secara *purposive*, seperti pejabat dan karyawan yang terlibat dalam implementasi *community development*, pejabat Pemda yang berkaitan dengan implementasi *community development*, LSM, para tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam program *community development*. Adapun instrumen penelitian yang akan dipakai adalah *interview guide*.

1.6.4. Analisis Data

Data dan informasi yang berhasil dihimpun dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kerangka analisis seperti telah diuraikan di atas. Hasil analisis penelitian ini akan menjadi bahan dalam menyusun model implementasi *community development* yang dapat meningkatkan efektivitas *community development*.

1.7. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan skenario penelitian ini, pada tahun 2006 ini Jawa Barat dan Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristik pada kedua daerah ini banyak terdapat perusahaan air minum dalam kemasan dalam skala besar. Secara lebih spesifik untuk daerah Jawa Barat lokasi yang dipilih adalah Sukabumi yaitu PT.

Bab I - Pendahuluan

Aqua Golden Missisipi dan masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Sementara untuk daerah Jawa Timur lokasi yang dipilih adalah Pasuruan, yaitu PT. Ades Waters Indonesia dan masyarakat sekitarnya.

BAB II

PROFIL DAERAH PENELITIAN

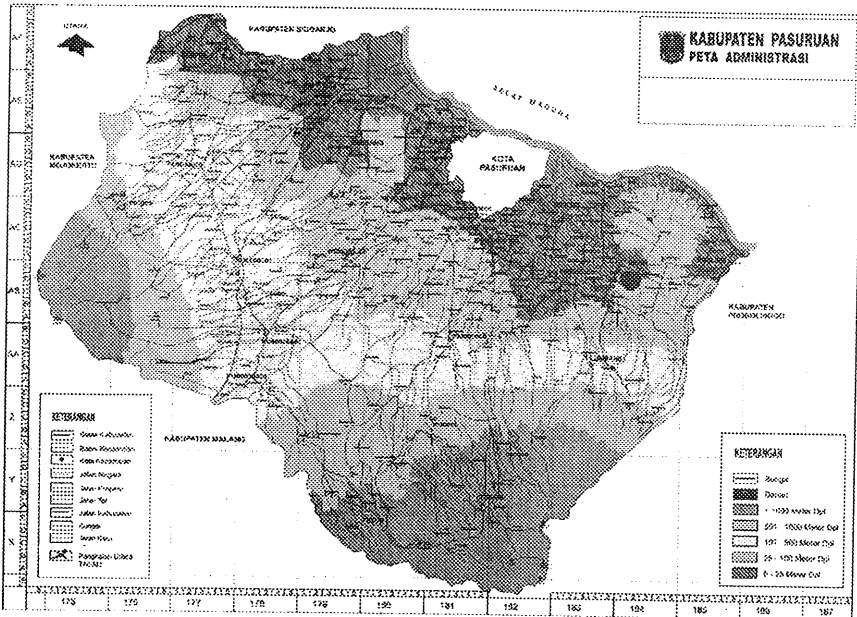
2.1. Profil Daerah Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur terletak pada 112 derajat 33' 55' sampai 113 derajat 05' 37' BT dan 7 derajat 32' 24' LS dan berbatasan dengan :

- Bagian Utara - Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura
- Bagian Timur - Kabupaten Probolinggo
- Bagian Selatan - Kabupaten Malang
- Bagian Barat - Kabupaten Mojokerto

Gambar 2.1.1.

Peta Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur



Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka, Tahun 2004.

Berdasarkan luas wilayahnya, Kabupaten Pasuruan terbentang di atas areal sejumlah 147.401,5 Ha atau 3% dari luas Jawa Timur dan terbagai menjadi 3 bagian :

- (1) Daerah Pegunungan dan Berbukit, dengan ketinggian antara 180 s/d 3000 m. Daerah ini membentang di bagian Selatan dan Barat meliputi Kecamatan Lumbang, Puspo, Tosari, Tutur, Purwodadi, Prigen dan Gempol.
- (2) Daerah Dataran Rendah dengan ketinggian antara 6 m sampai 91 m. Dataran rendah ini berada di bagian tengah, merupakan daerah yang subur.
- (3) Daerah Pantai, dengan ketinggian antara 2 m sampai 8 m di atas permukaan laut. Daerah ini membentang di bagian Utara meliputi Kecamatan Nguling, Lekok, Rejoso, Kraton dan Bangil.

Secara umum Daerah Kabupaten Pasuruan tergolong daerah kering, kendati berada di daerah pegunungan dengan curah hujannya cukup. Sedangkan dilihat dari segi ekonomi, letak wilayahnya sangat strategis karena terletak pada delta jalur raya ekonomi:

- Surabaya - Jember/Banyuwangi/Bali
- Surabaya - Malang dan
- Malang - Jember/Banyuwangi/Bali

Secara administratif wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi atas: 24 (dua puluh empat) Wilayah Kecamatan; 341 (tiga ratus empat puluh satu) Wilayah Desa; 1.694 Pedukuhan dan 24 (dua puluh empat) Wilayah Kelurahan. Untuk mengetahui persebaran wilayah administratifnya lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1.
Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT
Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT
1.	Purwodadi	13	70	112	397
2.	Tutur	12	74	110	295
3.	Puspo	7	42	79	198
4.	Tosari	8	27	31	126
5.	Lumbang	12	48	83	208
6.	Pasrepan	17	68	128	289
7.	Kejayan	24/1	91	153	430
8.	Wonorejo	15	72	114	378
9.	Purwosari	14/1	67	161	383
10.	Prigen	11/3	79	187	576
11.	Sukorejo	19	73	180	478
12.	Pandaan	14/4	97	184	483
13.	Gempol	15	113	200	663
14.	Beji	12/2	89	108	382
15.	Bangil	4/11	18	70	248
16.	Rembang	17	73	139	340
17.	Kraton	25	99	123	392
18.	Pohjenterk	9	36	48	160
19.	Gondang Wetan	19/1	75	100	271
20.	Rejoso	16	65	81	265
21.	Winongan	18	107	113	211
22.	Grati	14/1	71	108	382
23.	Lekok	11	63	114	309
24.	Nguling	15	77	114	333
Jumlah		341/24	1.694	2.840	8.197

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka Tahun 2004.

2.1.1. Kependudukan

Berdasarkan data statistik akhir Desember 2004, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan seluruhnya 1.438.290 jiwa yang terdiri dari : laki-laki 711.976 jiwa dan perempuan 726.314 jiwa (lihat Tabel 2.1.2.). Konsentrasi jumlah penduduk berada di Kecamatan Gempol (112.413 jiwa), dan secara berurutan diikuti oleh beberapa Kecamatan lainnya yang jumlah penduduknya di antara 70.000 jiwa sampai dengan 95.000 jiwa, yaitu: Kecamatan Pandaan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Bangil, Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Grati. Sementara Kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Tosari, Puspo maupun Pohjentrek.

Tabel 2.1.2.
Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Purwodadi	31.305	31.248	62.553
2.	Tutur	25.548	25.519	51.067
3.	Puspo	13.058	13.549	26.607
4.	Tosari	8.789	9.280	18.069
5.	Lumbang	16.105	16.479	32.584
6.	Pasrepan	23.865	24.860	48.725
7.	Kejayan	28.960	31.157	60.117
8.	Wonorejo	25.633	27.236	52.869
9.	Purwosari	36.982	37.269	74.251
10.	Prigen	39.766	39.128	78.894
11.	Sukorejo	37.369	37.907	75.276
12.	Pandaan	46.625	47.662	94.287
13.	Gempol	56.261	56.152	112.413
14.	Beji	37.350	37.705	75.055
15.	Bangil	40.372	42.568	82.940
16.	Rembang	27.263	28.748	56.011
17.	Kraton	43.752	42.858	86.610
18.	Pohjentrek	13.240	13.371	26.611
19.	Gondang Wetan	24.333	25.157	49.490
20.	Rejoso	21.061	20.596	41.657
21.	Winongan	19.598	20.037	39.635
22.	Grati	35.602	36.069	71.671
23.	Lekok	31.935	33.676	65.611
24.	Nguling	27.204	28.083	55.287
J u m l a h		711.976	726.314	1.438.290

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka Tahun 2004.

Kendati Kecamatan Gempol memiliki jumlah penduduk yang paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Pasuruan, ternyata kecamatan ini hanya memiliki kepadatan penduduk 1.732 jiwa/km² dan menduduki peringkat kelima sebagai kecamatan yang memiliki penduduk terpadat per km². Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi (peringkat ke-satu) adalah Kecamatan Pohjentrek (2.240 jiwa/km²), yang diikuti dengan kecamatan lainnya yakni: Kecamatan Pandaan (2.179 jiwa/km²), Kecamatan Gondang Wetan (1.885 jiwa/ km²), Kecamatan Beji (1.881 jiwa/ km²), Kecamatan Bangil (1.860 jiwa/ km²). Sementara tingkat kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Tosari (184 jiwa/ km²), karena daerahnya berada di kawasan pegunungan Bromo yang banyak terdapat hamparan lautan pasir. Begitu juga halnya dengan kepadatan penduduk di Kecamatan Lumbang (260 jiwa/ km²), karena daerah ini adalah kawasan hutan yang tidak subur, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Untuk melihat persebaran kepadatan penduduk (jiwa/km²) di seluruh kecamatan Kabupaten Pasuruan dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.1.3.
Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
1.	Purwodadi	102,455	62.553	611
2.	Tutur	86,300	51.067	592
3.	Puspo	58,350	26.607	456
4.	Tosari	98,000	18.069	184
5.	Lumbang	125,550	32.584	260
6.	Pasrepan	89,950	48.725	542
7.	Kejayan	79,150	60.117	760
8.	Wonorejo	47,300	52.869	1.118
9.	Purwosari	59,870	74.251	1.240
10.	Prigen	121,900	78.894	647
11.	Sukorejo	58,180	75.276	1.294
12.	Pandaan	43,270	94.287	2.179
13.	Gempol	64,920	112.413	1.732
14.	Beji	39,900	75.055	1.881
15.	Bangil	44,600	82.940	1.860
16.	Rembang	42,520	56.011	1.317
17.	Kraton	50,750	86.610	1.707
18.	Pohjentrek	11,880	26.611	2.240
19.	Gondang Wetan	26,250	49.490	1.885
20.	Rejoso	37,000	41.657	1.126
21.	Winongan	45,970	39.635	862
22.	Grati	50,780	71.671	1.411
23.	Lekok	46,570	65.611	1.409
24.	Nguling	42,600	55.287	1.298
	Jumlah	1.474,015	1.438.290	976

Sumber: Kabupaten Pasuruan Dalam Angka Tahun 2004.

Dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten pun telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, di antaranya dengan tidak henti-hentinya menggencarkan program Keluarga Berencana dan melakukan pemberangkatan transmigrasi. Dalam hal pemberangkatan transmigrasi pada tahun 2004, jumlah penduduk yang diberangkatkan sebanyak 25 KK atau 18,80% dari jumlah yang mendaftar. Jumlah ini meningkat sebesar 25 % dari jumlah yang diberangkatkan tahun 2003 yaitu sebanyak 20 KK atau 21,05 % dari jumlah pendaftar. Implikasi dari upaya pengendalian penduduk tersebut adalah pertumbuhan penduduk dapat ditekan dari 2,0% menjadi 1,5% dan perkembangan ini sekaligus menunjukkan keberhasilan program Keluarga Berencana. Keberhasilan Keluarga Berencana di kabupaten ini berdampak positif pada jumlah tanggungan keluarga yang telah mendekati rasio ideal. Rata-rata jumlah tanggungan keluarga adalah 3,5 anggota per KK. Ini berarti setiap KK memiliki anggota keluarga antara 3 sampai 4 jiwa, sehingga beban setiap keluarga tidak terlalu tinggi.

2.1.2. Pendidikan

Mengenai kondisi pendidikan penduduk di Kabupaten Pasuruan dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Pasuruan memiliki Sekolah Dasar sebanyak 748 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 139.445 murid dan guru sebanyak 6.492 guru. Sedangkan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama terdata 94 sekolah dengan jumlah murid 31.244 murid dan guru sebanyak 2.181 guru. Dari data tersebut terlihat bahwa rata-rata tiap Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan memiliki 186 murid dengan 9 guru, dan untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama rata-rata memiliki 332 murid dengan 23 guru. Dari Tabel 2.1.4. juga terlihat bahwa untuk Sekolah Dasar setiap satu orang guru rata-rata harus menangani sebanyak 21 murid, sementara itu pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama rata-rata tiap 14 murid diajar oleh seorang guru. Sedangkan untuk pendidikan Tingkat

Lanjutan Atas dan Kejuruan, di Kabupaten Pasuruan rata-rata tiap Sekolah Lanjutan Tingkat Atas rata-rata menampung 338 murid dengan 29 orang guru, dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan setiap sekolah rata-rata menampung 482 murid dengan rata-rata jumlah guru sebanyak 28 orang tiap sekolah. Jika dilihat rasio antara guru dan murid, rata-rata setiap guru pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas menangani 12 orang murid, sementara pada Sekolah Menengah Kejuruan rata-rata setiap guru menangani 17 murid.

Untuk jelasnya, berdasarkan data yang telah dirangkum mengenai jumlah SD, SMP, SMU dan SMK, baik Negeri maupun Swasta, berikut jumlah murid dan gurunya, dapat dilihat pada tampilan beberapa tabel berikut.

Tabel 2.1.4.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD dan SLTP
di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	S D			S L T P		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1.	Purwodadi	39	6.057	306	4	848	70
2.	Tutur	32	4.459	235	5	933	149
3.	Puspo	21	2.990	118	1	207	12
4.	Tosari	16	1.734	142	2	327	64
5.	Lumbang	29	3.575	225	2	505	54
6.	Pasrepan	30	4.714	192	2	381	30
7.	Kejayan	37	5.673	192	1	343	21
8.	Wonorejo	28	5.458	217	1	600	36
9.	Purwosari	37	6.625	218	6	2.273	127
10.	Prigen	36	6.142	310	9	1.984	174
11.	Sukorejo	38	6.986	314	5	1.597	101
12.	Pandaan	47	9.112	440	8	3.692	225
13.	Gempol	35	8.633	365	8	3.665	224
14.	Beji	32	6.732	338	8	2.079	178
15.	Bangil	35	7.997	451	10	4.102	284
16.	Rembang	30	5.580	247	1	400	24
17.	Kraton	31	7.616	314	1	516	28
18.	Pohjentrek	18	3.212	156	2	557	46
19.	Gondang Wetan	25	4.725	252	3	1.119	73
20.	Rejoso	27	4.550	255	2	515	37
21.	Winongan	25	3.926	239	3	1.137	80
22.	Grati	36	7.974	345	4	1.418	95
23.	Lekok	30	8.331	284	2	503	38
24.	Nguling	34	6.644	298	4	1.543	81
Jumlah			139.445	6.492	94	31.244	2.181

Sumber: Diolah dari Kabupaten Pasuruan Dalam Angka, Tahun 2004.

Tabel 2.1.5.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SLTA dan SMK
di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	S L T A			S M K		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1.	Purwodadi	3	308	56	-	-	-
2.	Tutur	2	332	36	1	75	16
3.	Puspo	-	-	-	1	30	16
4.	Tosari	1	97	14	-	-	-
5.	Lumbang	-	-	-	-	-	-
6.	Pasrepan	-	-	-	-	-	-
7.	Kejayan	1	835	52	-	-	-
8.	Wonorejo	-	-	-	1	190	30
9.	Purwosari	3	1.586	104	2	1.351	81
10.	Prigen	3	910	79	-	-	-
11.	Sukorejo	2	316	42	3	285	52
12.	Pandaan	6	2.192	184	3	2.746	103
13.	Gempol	2	1.351	71	5	3.362	209
14.	Beji	-	-	-	1	986	24
15.	Bangil	5	1.183	167	5	2.746	111
16.	Rembang	-	-	-	-	-	-
17.	Kraton	-	-	-	-	-	-
18.	Pohjentrek	-	-	-	-	-	-
19.	Gondang Wetan	1	835	49	-	-	-
20.	Rejoso	-	-	-	-	-	-
21.	Winongan	1	41	25	1	62	16
22.	Grati	2	829	41	2	659	65
23.	Lekok	-	-	-	-	-	-
24.	Nguling	-	-	-	1	52	12
Jumlah		32	10.815	930	26	12.544	735

Sumber: Diolah dari Kabupaten Pasuruan Dalam Angka, Tahun 2004.

Dari data mengenai sekolah ini dapat dikatakan bahwa pemerintah dan swasta telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Terlihat bahwa meskipun semakin tinggi jenjang pendidikan jumlah sekolahnya semakin sedikit tetapi rata-rata jumlah guru di tiap sekolah justru semakin besar. Jika pada Tabel 2.1.4. di atas terlihat bahwa di setiap kecamatan bisa ditemui Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, maka tidak demikian halnya dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Tampaknya tersedianya Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di setiap kecamatan ini tidak terlepas dari program pemerintah yang menetapkan pendidikan dasar wajib sembilan tahun yaitu enam tahun Sekolah Dasar dan tiga tahun Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Dari Tabel 2.1.5. bisa dilihat bahwa sejumlah kecamatan tidak memiliki Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan, bahkan beberapa kecamatan seperti Kecamatan Lumbang, Pasrepan, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Rejoso, dan Lekok sama sekali tidak ada sekolah tingkat atasnya. Namun demikian bukan berarti bahwa anak usia sekolah menengah tingkat atas di kecamatan-kecamatan tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah, mereka tetap bersekolah di sekolah-sekolah lanjutan atas di kecamatan lain yang berdekatan atau di Kota Pasuruan.

2.1.3. Ketenagakerjaan

Kebijakan bidang ketenagakerjaan diarahkan kepada semakin berkurangnya pengangguran serta menciptakan kesempatan berusaha dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan iklim usaha yang dapat menarik Investasi, keterpaduan kebijaksanaan pembangunan daerah dan bursa tenaga kerja. Selain itu, untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin diupayakan melalui pengerahan dan pengiriman transmigran ke Propinsi Bengkulu.

Bidang ketenagakerjaan memiliki ruang lingkup kewenangan yang cukup strategis. Walaupun hanya merupakan bidang penunjang atau pendukung, bidang ini cukup memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten khususnya dalam upaya peningkatan kualitas tenaga kerja yang produktif, terampil, mandiri, berjiwa wirausaha dan beretos kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan.

Tabel 2.1.6.
Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Purwodadi	19.922	12.817	32.739
2.	Tutur	17.876	10.683	28.559
3.	Puspo	9.116	5.635	14.751
4.	Tosari	9.108	4.000	13.108
5.	Lumbang	11.324	6.921	18.245
6.	Pasrepan	16.709	10.641	27.350
7.	Kejayan	19.998	12.446	32.444
8.	Wonorejo	16.709	10.250	26.959
9.	Purwosari	22.840	14.098	36.938
10.	Prigen	25.575	15.238	40.813
11.	Sukorejo	24.481	15.225	39.706
12.	Pandaan	28.796	17.257	46.053
13.	Gempol	31.635	19.424	51.059
14.	Beji	22.344	13.557	35.901
15.	Bangil	26.748	16.502	43.250
16.	Rembang	17.621	11.258	28.879
17.	Kraton	24.804	16.106	40.910
18.	Pohjentrek	7.792	4.953	12.745
19.	Gondang Wetan	15.965	9.870	25.835
20.	Rejoso	12.660	7.729	20.389
21.	Winongan	13.306	8.395	21.701
22.	Grati	23.832	14.833	38.665
23.	Lekok	17.584	11.664	29.248
24.	Nguling	17.148	11.556	28.704
	J u m l a h	453.893	281.058	734.951

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten.Pasuruan, Tahun 2004.

Berdasarkan data statistik yang tersedia, jumlah pencari kerja di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2004 terdiri dari 4.676 laki-laki dan 4.361 perempuan. Pencari kerja tersebut mayoritas berpendidikan SLTA dan didominasi oleh kaum laki-laki (lihat Tabel 2.1.7.). Dari jumlah pencari kerja tersebut ternyata yang memperoleh penempatan lapangan kerja hanya sebanyak 657 laki-laki dan 591 perempuan.

Tabel 2.1.7.
Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Pasuruan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tamat SD	8	4	12
2.	Tamat SLTP			
	a. Umum	131	23	154
	b. Kejuruan	-	-	-
3.	Tamat SLTA	2.683	1.964	4.647
4.	Tamat Akademi			
	a. D 1 & D.2	475	618	1.093
	b. D.3	200	301	501
5.	Sarjana	1.179	1.451	2.630
	J u m l a h	4.676	4.361	9.037

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan, Tahun 2004.

Jumlah pencari kerja dari tahun sebelumnya yang telah mendapatkan penempatan kerja pada tahun berikutnya adalah sejumlah 1.248, terdiri dari 657 laki-laki dan 591 perempuan. Sementara pencari kerja yang belum mendapatkan penempatan jumlahnya mencapai lebih dari empat kali lipat jumlah yang mendapatkan penempatan kerja. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

Tabel 2.1.8.
Jumlah Pencari Kerja, Penempatan dan Permintaan
Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasuruan

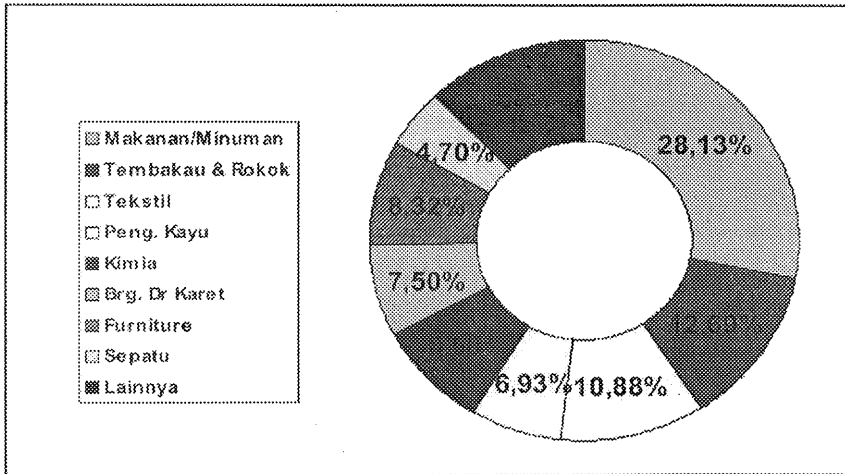
No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pencari Kerja	4.676	4.361	9.037
2.	Penghapusan	3.285	2.884	6.169
3.	Penempatan	657	591	1.248
4.	Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan	2.924	2.272	5.196
5.	Pemenuhan Lowongan	657	591	1.248
6.	Permintaan Lowongan	657	591	1.248
7.	Sisa Lowongan yang Belum dipenuhi	-	-	-
Jumlah		12.856	11.290	24.146

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan, Tahun 2004.

2.1.3.1. Jumlah Tenaga Kerja

Jenis industri yang menyerap tenaga kerja terbanyak masih didominasi oleh industri makanan dan minuman, yang mencapai 28,13% dari total tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. Sedangkan industri pengolahan tembakau dan rokok menyerap tenaga kerja 12,69%, kemudian industri tekstil termasuk bordir menyerap tenaga kerja 10,88%, diikuti oleh industri *furniture* dan kimia dengan persentase hampir sama yaitu 8,32% dan 8,50%, industri barang-barang dari karet 7,50%, industri pengolahan kayu 6,93% dan industri sepatu mencapai 4,70%, hal ini disebabkan sifat dari jenis industri di atas yang padat karya. Sedangkan jenis industri yang lain rata-rata kurang dari 3 persen seperti terlihat pada Diagram 2.1.1

Diagram 2.1.1.
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Industri
di Kabupaten Pasuruan



Sumber: Diolah dari Pendataan Potensi Usaha Sektor Industri Kabupaten Pasuruan, BPS dan Bappeda, Tahun 2005.

2.1.3.2. Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Jabatan Dalam Perusahaan

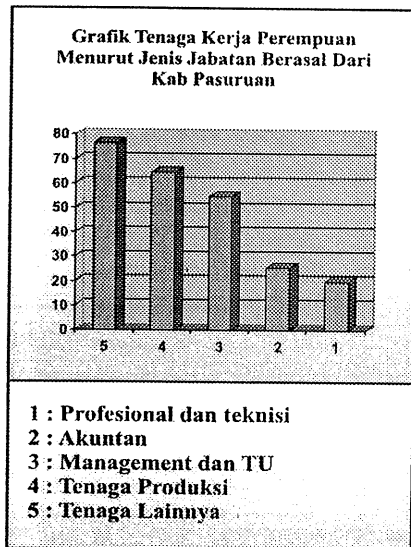
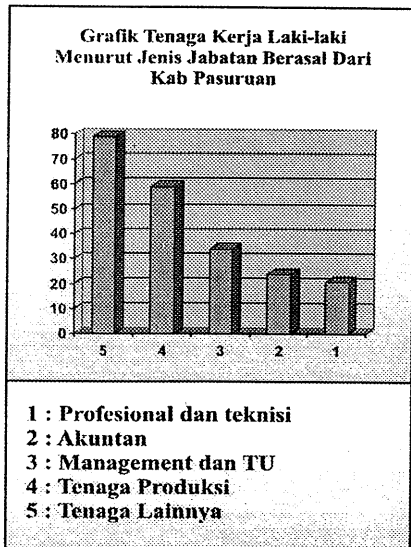
Kualitas tenaga kerja di bidang industri dapat diukur dari kemampuan tenaga kerja tersebut bersaing untuk menduduki posisi atau jabatan penting dalam perusahaan. Karena semakin tinggi jenis jabatan semakin tinggi pula pendidikan formal yang dibutuhkan, demikian juga dengan *skill* atau keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Merujuk pada **Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI)** jenis jabatan dalam perusahaan dapat digolongkan menjadi 5 kategori. *Kategori pertama* adalah **Tenaga Profesional dan Teknisi**, termasuk dalam kategori ini adalah para profesional yang ahli di bidangnya masing-masing misalnya ahli mesin, ahli kimia, jajaran direksi dan sebagainya. *Kategori kedua* adalah **Tenaga Akuntan** termasuk di

dalamnya tenaga ahli di bidang keuangan (akuntansi), *ketiga* adalah **Tenaga Manajemen dan Tata Usaha** yaitu tenaga yang berhubungan langsung dalam proses produksi, misalnya operator mesin, bagian *packing* dan tenaga kasar lainnya di bagian produksi dan *kategori kelima* adalah **tenaga lainnya** yaitu tenaga kasar lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, yang sifatnya hanya membantu kelancaran produksi misalnya satpam, *cleaning service*, sopir dan sebagainya.

Dari hasil pendataan potensi usaha sektor industri diperoleh temuan yang cukup menarik untuk dicermati, yaitu secara umum baik tenaga kerja laki-laki maupun perempuan menunjukkan *trend* yang sama, bahwa semakin tinggi jenis jabatan dalam perusahaan semakin kecil persentase tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Pasuruan, seperti tampak pada Diagram 2.1.2.

Diagram 2.1.2.

Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Jabatan di Kabupaten Pasuruan



Sumber : Diolah dari Pendataan Potensi Usaha Sektor Industri Kabupaten Pasuruan, BPS dan Bappeda, Tahun 2005.

Tenaga kerja produksi bahkan sebagian besar berasal dari Kabupaten Pasuruan mencapai lebih dari separuh yaitu 56,03 % untuk tenaga kerja laki-laki dan 64,36% untuk tenaga kerja perempuan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan jenis jabatan tenaga kasar lainnya, bahkan dengan persentase lebih besar mencapai di atas 70% yaitu 79,08% untuk tenaga kerja laki-laki dan 76,26% untuk tenaga kerja perempuan. Kondisi di atas mengindikasikan bahwa kesempatan tenaga kerja berasal dari Kabupaten Pasuruan untuk menduduki posisi atau jabatan penting dalam perusahaan masih kurang, dan implikasinya adalah diperlukan adanya peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan. Secara rinci data mengenai tenaga kerja berdasarkan jenis jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.9.

Tabel 2.1.9.
Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Jabatan dan Berasal dari Kabupaten Pasuruan

No.	Jenis Jabatan	Tenaga Kerja					
		Laki-laki			Perempuan		
		Jumlah	Dari Pasuruan		Jumlah	Dari Pasuruan	
			F	%		F	%
1.	Profesional & Tekstil	351	73	20,8	50	10	20,00
2.	Akuntan	21	5	23,81	51	13	25,49
3.	Management & Tata Usaha	783	266	33,97	406	221	54,43
4.	Tenaga Produksi	3.876	2.288	59,03	2.892	2.505	64,36
5.	Tenaga Lainnya	411	325	79,08	257	196	76,26

Sumber : Diolah dari Pendataan Potensi Usaha Sektor Industri Kabupaten Pasuruan, BPS dan Bappeda, Tahun 2005.

Tabel 2.1.10.
Jumlah Perusahaan yang Menampung Tenaga Kerja menurut
Klasifikasi dan Kewarganegaraan

No.	Klasifikasi Perusahaan	Perusahaan	WNI	WNA
1.	Kurang dari 25 Pekerja	574	45.969	19
2.	25 – 49 Pekerja	140	5.767	9
3.	50 – 99 Pekerja	156	13.534	13
4.	100 Pekerja ke atas	298	45.981	185
J u m l a h		1.168	111.251	226

Sumber: Pendataan Potensi Usaha Sektor Industri Kabupaten Pasuruan, BPS dan Bappeda, Tahun 2005

2.1.4. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan atau mengevaluasi hasil-hasil pembangunan suatu daerah dan sekaligus juga dapat digunakan untuk melihat potensi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto, atau yang dikenal sebagai PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha.

Berdasarkan PDRB 2002-2004, proporsi kontribusi sektoral terbesar pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan terdiri dari sektor sekunder (seperti industri pengolahan, listrik, gas, dan air, serta bangunan) yakni sebesar 42,81%. Dan kontributor terbesar kedua adalah sektor tersier (terdiri dari usaha perdagangan, hotel, restoran, angkutan, komunikasi, bank, dan jasa-jasa lainnya) sebesar 30,41%. Sementara sektor primer (pertanian/hasil bumi, pertambangan dan penggalian) hanya berkontribusi sebesar 26,78% atau terendah. Dari komposisi ini diketahui bahwa proporsi hasil industri pengolahan, perdagangan dan jasa mengambil porsi yang cukup besar dibanding pertanian/hasil bumi.

Apabila dilihat dari rata – rata peningkatan produksi dari tahun 2002-2004, kelompok sekunder meningkat 4,86%, kelompok

tersier 4,56% dan kelompok primer 2,77%. Dari tahun 2002-2004 tingkat pertumbuhan kelompok primer sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Pasuruan terhadap lapangan usaha dari sektor yang menggantungkan sepenuhnya dari pertanian/hasil bumi, semakin berkurang. Sementara lapangan usaha yang mengandalkan hasil pengolahan dan jasa mengalami akselerasi yang lebih baik. Apabila kondisi ini tetap stabil hingga beberapa tahun ke depan, maka akan membawa Kabupaten Pasuruan secara perlahan dalam jangka panjang pada fase perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industrialis.

Data tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa dari sisi perekonomian Kabupaten Pasuruan dapat dikategorikan sebagai daerah yang relatif maju, karena sektor tersier dan sekunder mampu memberikan kontribusi yang relatif tinggi dibandingkan sektor primer.

2.1.5. Sektor Industri

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor industri memang memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Disamping itu, sektor industri juga menyediakan lapangan kerja yang cukup luas bagi tenaga kerja di kabupaten ini. Hal tersebut tercermin dari SUSENAS 2004 yang memberikan informasi bahwa 22,89% dari 665.470 atau sekitar 152.326 tenaga kerja yang ada di Kabupaten Pasuruan bekerja di sektor industri.

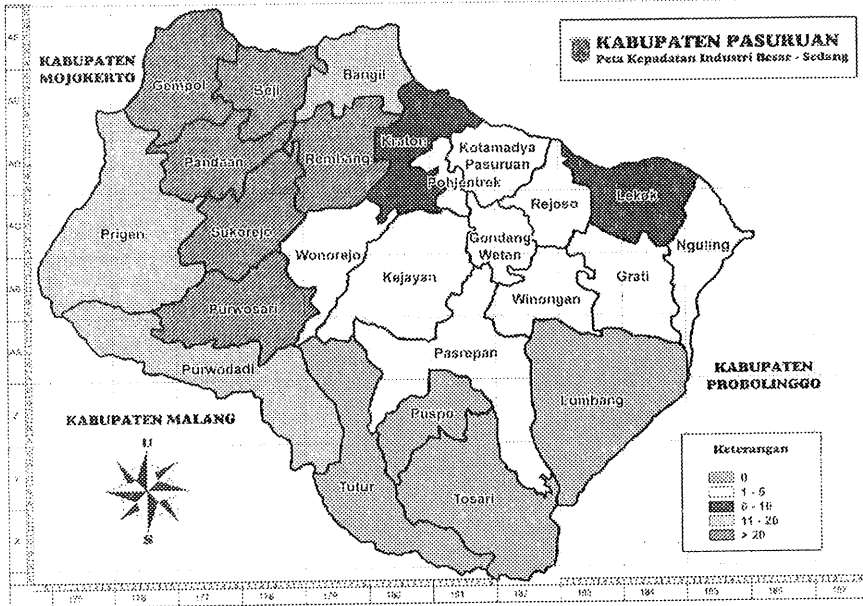
Industri yang berada di Kabupaten Pasuruan dapat dikategorikan pada Industri Sedang dan Industri Besar. Yang dimaksud dengan Industri Sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Sedangkan Industri Besar adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Dari 403 Industri,

Sedang - Besar di wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercatat dalam direktori perusahaan BPS tahun 2004, 297 di antaranya atau sekitar 74% berada di 5 kecamatan potensi industri. Persebarannya di masing-masing kecamatan adalah seperti berikut: Kecamatan Gempol sebanyak 83 perusahaan, Kecamatan Beji sebanyak 74 perusahaan, Kecamatan Pandaan sebanyak 58 perusahaan, Kecamatan Sukorejo sebanyak 42 perusahaan dan Kecamatan Rembang sebanyak 40 perusahaan. Sisanya 104 perusahaan atau sekitar 26 persen, tersebar di 15 kecamatan, masing-masing adalah Kecamatan: Purwosari 22 perusahaan, Bangil 14 perusahaan, Prigen 12 perusahaan, Purwodadi 11 perusahaan, Kraton 10 perusahaan, Lekok ada 7 perusahaan, Wonorejo dan Grati masing-masing 5 perusahaan, Kejayan, Rejoso dan Nguling masing-masing ada 4 perusahaan, Pohjentrek dan Gondang Wetan masing-masing ada 2 perusahaan, Pasrepan dan Winongan masing-masing 1 perusahaan.

Kepadatan Industri Sedang dan Besar pada umumnya mengelompok di sebelah barat wilayah Kabupaten Pasuruan, membentang dari utara ke selatan mulai dari Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Purwosari, kemudian bergeser ke timur ke Kecamatan Beji dan Kecamatan Rembang, seperti tampak pada Gambar 2.1.2. Hal ini tidak lepas dari sarana dan prasarana yang lebih memadai daripada bagian di wilayah lain, sebelah timur misalnya, di samping itu jalur transportasi lebih mudah, mengingat wilayah bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo dengan tingkat kepadatan industri yang sangat tinggi sebagai daerah penyangga Kota Surabaya.

Keadaan ini tentunya membuka peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan untuk mengembangkan wilayah industri bergeser ke arah timur dengan membangun sarana dan prasarana yang memadai bagi tumbuh dan berkembangnya kawasan industri, seperti di Kecamatan Rembang dengan PIERnya.

Gambar 2.1.2.
Peta Kepadatan Industri Besar – Sedang
di Kabupaten Pasuruan

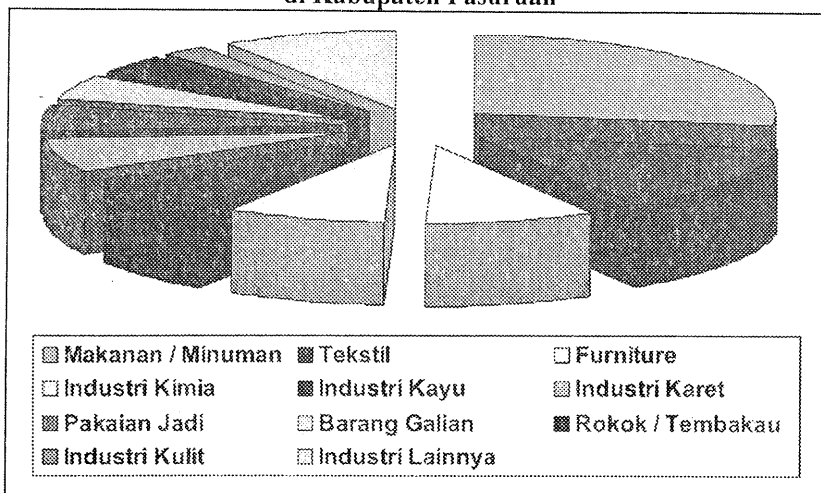


Sumber: Diolah dari Pendataan Potensi Usaha Sektor Industri Kabupaten Pasuruan, BPS dan Bappeda, Tahun 2005.

Dilihat dari komposisi jenis industri yang terdapat di Kabupaten Pasuruan, umumnya masih didominasi oleh kelompok industri makanan dan minuman mencapai 27,5 persen (111 perusahaan), 27 perusahaan di antaranya terdapat di Kecamatan Gempol dan 18 perusahaan di Kecamatan Pandaan dan 14 perusahaan di Kecamatan Beji. Terbanyak kedua adalah kelompok industri tekstil yang didominasi oleh kapuk dan pembuatan kasur mencapai 56 perusahaan, sentra industri kapuk dan pembuatan kasur ini terdapat di Kecamatan Sukorejo 17 perusahaan dan Kecamatan Purwosari sebanyak 11 perusahaan, kondisi ini tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku dan keahlian masyarakat setempat secara turun temurun.

Jenis industri lain yang dominan adalah kelompok industri *furniture* khususnya dari kayu, misalnya meja kursi dari kayu, tempat tidur, almari dan perabot rumah tangga lainnya yang terbuat dari kayu. Kelompok industri ini mencapai 37 perusahaan, banyak terdapat di Kecamatan : Beji, Kraton dan Gempol. Jenis industri lainnya yang cukup banyak jumlahnya adalah kelompok industri yang menghasilkan bahan kimia baik untuk bahan baku industri maupun barang-barang lainnya terdapat 35 perusahaan, jenis industri kimia ini mengelompok di tiga kecamatan, yaitu Gempol, (11 perusahaan), Rembang khususnya di PIER (8 perusahaan), Pandaan (6 perusahaan) dan Beji (5 perusahaan).

Diagram 2.1.3.
Komposisi Industri Besar – Sedang Berdasarkan Jenis Industri di Kabupaten Pasuruan



Sumber: Diolah dari Pendataan Potensi Usaha Sektor Industri Kabupaten Pasuruan, BPS dan Bappeda, Tahun 2005.

Untuk industri pakaian jadi termasuk bordir kerudung dan mukena banyak terdapat di Kecamatan Bangil dan Beji masing-masing terdapat 6 dan 8 perusahaan. Kelompok industri lain yang

menonjol di Kabupaten Pasuruan adalah industri kayu dan barang-barang dari kayu selain *furniture*, termasuk dalam kelompok ini misalnya penggergajian kayu, pengawetan dan pengolahan kayu, rotan, bambu dan barang-barang anyam-anyaman, terdapat 30 perusahaan dan sebagian besar terdapat di Kecamatan: Gempol (10 perusahaan), Beji (8 perusahaan) dan Pandaan (5 perusahaan). Untuk industri gelas, porselen, asbes, barang galian bukan logam lainnya di Kabupaten Pasuruan ternyata cukup potensi, jumlahnya mencapai 20 perusahaan terdapat di Kecamatan Pandaan, Gempol dan Beji khususnya kelompok industri semen, kapur dan gips dan barang-barang dari batu.

Sedangkan industri pengolahan tembakau dan pembuatan rokok di Kabupaten Pasuruan terdapat 16 perusahaan, menyebar di beberapa kecamatan antara lain: Kecamatan Pandaan dan Beji, masing-masing 3 perusahaan, Kecamatan Gempol, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lekok masing-masing 2 perusahaan.



Tabel 2.1.11.
Banyaknya Industri Besar - Sedang Menurut Jenis Industri
di Kabupaten Pasuruan

No.	Jenis Industri	Jumlah Perusahaan	
		Frekuensi	Persentase
1.	Makanan / minuman	111	27,5
2.	Tekstil/ kapuk/kasur	56	13,9
3.	<i>Furniture</i> dari kayu	37	9,2
4.	Industri Kimia dan Barang-barang dari bahan kimia	35	8,7
5.	Industri kayu dan barang2 dari kayu (selain <i>furniture</i>)	30	7,4
6.	Industri karet & barang dari karet	29	7,2
7.	Industri pakaian jadi	21	5,2
8.	Industri gelas, porselen, asbes, barang galian bukan logam lain	20	5,0
9.	Industri pengolahan tembakau dan rokok	16	4,0
10.	Industri kulit dan barang dari kulit	10	2,5
11.	Industri lainnya	38	9,4
	Jumlah	403	100,0

Sumber: Diolah dari Pendataan Potensi Usaha Sektor Industri Kabupaten Pasuruan, BPS dan Bappeda, Tahun 2005.

2.1.5.1. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Khusus mengenai industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang menjadi obyek penelitian ini yang menggunakan air bawah tanah sebagai bahan baku utamanya banyak tersebar di Kecamatan: Pandaan, Prigen, Sukorejo dan Purwosari (lihat Tabel 2.1.12). Bahan baku pembuatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) seluruhnya sudah dapat dipenuhi dari wilayah Kabupaten Pasuruan, karena mutu air bawah tanah wilayah kecamatan tersebut memenuhi standar baku untuk diproses oleh perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Jumlah perusahaan AMDK yang terdapat

di beberapa kecamatan Kabupaten Pasuruan seluruhnya berjumlah 19 perusahaan seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 2.1.12.
Persebaran Industri AMDK
di Kabupaten Pasuruan

No.	Kecamatan	Nama Perusahaan	Lokasi	Jumlah Tempat Pemboran	Debit Air
1.	Kec. Beji	-	-	-	-
2.	Kec. Kejayan	-	-	-	-
3.	Kec. Pohjentrek	-	-	-	-
4.	Kec. Sukorejo	PT Sariguna Primatirta	Desa Ngadimulyo	1	350 M ³ /hari
		PT Aneka Tirta S.	Desa Lemahbang	1	300 M ³ /hari
5.	Kec. Purwosari	PT Phamarga Indo Jatim	Desa Sengonagung	4	5L/detik atau 18.000 M ³ /hr
6.	Kec. Pandaan	UD Sari Rejeki	Jl. Raya Candra	1	400 M ³ /hari
		PT Airkyndo Bali	Desa Sumberejo	1	200 M ³ /hari
		CV Welirang Tirta Mandiri	Desa Karangjati	1	120 M ³ /hari
		PT Artotoyo Utomo	Desa Sumber gedang	2	400 M ³ /hari
		PT Tirta Investama	Desa Tawangrejo	4	-
		PT Tirta Investama	Desa Karangjati	3	3.868 M ³ /hari

Bab II – Profil Daerah Penelitian

7.	Kec. Gempol	PT Tirta Mas Megah	Desa Sumpersuko	2	650 M ³ /hari
		CV Tirta Marta	Desa Sumpersuko	1	150 M ³ /hari
		PT Harum Manis	Desa Sumpersuko	1	200 M ³ /hari
		PT Gunung Arta Manunggal	Desa Bulusari	1	216 M ³ /hari
8.	Kec. Prigen	Archid	Desa Gambiran	1	150 M ³ /hari
		PT Raja Air Alami	Desa Candiwates	1	150 M ³ /hari
		UD Asian Food & Beverage	Kelurahan Prigen	1	45 M ³ /hari
		Villa	Desa Dayurejo	Sumber Mata Air	5L/detik atau 18.000M ³ /hari
9.	Kec. Purwodadi	-	-	-	-
10.	Kec. Rembang	Kopontren "Sidogiri"	Desa Pekoren	Sumber Mata Air	200 M ³ /hari
11.	Kec. Rejoso	-	-	-	-
12.	Kec. Grati	-	-	-	-
13.	Kec. Kraton	-	-	-	-
14.	Kec. Tukur	-	-	-	-
15.	Kec. Gondangwetan	PT Tirta Investama	Desa Keboncandi	1	60L/detik atau 216.000 M ³ /hr
16.	Kec Nguling	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perijinan Investasi dan Penanaman Modal dan Bapedalda Kabupaten Pasuruan, 2005.

2.2. Profil Daerah Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak di antara 6 derajat 57' Lintang Selatan dan 106 derajat 49' sampai 107 derajat 00' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah seperti berikut :

- Bagian Utara - Kabupaten Bogor
- Bagian Timur - Kabupaten Cianjur
- Bagian Selatan - Samudera Indonesia
- Bagian Barat - Kabupaten Lebak dan Samudera Indonesia

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa, dengan luas daerah sebesar 4.128 km² atau 14.39% dari luas Jawa Barat atau 3,01% dari luas pulau Jawa. Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi 3 bagian yaitu: daerah pegunungan (dengan ketinggian berkisar antara 0–2.960 m), dataran rendah dan pantai. Dengan adanya daerah pantai dan gunung-gunung, antara lain Gunung Salak dan Gunung Gede, menyebabkan sebagian daerah Sukabumi berdiri di atas lereng-lereng yang mempunyai kemiringan di atas 35⁰ (meliputi 29 persen dari luas Kabupaten Sukabumi), 13-35⁰ (meliputi 37 persen), 2-13⁰ (meliputi 21 persen dari luas kabupaten) dan sisanya sebesar 13 persen dari luas kabupaten merupakan daerah datar. Topografinya yang ditandai oleh bukit-bukit dan gunung-gunung dengan lereng yang curam dan terdapat di mana-mana, menyebabkan wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi rawan terhadap longsor, erosi tanah.

Secara umum Daerah Kabupaten Sukabumi beriklim tropis dengan curah hujan cukup banyak; memiliki suhu udara berkisar 19,6⁰ – 31,2⁰ dengan suhu rata-rata 24⁰C. Dilhat dari kesuburan tanah dan iklimnya, maka wilayah bagian utara lebih subur dibanding wilayah bagian selatan.

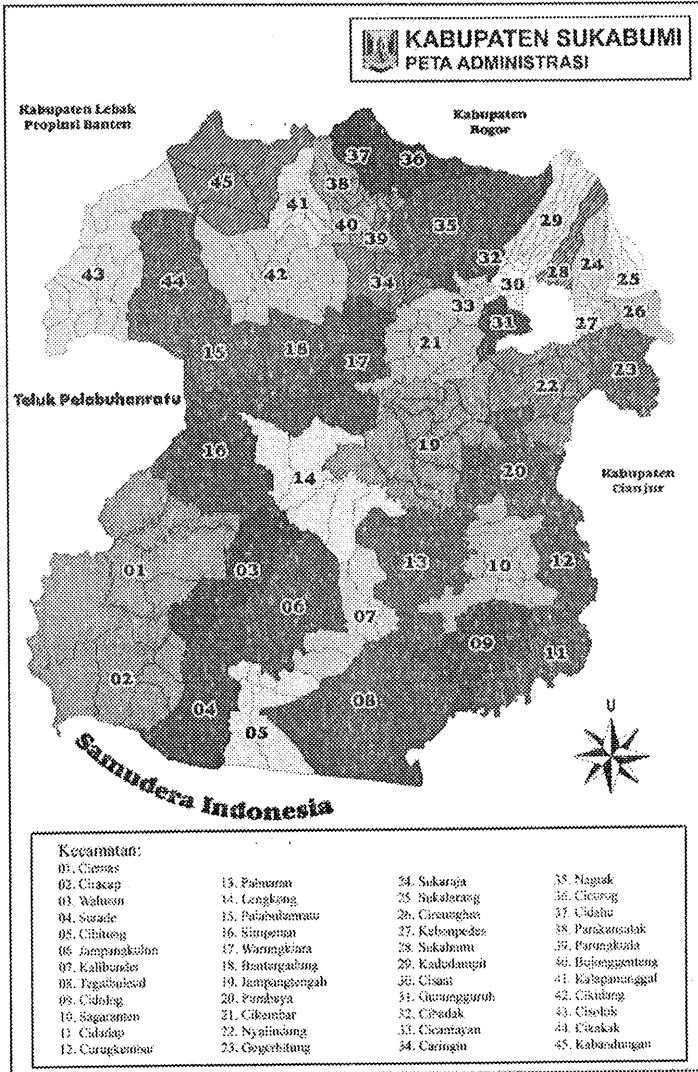
Bila diamati dari potensi sumber daya air, ternyata Kabupaten Sukabumi memiliki cukup banyak sumber daya air. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya aliran sungai yang ada di kabupaten ini seperti Sungai Cimandiri dan anak-anak sungainya, Cipelang, Cilatih, Citarik, Cibodas dan Cidadap. Selain itu terdapat pula Sungai Ciletuh, Cikarang, Cikaso dan Cibuni yang merupakan batas dengan daerah Kabupaten Cianjur di sebelah Timur. Sumber-sumber air tersebut banyak digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Melimpahnya

sumber-sumber air tersebut menyebabkan menjamurnya industri air mineral maupun industri minuman lainnya di Kabupaten Sukabumi.

Ditinjau dari potensi geologisnya, Kabupaten Sukabumi memiliki antara lain : sumber panas bumi di daerah Gunung Salak dan Cisolok, bahan tambang dan bahan galian emas, perak, batu-bara, pasir, kwarsa, marmer, pasir besi, bentonit, teras, batu gamping, dan tanah liat. Dari potensi yang ada tersebut yang telah dikembangkan dalam kegiatan usaha di bidang penggalian masih terbatas pada kegiatan-kegiatan pertambangan rakyat, seperti pasir, kwarsa, kapur, batu-batuan dan tanah liat. Dengan banyaknya potensi bahan galian tersebut juga mendorong banyaknya usaha kerajinan batu perhiasan dan batu hias pajangan, baik yang sudah dibentuk -- dipoles maupun yang masih dalam bentuk aslinya yang banyak diminati oleh konsumen kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan konsumen dari mancanegara.¹⁰

¹⁰ Batu hias pajangan adalah batu kwarsa yang mempunyai bentuk alami maupun yang dibentuk sesuai kehendak pengrajin. Besarnya ada yang mencapai dua meter dengan diameter cukup lebar, dapat dibeli dengan ukuran berat per kg berkisar antara @ Rp. 5000,- s/d Rp. 50.000,-, tergantung dari jenis batu kwarsanya. Semakin baik jenis batunya, misalnya amethyst (kecubung) dan semakin halus penggarapannya, maka batu hias itupun akan semakin tinggi harganya

Gambar 2.2.1.
Gambar 3: Peta Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat



Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, Tahun 2004.

Secara administratif wilayah Kabupaten Sukabumi terbagi atas : 45 (empat puluh lima) Wilayah Kecamatan; 3 (tiga) Wilayah Kelurahan, 340 (tiga ratus empat puluh) Wilayah Desa, 2.996 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Rukun Warga dan 11.499 (sebelas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) Rukun Tetangga. Berdasarkan kategori wilayahnya, Kabupaten Sukabumi terdiri dari 62 Desa berkategori perkotaan dan 281 Desa berkategori pedesaan. Saat ini ibukota Kabupaten Sukabumi berada di Kecamatan Pelabuhanratu, meskipun sebagian kantor pemerintahan masih ada yang berdomisili di Kecamatan Cisaat. Untuk mengetahui persebaran wilayah administratifnya lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1.
Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, RW dan RT
Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	RW	RT
1.	Ciomas	-	7	68	294
2.	Ciracap	-	6	82	356
3.	Waluran	-	4	19	165
4.	Surade	-	11	97	375
5.	Cibitung	-	6	21	136
6.	Jampang Kulon	-	15	98	361
7.	Kalibunder	-	6	46	125
8.	Tegalbuleud	-	7	49	203
9.	Cidolog	-	5	39	120
10.	Sagaranten	-	11	62	257
11.	Cidadap	-	4	18	117
12.	Curug Kembar	-	4	46	159
13.	Pabuaran	-	6	30	178
14.	Lengkong	-	5	47	156
15.	Pelabuhanratu	-	7	109	399
16.	Simpenan	-	6	59	240
17.	Warungkiara	-	7	91	306
18.	Bantargadung	-	5	46	171

Bab II – Profil Daerah Penelitian

19.	Jampang Tengah	-	11	86	394
20.	Purabaya	-	7	46	224
21.	Cikembar	-	9	96	403
22.	Nyalindung	-	10	72	279
23.	Gegerbitung	-	7	55	185
24.	Sukaraja	-	9	105	386
25.	Sukalarang	-	6	49	201
26.	Cireunghas	-	5	50	177
27.	Kebonpedes	-	5	42	151
28.	Sukabumi	-	5	49	164
29.	Kadudampit	-	9	67	269
30.	Cisaat	-	13	134	492
31.	Gunung Guruh	-	6	87	300
32.	Cibadak	1	9	130	468
33.	Cicantayan	-	6	58	259
34.	Caringin	-	8	60	185
35.	Nagrak	-	14	154	556
36.	Cicurug	1	12	89	379
37.	Cidahu	-	8	49	213
38.	Parakansalak	-	6	47	169
39.	Parungkuda	-	8	70	228
40.	Bojonggenteng	-	5	28	116
41.	Kalapanunggal	-	7	58	188
42.	Cikidang	-	11	84	302
43.	Cisolok	-	10	97	334
44.	Cikakak	-	7	56	203
45.	Kabandungan	-	5	51	156
Jumlah		3	340	2.996	11.499

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2004.

2.2.1. Kependudukan

Berdasarkan data statistik akhir Desember 2004, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi mencapai 2.230.411 jiwa yang terdiri dari : laki-laki 1.144.663 jiwa dan perempuan 1.085.748 jiwa (lihat Tabel 2); dengan rasio jenis kelamin sebesar 105,43 yang berarti

bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Dilihat dari persebarannya, konsentrasi jumlah penduduk berada di Kecamatan Cisaat di mana jumlahnya sebesar 108.065 jiwa atau 4,85 % dari total penduduk Kabupaten Sukabumi. Kecamatan lainnya yang juga memiliki penduduk dengan jumlah besar, berkisar antara 76.019 jiwa sampai dengan 106.868 jiwa secara berturut-turut adalah: Kecamatan Nagrak, Cicurug, Cibadak, Pelabuhanratu dan Sukaraja. Sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Cidolog (18.401 jiwa) atau sebesar 0,82% dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Sukabumi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2.
Jumlah Penduduk per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Ciemas	24.997	23.458	48.455
2.	Ciracap	24.105	22.789	46.894
3.	Waluran	12.772	11.891	24.663
4.	Surade	34.198	32.787	66.985
5.	Cibitung	12.227	11.800	24.027
6.	Jampang Kulon	31.483	30.335	61.818
7.	Kalibunder	14.224	13.288	27.512
8.	Tegalbuleud	17.141	16.155	33.296
9.	Cidolog	9.229	9.172	18.401
10.	Sagaranten	24.987	23.689	48.676
11.	Cidadap	9.916	9.422	19.338
12.	Curug Kembar	15.837	14.847	30.684
13.	Pabuaran	20.094	18.802	38.896
14.	Lengkong	14.427	14.010	28.437
15.	Pelabuhanratu	46.045	43.411	89.456
16.	Simpenan	24.819	23.206	48.025

Bab II – Profil Daerah Penelitian

17.	Warungkiara	27.732	26.437	54.169
18.	Bantargadung	18.781	17.214	35.995
19.	Jampang Tengah	32.462	31.381	63.843
20.	Purabaya	20.710	19.637	40.347
21.	Cikembar	36.647	34.575	71.222
22.	Nyalindung	24.276	22.999	47.275
23.	Gegerbitung	18.657	18.126	36.783
24.	Sukaraja	38.969	37.050	76.019
25.	Sukalarang	19.405	18.276	37.321
26.	Cireunghas	15.742	15.070	30.812
27.	Kebonpedes	13.404	13.072	26.476
28.	Sukabumi	20.043	19.019	39.062
29.	Kadudampit	24.863	23.347	48.210
30.	Cisaat	54.968	53.097	108.065
31.	Gunung Guruh	23.636	22.176	45.812
32.	Cibadak	49.171	46.631	95.802
33.	Cicantayan	26.211	24.977	51.188
34.	Caringin	21.755	20.410	42.165
35.	Nagrak	54.807	52.061	106.868
36.	Cicurug	54.957	51.581	106.538
37.	Cidahu	28.316	26.668	54.984
38.	Parakansalak	18.456	17.736	36.192
39.	Parungkuda	29.218	27.612	56.830
40.	Bojonggenten g	17.097	15.808	32.905
41.	Kalapanunggal	21.118	20.357	41.475
42.	Cikidang	28.784	26.935	55.719
43.	Cisolok	31.130	29.227	60.357
44.	Cikakak	18.713	17.431	36.144
45.	Kabandungan	18.494	17.776	36.270
J u m l a h		1.144.663	1.085.748	2.230.411

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2004.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sukabumi adalah sebesar 540,31 jiwa/km². Kecamatan Cisaat selain memiliki jumlah penduduk

terbanyak, ternyata juga merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya, yaitu sebesar 5.307,06 jiwa/km². Begitu pula halnya dengan Kecamatan Cicurug, proporsional dengan jumlah penduduk yang ada di kecamatan ini, kepadatan penduduknya merupakan yang terpadat ketiga setelah Kecamatan Sukalarang. Sementara itu, kendati jumlah penduduk Kecamatan Nagrak mendekati jumlah penduduk Kecamatan Cicurug, namun kepadatannya sangat jauh berbeda, yaitu hanya 838,49 jiwa/km², atau di bawah kepadatan penduduk Kecamatan Cicurug 2.297,27 jiwa/km². Berbeda dengan itu, di kecamatan Cidahu kendati jumlah penduduknya setengah dari jumlah penduduk di Kecamatan Nagrak, tetapi kepadatan penduduknya mencapai 1.885,01 jiwa/km². Hal ini disebabkan luas wilayah Kecamatan Cidahu sangat kecil, yaitu 29,17 km², sedangkan jumlah penduduknya 54.984 jiwa.

Kecamatan lainnya, yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi setelah Cisaat, Sukalarang, Cicurug dan Cidahu adalah Kecamatan Sukaraja (1.810,41 jiwa/km²), Kecamatan Parungkuda (1.885,56 jiwa/km²) dan Kecamatan Sukabumi (1.634,75 jiwa/km²). Sementara tingkat kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Cibitung (159,95 jiwa/ km²). Untuk melihat pesebaran kepadatan penduduk (jiwa/km²) di seluruh kecamatan Kabupaten Sukabumi dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2.2.3.

Tabel 2.2.3.
Kepadatan Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Ciomas	266,96	48.455	181,51
2.	Ciracap	160,56	46.894	292,06
3.	Waluran	61,80	24.663	399,07
4.	Surade	133,93	66.985	500,15
5.	Cibitung	150,22	24.027	159,95
6.	Jampang Kulon	154,88	61.818	399,13
7.	Kalibunder	77,87	27.512	353,32

Bab II – Profil Daerah Penelitian

8.	Tegalbuleud	150,54	33.296	221,17
9.	Cidolog	69,82	18.401	263,54
10.	Sagaranten	122,05	48.676	398,83
11.	Cidadap	66,94	19.338	288,89
12.	Curug Kembar	54,08	30.684	567,40
13.	Pabuaran	108,78	38.896	357,56
14.	Lengkong	14,03	28.437	198,81
15.	Pelabuhanratu	102,88	89.456	869,53
16.	Simpenan	169,22	48.025	283,80
17.	Warungkiara	92,98	54.169	582,59
18.	Bantargadung	82,17	35.995	438,04
19.	Jampang Tengah	253,09	63.843	252,25
20.	Purabaya	93,82	40.347	430,06
21.	Cikembar	86,52	71.222	823,20
22.	Nyalindung	104,42	47.275	452,74
23.	Gegerbitung	54,97	36.783	669,15
24.	Sukaraja	41,99	76.019	1.810,41
25.	Sukalarang	22,04	37.321	3.606,49
26.	Cireunghas	28,62	30.812	1.076,59
27.	Kebonpedes	10,35	26.476	1.201,33
28.	Sukabumi	23,89	39.062	1.634,75
29.	Kadudampit	54,20	48.210	889,46
30.	Cisaat	21,45	108.065	5.037,06
31.	Gunung Guruh	22,85	45.812	2.004,81
32.	Cibadak	62,89	95.802	1.523,26
33.	Cicantayan	38,43	51.188	1.332,13
34.	Caringin	23,20	42.165	1.817,85
35.	Nagrak	127,45	106.868	838,49
36.	Cicurug	46,38	106.538	2.297,27
37.	Cidahu	29,17	54.984	1.885,01
38.	Parakansalak	64,27	36.192	563,15
39.	Parungkuda	31,83	56.830	1.785,56
40.	Bojonggenteng	26,57	32.905	1.238,58
41.	Kalapanunggal	75,01	41.475	552,90
42.	Cikidang	192,10	55.719	290,05
43.	Cisolok	160,58	60.357	375,88
44.	Cikakak	116,44	36.144	310,40
45.	Kabandungan	146,75	36.270	247,15
	Jumlah	4.128,00	2.230.411	540,31

Sumber: Kabupaten Sukabumi Dalam Angka Tahun 2004.

2.2.2. Pendidikan

Dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, di antaranya dengan menekan angka siswa putus sekolah (*Drop Out/ DO*). Namun demikian pada tahun ajaran 2004/2005 jumlah siswa yang putus sekolah masih relatif besar, yaitu : umur 7 – 12 tahun berjumlah 4.391 orang dan umur 13 – 15 tahun berjumlah 7.592 orang.

Seiring dengan upaya itu, dalam rangka untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas di Kabupaten Sukabumi pembangunan sekolah-sekolah baru juga dilaksanakan. Oleh karena itu jumlah sekolah SD, SLTP dan SLTA atau sederajat pada tahun ajaran 2004/2005 mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Begitu pula dengan jumlah murid dan guru juga mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang telah dirangkum mengenai jumlah SD, SMP, SMU dan SMK, baik Negeri maupun Swasta, perkembangan pendidikan di Kabupaten berikut jumlah murid dan gurunya dapat ditampilkan dalam beberapa tabel berikut.

Tabel 2.2.4.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD dan SLTP
di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	SD			SLTP		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1.	Ciemas	35	5.587	210	2	13	22
2.	Ciracap	30	5.731	331	2	27	49
3.	Waluran	16	3.090	171	1	9	11
4.	Surade	45	7.622	585	2	30	54
5.	Cibitung	19	2.552	197	1	10	32
6.	Jampang Kulon	43	7.275	602	4	30	88
7.	Kalibunder	25	3.234	260	2	13	28
8.	Tegalbuleud	25	3.147	223	1	11	19
9.	Cidolog	9	1.296	121	1	5	15

Bab II – Profil Daerah Penelitian

10.	Sagaranten	25	3.990	308	1	13	25
11.	Cidadap	12	1.523	123	1	6	12
12.	Curug Kembar	17	2.109	174	1	9	13
13.	Pabuaran	23	4.068	247	2	15	37
14.	Lengkong	18	3.204	190	2	23	34
15.	Pelabuhanratu	35	10.444	515	4	49	94
16.	Simpenan	33	5.716	322	3	22	43
17.	Warungkiara	30	5.820	343	3	29	68
18.	Bantargadung	28	5.038	255	2	12	40
19.	Jampang Tengah	43	6.881	472	3	27	58
20.	Purabaya	23	4.063	259	1	9	22
21.	Cikembar	41	7.942	734	5	65	100
22.	Nyalindung	20	4.930	341	2	20	33
23.	Gegerbitung	25	4.788	324	3	22	82
24.	Sukaraja	28	7.900	539	4	40	112
25.	Sukalarang	17	4.975	299	3	27	71
26.	Cireunghas	14	3.054	211	2	4	56
27.	Kebonpedes	13	2.613	230	2	15	50
28.	Sukabumi	17	4.174	372	4	20	60
29.	Kadudampit	16	4.192	315	3	24	68
30.	Cisaat	40	10.788	798	6	56	177
31.	Gunung Guruh	20	5.047	363	3	23	76
32.	Cibadak	46	12.678	806	10	86	192
33.	Cicantayan	20	5.452	324	3	15	44
34.	Caringin	18	4.271	264	3	15	50
35.	Nagrak	52	13.237	722	8	52	168
36.	Cicurug	36	12.092	626	9	51	192
37.	Cidahu	21	6.771	261	4	24	90
38.	Parakansalak	15	4.260	229	2	16	41
39.	Parungkuda	23	6.804	370	5	39	128
40.	Bojonggenteng	12	3.523	163	2	15	35
41.	Kalapanunggal	20	5.152	258	3	27	67
42.	Cikidang	36	7.869	345	3	25	49
43.	Cisolok	42	7.890	470	4	29	83
44.	Cikakak	22	3.667	202	1	6	23
45.	Kabandungan	22	5.188	217	2	13	31
	Jumlah	1.179	251.781	15.796	135	45.644	2.832

Sumber: Diolah dari Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, Tahun 2004.

Tabel 2.2.5.
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SLTA dan SMK
di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	S L T A			S M K		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1.	Ciemas				-	-	-
2.	Ciracap	1	540	28	-	-	-
3.	Waluran	-	-	-	-	-	-
4.	Surade	1	359	23	-	-	-
5.	Cibitung	-	-	-	-	-	-
6.	Jampang Kulon	2	1.097	67	2	257	37
7.	Kalibunder	-	-	-	-	-	-
8.	Tegalbuleud	-	-	-	-	-	-
9.	Cidolog	-	-	-	-	-	-
10.	Sagaranten	1	493	23	1	110	18
11.	Cidadap	-	-	-	-	-	-
12.	Curug Kembar	-	-	-	-	-	-
13.	Pabuaran	-	-	-	-	-	-
14.	Lengkong	1	175	15	-	-	-
15.	Pelabuhanratu	2	870	71	4	1.242	102
16.	Simpenan	2	393	38	-	-	-
17.	Warungkiara	1	353	24	-	-	-
18.	Bantargadung	-	-	-	-	-	-
19.	Jampang Tengah	1	371	21	-	-	-
20.	Purabaya	-	-	-	1	85	18
21.	Cikembar	1	856	39	1	37	19
22.	Nyalindung	1	164	20	-	-	-
23.	Gegerbitung	-	-	-	2	61	37
24.	Sukaraja	1	828	40	-	-	-
25.	Sukalarang	1	155	21	-	-	-

Bab II – Profil Daerah Penelitian

26.	Cireunghas	-	-	-	1	104	13
27.	Kebonpedes	-	-	-	-	-	-
28.	Sukabumi	1	84	14	-	-	-
29.	Kadudampit	1	93	8	3	332	48
30.	Cisaat	4	840	130	4	2.383	123
31.	Gunung Guruh	1	738	48	-	-	-
32.	Cibadak	4	1.725	126	4	1.296	119
33.	Cicantayan	1	72	10	1	122	20
34.	Caringin	1	94	25	-	-	-
35.	Nagrak	1	298	19	-	-	-
36.	Cicurug	7	1.544	141	3	1.186	70
37.	Cidahu	1	84	17	-	-	-
38.	Parakansalak	1	62	17	1	231	20
39.	Parungkuda	3	819	62	3	515	47
40.	Bojonggenteng	2	266	37	1	-	14
41.	Kalapanunggal	1	89	20	1	178	17
42.	Cikidang	1	254	17	-	-	-
43.	Cisolok	1	440	26	1	182	26
44.	Cikakak	-	-	-	-	-	-
45.	Kabandungan	1	3	14	-	-	-
Jumlah		48	14.231	1.169	34	9.334	748

Sumber: Diolah dari Kabupaten Sukabumi Dalam Angka, Tahun 2004.

2.2.3. Ketenagakerjaan

Tabel 2.2.6.
Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Sukabumi

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum Tamat SD	-	-	-
2.	Tamat SD	66	173	239
3.	Tamat SLTP	229	655	884
4.	Tamat SLTA	1.811	1.727	3.538
5.	Tamat Akademi D3	278	427	705
6.	Sarjana	176	197	373
Jumlah		2.560	3.179	5.739

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Tahun 2004.

Berdasarkan data statistik jumlah pencari kerja di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2004 yang terdiri dari 2.560 laki-laki dan 3.179 perempuan, ternyata yang memperoleh penempatan lapangan kerja hanya sejumlah 901 orang atau 15% dari total seluruh pencari kerja,. Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penempatan kerja berdasarkan jenis kelamin tidak dapat diketahui karena adanya keterbatasan penyajian data dari sumber (BPS Kabupaten Sukabumi) yang diperoleh. Yang terungkap hanya sebatas pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan dengan mayoritas berpendidikan SLTP sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.2.7.
Jumlah Pencari Kerja yang memperoleh Penempatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Sukabumi

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Tamat SD	-
2.	Tamat SD	-
3.	Tamat SLTP	688
4.	Tamat SLTA	201
5.	Tamat Akademi D3	8
6.	Sarjana	4
J u m l a h		901

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Tahun 2004.

2.2.4. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

2.2.4.1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah secara kuantitatif bisa digambarkan dengan besarnya distribusi persentase nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap nilai total PDRB atas dasar harga berlaku. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB. Secara persentase semakin besar suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Oleh karenanya dengan melihat perkembangan suatu sektor akan kurang tepat tanpa memperhatikan peranan sektor tersebut dalam PDRB. Jadi persentase ini dapat dianggap sebagai penimbang apabila kita ingin melihat perkembangan sektoral secara teliti. Sebagai contoh, apabila peranan sektor pertanian masih cukup besar maka kenaikan yang relatif kecil di sektor ini dari tahun ke tahun akan cukup besar pengaruhnya terhadap situasi ekonomi suatu daerah. Sebaliknya apabila sektor tersebut turun sedikit saja maka akan

dirasakan oleh semua kegiatan dan dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.2.8.
Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 dan 2004 (Dalam Persen)

No.	Sektor	2003	2004
1.	Pertanian	38,00	36,35
2.	Pertambangan dan pengalihan	5,08	4,93
3.	Industri Pengolahan	16,87	16,38
4.	Listrik, gas dan air bersih	1,22	1,42
5.	Bangunan	2,30	3,21
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	15,53	16,02
7.	Pengangkutan dan komunikasi	5,67	6,81
8.	Keu.,persewaan dan jasa perh	3,54	3,62
9.	Jasa-jasa	11,79	11,27
	Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi, 2000-2004, BPS 2005.

Sektor pertanian masih mempunyai peranan/ sumbangan yang terbesar dalam perekonomian Kabupaten Sukabumi. Pada tahun 1999 sektor ini masih mempunyai peranan di atas 40 persen lalu pada tahun 2000 menjadi 38,05 persen dan pada tahun 2001 menjadi 37,60 persen. Sedangkan untuk tahun 2002 berada pada angka 37,78 persen dan tahun 2003 sebesar 37,92 persen dan tahun 2004 menjadi 36,35%. Meskipun demikian tampak bahwa peranannya mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan walaupun sedikit.

Kemudian bila ditelaah lebih lanjut maka di sektor pertanian ini dari tahun ke tahun masih didominasi oleh sub sektor Pertanian Tanaman Pangan yang memiliki peranan sebesar 23,78 persen pada tahun 2000 dan relatif turun menjadi 23,18 persen pada tahun 2001, pada tahun 2002 sebesar 21,02 persen dan menurun lagi pada tahun 2003 menjadi sebesar 19,98 persen dan tahun 2004 menjadi 18,98 persen.

Selain sektor Pertanian yang mengalami penurunan peranan terhadap PDRB dari tahun ke tahun adalah sektor pertambangan dan penggalian, walaupun penurunannya sedikit demi sedikit. Dilain pihak sektor bangunan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi memperlihatkan kenaikan peranan/ sumbangannya terhadap perekonomian di Kabupaten Sukabumi. Adapun ditinjau dari peran masing-masing sektor ternyata ada empat sektor yang peranannya kurang dari lima persen yaitu sektor listrik, gas dan air minum; sektor bangunan dan kontruksi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor pertambangan dan penggalian.

Sektor industri pengolahan merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertanian di Kabupaten Sukabumi. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh. Yang pada saatnya nanti akan menjadi landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri. Secara lebih rinci peranan sektor lainnya dapat dilihat dalam Tabel 2.2.8.

Perusahaan industri formal untuk industri aneka dan elektronik yang tercatat di Kabupaten Sukabumi tahun 2004, yaitu 146 perusahaan dengan 19.162 tenaga kerja, yang terbanyak adalah industri pakaian jadi dan tekstil berjumlah 57 perusahaan dan menyerap 12.111 tenaga kerja. Perusahaan industri formal untuk industri logam dan mesin tercatat berjumlah 157 perusahaan dengan 3.536 tenaga kerja, yang terbanyak adalah industri logam lainnya berjumlah 31 perusahaan dan 521 tenaga kerja.

Sedangkan perusahaan industri formal untuk industri hasil pertanian dan kehutanan tercatat sebanyak 488 perusahaan dengan 10.720 tenaga kerja, yang terbanyak adalah industri peti kemas dari kayu berjumlah 100 perusahaan dengan 1.552 tenaga kerja. Perusahaan industri formal untuk industri kimia dan bahan bangunan sebanyak 200 perusahaan dengan 5.464 tenaga kerja, dan yang terbanyak adalah industri genteng dari tanah liat dengan 39 perusahaan dan 693 tenaga kerja.

Hasil penggalian pada tahun 2003 di Kabupaten Sukabumi adalah antara lain : pasir beton, batu kapur, batu split, batu bronjol, marmer, kuarsa, tanah liat merah, tanah liat coklat, zeolite, bentolite, pasir besi, pasir pasang, tras, flspar, dan pasir batu. Produksi bahan galian terbanyak adalah kuarsa sebanyak 152.529 ton, kemudian tanah liat merah sebanyak 104.962 ton.

2.2.4.2. PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari Nilai Tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Total dari Nilai Tambah tersebut dapat dilihat dari Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku untuk Kabupaten Sukabumi secara umum meningkat dari 5,6 trilyun rupiah pada tahun 2001 menjadi 8,27 trilyun serta pada tahun 2004 menjadi 9,19 trilyun rupiah. Demikian pula Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 1993 secara umum dari tahun 2000 sampai dengan 2004 mengalami kenaikan yaitu bila pada tahun 2000 PDRBnya sebesar 2,25 trilyun rupiah, maka pada tahun 2001 meningkat menjadi sebesar 2,39 trilyun rupiah, kemudian pada tahun 2002 menjadi sebesar 2,53 trilyun rupiah dan terus naik menjadi 2,66 trilyun rupiah pada tahun 2003, dan terakhir tahun 2004 meningkat menjadi 2,82 trilyun rupiah. Peningkatan PDRB tersebut memperlihatkan bahwa tingkat perekonomian Kabupaten Sukabumi terus membaik. Secara lebih rinci per sektor perubahan PDRB tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.9.

Tabel 2.2.9.
Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004
Kabupaten Sukabumi

No.	Sektor	Kabupaten Sukabumi	
		Nilai Nominal (Juta Rp.)	Kenaikan (%)
1.	Pertanian	3.342.354,25	6,42
2.	Pertambangan dan Penggalian	453.460,47	7,94
3.	Industri Pengolahan	1.505.879,22	7,99
4.	Listrik Gas dan air Bersih	130.620,10	29,19
5.	Bangunan	295.613,84	55,45
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.472.768,61	14,71
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	625.969,01	33,55
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	332.428,98	13,72
9.	Jasa-jasa	1.035.911,67	6,3
Jumlah		9.195.006,15	11,24

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi, 2000-2004, BPS 2005.

Dari Tabel 2.2.9. dapat dilihat bahwa sektor Bangunan mengalami kenaikan yang terbesar yaitu sebesar 55,45%, disusul sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu masing-masing sebesar 33,55%, 29,19% dan 14,71%. Sedangkan sektor yang terkecil kenaikannya adalah sektor Jasa-jasa dan Pertanian sebesar 6,30% dan 6,42%. Sektor Bangunan mengalami kenaikan yang cukup berarti mengindikasikan meningkatnya pembangunan dan perbaikan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Secara umum PDRB menurut harga berlaku tahun 2004 mengalami kenaikan 11,24 persen dari tahun 2003.

2.2.4.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan adalah salah satu indikator pendekatan ekonomi suatu daerah. Indikator yang menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut dan laju pertumbuhan tersebut dikenal dengan sebutan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Sebagaimana tampak pada Tabel 2.2.10., dengan menggunakan tahun dasar 1993 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi pada tahun 2004 adalah sebesar 5,95 persen dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang LPEnya baru mencapai 5,19 persen.

Tabel 2.2.10.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sukabumi per Sektor Tahun 2003-2004 (Dalam Persen)

No.	Sektor	2003	2004
1.	Pertanian	4,96	2,67
2.	Pertambangan & Penggalian	3,10	3,24
3.	Industri Pengolahan	5,12	3,72
4.	Listrik, Gas & Air Minum	26,63	19,39
5.	Bangunan/Konstruksi	53,13	43,49
6.	Perdag, Hotel & Restoran	2,26	6,97
7.	Pengangkutan & Komunikasi	4,51	19,08
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,34	8,53
9.	Jasa-Jasa	3,49	2,90
	Jumlah	5,19	5,95

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi, 2000-2004, BPS 2005.

Namun demikian LPE tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2001 yang mengalami kenaikan sebesar 6,49 persen yang kemudian melemah pada tahun 2002 dengan hanya mencapai sebesar 5,71 persen. Bahkan LPE Kabupaten Sukabumi tersebut semakin terlihat melemah pada tahun 2003 yaitu sebesar 5,19 persen. Baru pada tahun 2004 LPE tersebut meningkat lagi menjadi

5,95%. Dengan melihat fluktuasi LPE yang relatif stabil, mengindikasikan perekonomian di Kabupaten Sukabumi sudah mulai stabilnya sehingga tingkat laju pertumbuhan ekonominya pun relatif merata dan stabil.

2.2.4.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi suatu daerah, laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dirinci secara sektoral. Bila dirinci, LPE sektoral Kabupaten Sukabumi terlihat pada Tabel 2.2.11.

Tabel 2.2.11.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukabumi Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor Tahun 2000-2004 (Dalam Persen)

No.	Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	Rata-Rata
1.	Pertanian	3,95	8,51	7,9	4,96	2,67	5,60
2.	Pertambangan & Penggalian	5,97	3,79	1,67	3,1	3,24	3,55
3.	Industri Pengolahan	97,93	7,33	8,29	5,12	3,72	24,48
4.	Listrik, Gas & Air Minum	17,51	14,17	5,12	26,63	19,39	16,56
5.	Bangunan / Kontruksi	7,63	10,62	11,01	53,13	43,49	25,18
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	2,17	3,92	2,55	2,26	6,97	3,39
7.	Pengangkutan & Komunikasi	4,38	6,81	4,54	4,51	19,08	7,86
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,44	5,81	3,27	5,34	8,53	5,28
9.	Jasa-Jasa	2,44	5,08	3,22	3,49	2,9	3,43
PDRB		12,49	6,49	5,71	5,19	5,95	7,17

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukabumi, 2000-2004, BPS 2005.

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara rata-rata nilai LPE Kabupaten Sukabumi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 sebesar 7,17 persen. Pada tahun 1999 nilai LPE Kabupaten Sukabumi baru mencapai sebesar 1,64 persen dan kemudian naik menjadi 12,49 persen pada tahun 2000 yang menandai mulai membaiknya perekonomian di Kabupaten Sukabumi setelah mengalami puncak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Tahun 2001-2004 LPEnya mulai konstan dengan kisaran 6%.

Bila laju pertumbuhan ekonomi tersebut dilihat menurut sektor, maka sektor sektor bangunan/konstruksi, pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang cenderung mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara sektor lainnya masih mengalami naik turun.

2.2.5. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Khusus mengenai industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Besar – Sedang di Kabupaten Sukabumi berkembang cukup banyak. Perkembangan ini terjadi antara lain karena air bawah tanah yang merupakan bahan baku utama proses pembuatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) seluruhnya sudah dapat dipenuhi dari wilayah Kabupaten Sukabumi. Mutu air bawah tanah wilayah Kabupaten Sukabumi terkenal baik dan memenuhi syarat untuk air baku industri AMDK. Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ini banyak tersebar di Kecamatan: Cidahu, Cicurug, Cikakak, Parungkuda, Parakansalak, Kadudampit, Nagrak dan Purbaya (lihat Tabel 2.2.12.). Pada umumnya perusahaan AMDK terpusat di sekitar Kecamatan Cidahu dan Cicurug. Jumlah perusahaan AMDK yang terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi seluruhnya berjumlah 42 perusahaan sebagaimana tampak pada tabel di bawah.

Tabel 2.2.12.
Persebaran Industri AMDK di Kabupaten Sukabumi

No.	Kecamatan	Nama Perusahaan	Lokasi	Jumlah Tempat Pemboran/ mata air	Debit Air
1	Kec. Cicurug	PT. Aqua Golden Missisipi	Desa Mekarsari	1 sumur bor	150 M ³ /hari
2	Kec. Cidahu PT. Aqua Golden Missisipi		Desa Babakanpari	1 mata air	5,00 ltr/dtk
			Desa Babakanpari	2 mata air	864 M ³ /hari
			Desa Babakanpari	3 mata air	864 M ³ /hari
			Desa Babakanpari	4 mata air	70 ltr/dtk
3	Kec. Cidahu	PT. Baksomas Sugiharto	Desa Pondok Kaso Tengah	-	Tdk ada data
4	Kec. Cidahu	PT. Tribanyan Tirta	Desa Babakanpari	-	Tdk ada data
5	Kec. Cidahu	PT. Tirta Food Aritama	Desa Pasirdoton	1 mata air	Tdk ada data
6	Kec. Cidahu	PT. Cisolada Jaya Tirta	Desa Jayabakti	1 mata air	475 M ³ /hari
7	Kec. Cidahu	PT. Alaminas Sejahtera	Desa Pondok Kaso Tengah	-	Tdk ada data
8	Kec. Cidahu	PT. Aflah Agrinner	Desa Jayabakti	-	Tdk ada data
9	Kec. Cidahu	PT. Sinar Teknik Jaya Les	Desa Pondok Kaso Tengah	-	Tdk ada data
10	Kec. Cidahu	PT. Indotirta Sejuk Abadi	Desa Cidahu	-	Tdk ada data
11	Kec. Cidahu	PT. Tang Mas	Desa Jayabakti	-	Tdk ada data
12	Kec. Cidahu	PT. Tiga Raksa Satria/ Air	Desa Pasirdoton	-	Tdk ada data
13	Kec. Cidahu	PT. Tirta Investama	Desa Babakanpari	-	300 M ³ /hari
14	Kec. Cidahu	PT. Pranida Mulya Utama	Desa Babakanpari	-	Tdk ada data
15	Kec. Cidahu	PT. Ades Waters Indonesia	Desa Pondok Kaso Tengah	1 mata air	4320 M ³ /hari
16	Kec. Cidahu	PT. Subur Tirta Sejuk	Desa Pondok Kaso Tengah	1 mata air	500 M ³ /bln
17	Kec. Cidahu	PT. Tri Banyan Tirta	Desa Babakanpari	1 mata air	86,4 M ³ /hari
18	Kec. Cikakak	PT. Melody Lestari Madam	Desa Babakanpari	-	Tdk ada data
19	Kec. Cicurug	PT. Tirta Purbalingga	Desa Pasawahan	-	Tdk ada data
20	Kec. Cicurug	PT. Agrawira Tirta Mitra	Desa Babakanpari	-	10 ltr/ dtk

Bab II – Profil Daerah Penelitian

21	Kec. Cicurug	PT. Air Gunung Salak	Desa Tenjolaya	1 mata air	Tdk ada data
22	Kec. Cicurug	PT. Kendi Pusaka	Desa Cicurug	-	85 M ³ /hari
23	Kec. Cicurug	PT. Royal Food & Beverage M ³	Desa Kutajaya	-	-
24	Kec. Cicurug	PT. Equilindo Asri	Desa Pasawahan	1 mata air	70 M ³ /hari
25	Kec. Cicurug PT. Tirta Mas Megah		Desa Nyangkowek	1 sumur bor	150 M ³ /hari
			Desa Nyangkowek	2 sumur bor	180 M ³ /hari
			Desa Nyangkowek	3 sumur bor	120 M ³ /hari
26	Kec. Cicurug	PT. Triusaha Mitraraharja	Desa Ciambar Nagrak	1 mata air	86,4 M ³ /hari
27	Kec. Cicurug	PT. Ega Tirta Chalista	Desa Caringin Cicurug	-	Tdk ada data
28	Kec. Cicurug	PT. Ades Waters Indonesia	Desa Benda	-	Tdk ada data
29	Kec. Kadudampit	Kapontren Al-Tijaroh	Desa Citamiang	-	Tdk ada data
30	Kec. Nagrak	PT. Tri Usaha Mitra Raharja	Desa Ciambar	-	Tdk ada data
31	Kec. Parakansalak	PT. MQ Jernih	Desa Parakansalak	-	Tdk ada data
32	Kec. Parakansalak	PT. Catur Surya Gemilang	Desa Sukatani	-	Tdk ada data
33	Kec. Parakansalak	PT.. Dimas Sejahtera	Desa Parakansalak	-	Tdk ada data
34	Kec. Parungkuda	PT.. Annisa Risan Utama	Desa Parungkuda	-	Tdk ada data
35	Kec. Parungkuda	PT.. Giri Salak Indah	Desa Pondok Kaso La	-	Tdk ada data
36	Kec. Parungkuda	PT.. Wiratistama	Desa Kompa	-	Tdk ada data
37	Kec. Parungkuda	PT.. Natural Mutu Utama	Desa Parungkuda	-	Tdk ada data
38	Kec. Parungkuda	PT.. Pasadena Cipta Persada	Desa Sundawenang	-	3 ltr/dtk
39	Kec. Parungkuda	PT. Platinum Start Internasional	Desa Parungkuda	-	-
40	Kec. Parungkuda	PT. Zehat International	Desa Pondok Kasoten	-	-
41	Kec. Cibadak	PT.. Mitra Even Natori	Desa Cibadak	-	-
42	Kec. Purbaya	CV Akbar	Desa Neglasari	-	-

Sumber: Diolah dari Disperindag Kabupaten Sukabumi 2005 dan Distambem Kabupaten Sukabumi 2005.

BAB III

TEMUAN LAPANGAN COMMUNITY DEVELOPMENT PERUSAHAAN AMDK

3.1. Kabupaten Pasuruan

3.1.1. Pemberdayaan Makro Kabupaten Pasuruan

Kebijakan yang digariskan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat (*community development*) adalah pemberdayaan secara partisipatif, baik itu pemberdayaan ekonomi maupun pemberdayaan potensi lainnya yang ada di lingkungan industri. Model partisipatif itu dilakukan dengan cara memantapkan keberadaan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di masing-masing desa. Secara lebih spesifik adalah dengan memberdayakan lembaga yang dulu dikenal dengan akronim LKMD yang kemudian dengan munculnya undang-undang yang baru tentang pemerintahan daerah dirubah menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan harus ada di tiap-tiap desa.

Dikaitkan dengan kebijakan Bupati sekarang, pemberdayaan yang dilakukan konsentrasinya diarahkan kepada peningkatan SDM maupun kemasyarakatan. Secara lebih spesifik prioritas kebijakan Bupati diarahkan pada penduduk-penduduk miskin, terutama yang menyangkut peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Dalam tataran perencanaan kebijakan, Bupati Pasuruan menetapkan lima prioritas pembangunan yang sebagian berada di ranah sosial budaya. Kelima prioritas pembangunan tersebut meliputi, *pertama* adalah pendidikan, yang *kedua* adalah kesehatan, yang *ketiga* pembinaan usaha kecil menengah, kemudian yang *keempat* usaha pertanian, dan yang *kelima* industri.

Pembangunan dalam bidang pendidikan, sebagai contoh, pihak pemerintah daerah menyusun suatu sistem informasi sumberdaya pendidikan dengan mengembangkan *School Map* dengan memanfaatkan dana APBN yang disalurkan melalui Departemen Pendidikan, khususnya untuk dana non fisik. Melalui *school map* ini antara lain dapat diketahui berapa jumlah lembaga pendidikan yang ada di Pasuruan itu, bagaimana kondisi bangunan, bagaimana kondisi sarana dan prasarana itu.

Dalam *grand strategy* Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, pemberdayaan masyarakat dijadikan salah satu aspeknya. Dari kelima prioritas pembangunan seperti telah dikatakan terdahulu, *community development* (CD) terutama diletakkan di dalam usaha ekonomi. Masalah *community development* perlu diperhatikan karena dengan berkembangnya industri yang relatif besar yang cukup pesat di Pasuruan mau tidak mau membawa pengaruh terhadap kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Dengan adanya industri ini banyak pendatang baru di daerah ini, terutama untuk tenaga kerja dan sebagainya. Namun demikian berkembangnya industri di Pasuruan belahan barat, membawa konsekuensi terjadinya perbedaan yang sangat signifikan antara masyarakat di belahan timur dan belahan barat. Cara berpikir dan lain sebagainya dari masyarakat di kawasan barat otomatis sudah mulai berubah, tidak kolot seperti yang di daerah timur. Implikasinya dalam penataan tentang kehidupan dan lain sebagainya pun lebih mudah di bagian belahan barat daripada belahan timur, karena pemahamannya lebih mudah atau cepat.

3.1.1.1. Perencanaan *Community Development*

Adapun sistem atau mekanisme perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut dikembangkan dengan cara berjenjang. Dalam upaya membuat perencanaan pemberdayaan masyarakat tersebut, Pemda Pasuruan menggunakan pendekatan *bottom up* melalui jalur Musrenbang. Di tingkat desa, perencanaan dibuat dengan menyerap aspirasi yang muncul dari masyarakat atau

kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari lapisan terbawah yakni RT, RW, dan dusun. Setelah dibuat perencanaan di tingkat dusun kemudian disusun di tingkat desa melalui forum Musbangdes. Pada tahap ini usulan-usulan yang telah dijaring secara aspiratif kemudian dibuat skala prioritas di mana yang sangat dibutuhkan menurut esensi kebutuhan masyarakat diurutkan pertama, dan disebut super prioritas. Selanjutnya usulan-usulan tersebut dibawa ke tingkat kecamatan untuk dikerucutkan lagi. Di sini setiap usulan dari masing-masing desa diseleksi secara lebih selektif sehingga apa yang di prioritaskan di tingkat desa belum tentu menjadi prioritas kecamatan. Selanjutnya di kecamatan disusun lagi dengan tim teknis yang terdiri dari dinas teknis yang meliputi dua belas dinas. Baru kemudian dikemas lagi dalam satu usulan dari kecamatan untuk dibawa ke Musrenbang kabupaten yang namanya Rakorbang Tingkat II. Di sini apa yang menjadi prioritas atau skala super prioritas kecamatan belum tentu juga tertampung di tingkat II. Sebagai contoh dari 150 program dalam 22 jenis proyek yang diajukan tahun 2005, hanya dua yang disetujui untuk dijalankan pada tahun 2006.

Persoalan yang dihadapi Kecamatan Purwosari, yang menjadi lokasi utama penelitian, dalam membuat perencanaan adalah kurangnya atensi dari tingkat kabupaten ketika melakukan Musrenbang kecamatan. Sebagai contoh, ketika dilakukan Musrenbang kecamatan yang baru lalu rencananya akan dihadiri oleh 12 instansi dari tingkat II yang, namun ternyata yang hadir dari tingkat II hanya diwakili oleh dua orang yakni dari Bapemas dan Bappeda, dan itupun yang mewakili hanya dari level staf, sementara dinas teknik lainnya tidak datang sehingga mereka tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi *audience*.

3.1.1.2. Implementasi *Community Development*

Dalam hal pemanfaatan sumberdaya lokal oleh masyarakat, selama ini belum ada inisiatif dari masyarakat umum. Kecenderungannya, pemanfaatan sumberdaya ini hanya dilakukan

oleh orang-orang yang mengerti saja. Kalaupun ada, kadang-kadang terhenti oleh berbagai kekhawatiran seperti bagaimana nanti ijinnya, bagaimana ijin dari kesehatannya, dan seterusnya. Untuk mengatasi hal tersebut pihak pemda (melalui PMD) mencoba memfasilitasi setiap produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Namun dalam mendorong kreatifitas dan memanfaatkan potensi lokal untuk pemberdayaan masyarakat tersebut, pihak kecamatan merasa masih menghadapi kendala di lapangan. Kecamatan sendiri berkeinginan untuk mengarahkan dan berupaya dengan segala cara untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu selalu diupayakan untuk banyak menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat, serta mengamati potensi apa yang dimiliki masyarakat. Sebagai contoh, karena masyarakat Kecamatan Purwosari banyak yang bergerak dalam bidang pertanian, maka pertanian ini menjadi fokus perhatian untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Dalam implementasinya seperti yang dilakukan di Desa Sumberejo, karena tempatnya di ujung-puncak, maka daerah itu dianggap potensial untuk mengembangkan suatu produksi pertanian di desa yang betul-betul alami dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia. Capaiannya sekarang desa tersebut menjadi maskot Kabupaten Pasuruan untuk desa kawasan pertanian organik.

Selama ini sumber pendanaan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat diambil dari APBD. Sementara sumber pendanaan dari luar APBD belum dikembangkan. Ekspektasi untuk mengembangkan sumber pendanaan dari luar APBD sudah ada, yakni dengan menghimbau pihak pelaku ekonomi atau tokoh masyarakat yang memiliki hubungan dengan mereka di luar kecamatan atau Kabupaten Pasuruan untuk menarik investor agar menanamkan investasinya ke kecamatan ini. Upaya lain yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan mengembangkan potensi yang dimiliki para pemuda yaitu dengan cara mengirimkan pemuda yang potensial ke Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini dilakukan dalam rangka membekali mereka, khususnya untuk mengembangkan usaha

kerajinan tangan, agar mampu berkompetisi dalam mengisi lapangan kerja di luar daerah dan agar mereka lebih bisa mandiri menciptakan lapangan kerja sendiri. Namun demikian dalam hal pelatihan ini pada kenyataannya pemerintah kabupaten belum berupaya untuk mensinergikan baik dalam hal pendanaan maupun pelatihannya dengan sektor swasta atau dunia industri. Padahal daerah ini potensial untuk mengikutsertakan partisipasi perusahaan industri yang ada dalam upaya pemberdayaan masyarakat, baik melalui desa, melalui bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan sebagainya.

Dalam konteks implementasi program pemberdayaan masyarakat, Kabupaten Pasuruan mengikuti P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dianggarkan oleh Bank Dunia bekerja sama dengan Dinas PU Cipta Karya. Sejauh ini Kabupaten Pasuruan sudah melaksanakan P2KP I tahap I tahun 2001, dan P2KP I tahap II tahun 2004. Selain program P2KP, Pemkab Pasuruan juga menjalankan program Propinsi Jawa Timur yang disebut dengan program Gerdutasi (Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan).

Selain itu pemberdayaan sosial budaya juga dilakukan melalui pembangunan fisik dengan memanfaatkan sistem informasi yang terkait dengan *school map* tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2005 Pemda Pasuruan mengalokasikan dana pembangunan untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana pendidikan dan juga melaksanakan kegiatan pembangunan fisik yang diperintahkan melalui *Building School Map*.

Pemerintah daerah maupun beberapa perusahaan industri besar telah berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat. Namun sayangnya dalam melakukan *community development* tersebut pemerintah daerah belum memiliki *grand strategy* pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk mensinergikan ataupun mengatur bagaimana pola hubungan antara masyarakat industri dengan masyarakat dan dengan pemerintah daerah dalam hal ini

Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). *Grand strategy* dan *policy* yang dibangun baru terbatas dalam bidang pendidikan.

Pihak pemda menyadari bahwa ada kendala dalam upaya mempengaruhi para pengusaha agar berpartisipasi dalam melakukan *community development*. Kendala ini terjadi karena tidak adanya hubungan langsung antara pihak PMD yang berkompeten memberdayakan masyarakat desa dengan para pengusaha. Untuk mengatasi kendala tersebut penyampaian himbauan untuk berpartisipasi dari pemda (PMD) dilakukan kepada asosiasi-asosiasi pengusaha melalui pendekatan tidak resmi (non-formal) agar anggotanya yang berdomisili di suatu tempat tertentu untuk ikut berperan aktif.

Sementara itu strategi dengan menggunakan *school mapping* tampaknya juga belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Di samping itu masyarakat masih merasakan bahwa mekanisme pengajuan bantuan kepada pemda pun masih dirasakan terlalu berbelit dan tidak seimbang dengan bantuan yang diberikan. Selama ini dirasakan oleh masyarakat ada bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial. Persoalannya, masyarakat merasakan bahwa proses pengajuan bantuan tersebut seringkali merepotkan karena proses yang harus ditempuh dirasakan terlalu birokratis. Sementara itu nilai bantuan yang diperoleh seringkali dirasakan jauh di bawah harapan ataupun proposal yang mereka ajukan. Mereka seringkali merasa terbentur dengan berbagai keterangan prosedural yang bagi mereka orang desa umumnya menginginkan proses yang sangat sederhana.

3.1.2. PT. Ades Waters Indonesia, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kab. Pasuruan, Jatim

3.1.2.1. Profil Perusahaan

PT. Pamargha Indo Jatim adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Air Minum Dalam Kemasan yang didirikan berdasarkan Akta No.16 tanggal 15 September 1987. Pada awal

berdirinya, pemodal PT. Pamargha Indo Jatim adalah PT. Ometraco. Dalam perkembangannya, sejak tanggal 19 November 1993, saham PT. Pamargha Indo Jatim dimiliki oleh PT. Ades Alfindo Putra Setia. Dengan demikian PT. Pamargha Indo Jatim merupakan anak perusahaan dari PT. Ades Alfindo Putra Setia. Kemudian sejak Desember 2000 bergabung dengan Coca Cola Company dan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2004, Coca Cola Company & Nestle membeli 100% saham PT. Ades Alfindo Putra Setia, sehingga terjadi perubahan nama menjadi PT. Ades Waters Indonesia Tbk.

PT. Ades Waters Indonesia mempunyai pabrik yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 59, Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan mempunyai kapasitas produksi 60.000 M³ per tahun. Sedangkan bahan baku untuk *plant* tersebut diambil dari sumber air di lokasi pabrik Sengonagung dengan kedalaman 100 meter dari permukaan tanah.

Proses pengolahan Air Minum Dalam Kemasan perusahaan ini menggunakan teknologi ozonosasi, filtrasi dan ultra violet. Untuk sterilisasi air dengan teknologi Perancis dan teknologi pengisian dari Amerika, Italia. Perusahaan ini dilengkapi dengan sarana laboratorium yang telah memenuhi persyaratan Teknis Industri dan Perdagangan Air Minum Dalam Kemasan sesuai dengan SNI 01-3554-1994 tentang Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan. Dalam periode tertentu Perusahaan ini selalu melakukan pengujian silang pada SUCOFINDO agar dapat memperoleh pengujian yang lebih baik.

Jenis produk Air Minum Dalam Kemasan yang dihasilkan adalah kemasan: 600 ml AdeS, 240 ml AdeS, 240 ml McD, 240 ml Vica, 5 Gallon AdeS dan 5 Gallon Vica. Perusahaan ini melayani kebutuhan AMDK dari perusahaan-perusahaan wara laba seperti Mc D, khusus produk 240 ml dengan *brand* perusahaan yang bersangkutan.

Perusahaan ini didukung oleh tenaga-tenaga sarjana dan teknisi yang ahli di bidangnya masing-masing. Menyadari akan pentingnya sumberdaya manusia untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan perusahaan ini, maka dilakukan pengembangan sumberdaya dengan jalan mengadakan pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal.

3.1.2.2. Kondisi Internal PT. Ades

PT. Ades berdiri di Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sejak tahun 1987 tapi pada waktu itu belum berproduksi di sini, karena pusatnya masih beroperasi di Surabaya. Yang dilakukan di desa ini hanya untuk pengambilan airnya saja yang kemudian dibawa dengan truk tangki ke Surabaya. Jadi proses produksinya dilakukan di Surabaya, sementara di sini hanya untuk penyediaan air bakunya saja. Proses produksi baru mulai dilakukan di sini pada periode awal tahun 1990an.

Seperti telah dikemukakan terdahulu, pada tahun 2000 merek Ades dibeli oleh Coca Cola, kemudian mulai 2004 PT. Ades dibeli oleh Coca Cola secara *joint venture* dengan Nestle. Namun operasionalisasi PT. Ades sekarang ini lebih dikuasai oleh PT. Nestle, karena meskipun Nestle baru masuk pada tahun 2004 akan tetapi menjadi pemegang saham mayoritas. Implikasinya produk yang dihasilkan pun akan mengalami perubahan, mengikuti standar Nestle.

Dengan adanya perubahan komposisi kepemilikan tersebut, para karyawan merasakan manajemen sekarang semakin baik dengan diterapkannya disiplin yang lebih ketat, sehingga produktivitasnya meningkat terus. Manajemen sekarang ini dirasakan oleh karyawannya lebih baik karena manajemennya lebih terbuka, kemudian penilaiannya juga terbuka karena produktifitas dan faktor-faktor lain semuanya dinilai. Demikian pula kondisi kesejahteraan karyawan pun semakin membaik, kendati dapat dikatakan tidak ada

jenjang karir, khususnya untuk karyawan kelas buruh, seperti karyawan bagian produksi.

3.1.2.3. Ketenagakerjaan

Pada saat awal pendiriannya, tenaga kerja yang menjadi perintis PT. Ades berasal dari Surabaya. Namun dalam perkembangannya, karena pengambilan airnya membutuhkan banyak tambahan tenaga kerja -- mengingat hanya berapa orang saja yang dibawa dari Surabaya seperti bagian sekuriti dan bagian yang mengurus kantornya, maka dibuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang mau melamar kerja.

Jumlah karyawan di perusahaan ini 245 orang yang terdiri dari 204 karyawan laki-laki dan 41 (18,45%) karyawan perempuan. Dari jumlah karyawan yang ada, mayoritas berasal dari Desa Sengonagung, Desa Pager dan Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari. Mayoritas karyawannya berpendidikan SLTA atau sederajat. Kelompok karyawan tersebut umumnya bekerja sebagai satpam, pengemudi, buruh dan pemegang pembukuan. Sedangkan pendidikan jajaran direksi seluruhnya adalah sarjana.

Tabel 3.1.1.
Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Ades Waters Indonesia
Desa Sengonagung, Kecamatan Purwosari
Kabupaten Pasuruan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Aliyah	7
2.	MTS	3
3.	SD	2
4.	SMP	59
5.	SMA	73
6.	SMK	6
7.	SMEA	20
8.	STM	55
9.	SPMA	1
10.	SPG	1
11.	Diploma (D3)	3
12.	Sarjana (S1)	15
Jumlah		245

Sumber : HRD PT. Ades Waters Indonesia Tbk., 2006.

Dilihat dari sisi lamanya bekerja di perusahaan, mayoritas karyawan (147 orang) telah bekerja antara 9-12 tahun, sedangkan 59 orang telah bekerja di perusahaan selama 6 tahun. Sedangkan 10 karyawan telah memiliki masa kerja di perusahaan antara 16-18 tahun dan sebagian kecil lainnya dari jumlah karyawan (29 orang) memiliki masa kerja 5 tahun ke bawah.

3.1.2.4. *Community Development* PT. Ades Waters Indonesia

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, pada waktu akan mendirikan perusahaan pihak Kecamatan Purwosari selalu meminta atau mengumumkan kepada pimpinan perusahaan agar supaya menampung atau mengutamakan tenaga kerja lokal atau penduduk di

daerah sekitar di mana perusahaan berlokasi, utamanya masyarakat di Purwosari atau Kabupaten Pasuruan. Permohonan berikutnya adalah harus ramah dengan lingkungan, termasuk juga penanaman seperti pemberian bibit tanaman yang mungkin dapat diberikan kepada desa atau mungkin penanaman di perusahaan itu sendiri sehingga perusahaan tidak kelihatan gersang dan tampak hijau, dan lain sebagainya dalam kaitannya dengan masalah penghijauan. Kemudian ramah lingkungan sosial, dalam arti ramah dengan lingkungan masyarakat ini sehingga ada partisipasinya terhadap masyarakat.

Mengenai keberadaan perusahaan AMDK secara umum, pihak pemma merasakan adanya manfaat yang bisa diperoleh bagi daerah karena bisa menyerap tenaga kerja atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Khusus untuk Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, keberadaan PT. Ades dirasakan sangat membantu karena dengan adanya PT. Ades ini bisa menyerap beberapa tenaga kerja yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan, tampaknya terjadi hubungan yang kurang harmonis antara PT. Ades dengan pihak Kecamatan Purwosari yang berakibat munculnya kesulitan dalam koordinasi. Sebagai contoh, mengenai angkatan kerja yang terserap di PT. Ades, pihak Kecamatan Purwosari mengaku tidak mengetahuinya dengan alasan bahwa pihak perusahaan selama ini tidak pernah melaporkan kepada kecamatan. Bahkan bila pihak kecamatan meminta data pun pihak perusahaan juga merahasiakan jumlah pekerja yang bekerja di perusahaannya. Sejauh ini data jumlah pekerja yang bekerja di perusahaan hanya ada di Disnaker. Selama ini Disnaker tidak memberitahu atau menginformasikan berapa jumlah pekerja yang ada di kecamatan. Padahal data ketenagakerjaan tersebut juga penting bagi kecamatan karena ketika terjadi perselisihan antara buruh dengan perusahaan maka penyelesaiannya melibatkan pula pihak kecamatan. Bila dilihat berdasarkan tupoksinya memang kecamatan tidak memiliki kewenangan untuk menangani tenaga kerja, karena sudah menjadi kewenangan Disnaker. Namun

seharusnya dalam hal pendataan bisa diatasi melalui kerjasama antara Kecamatan dengan Disnaker. Kurang baiknya koordinasi antara industri PT. Ades dengan kecamatan juga tampak ketika pihak kecamatan melakukan koordinasi dengan cara mengundang pimpinan perusahaan, misalnya untuk membahas kegiatan memperingati perayaan hari-hari besar di mana semua pihak harus berpartisipasi, maka yang hadir bukan merupakan pimpinan perusahaannya, melainkan hanya staf level bawah yang datang. Implikasinya, mereka pun tidak bisa memberikan suatu komitmen, keputusan ataupun memenuhi data yang diminta oleh kecamatan. Sejauh ini ketika oleh kecamatan diajak untuk berpartisipasi, PT. Ades memang ikut berpartisipasi, tetapi realisasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sementara itu dari sudut pandang PT. Ades, perusahaan ini merasa telah memberikan beberapa manfaat yang relatif besar bagi masyarakat sekitar seperti. Hal ini dibuktikan bahwa dari sisi ketenagakerjaan, hampir semua karyawan PT. Ades (sekitar 90%) direkrut dari orang sekitar lokasi perusahaan, sebagian besar penduduk Desa Sengonagung. Kemudian, perusahaan juga memberikan fasilitas air bersih kepada masyarakat sekitar dengan menyediakan pipa kran air yang dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan air bersih untuk keperluan rumah tangganya.

Menurut pihak perusahaan, ketika ada kegiatan keagamaan seperti perayaan Maulid Nabi atau ketika sekolah sedang mengadakan pesta kenaikan kelas, biasanya masyarakat meminta sumbangan bantuan air minum dalam kemasan kepada perusahaan. Atas permintaan ini, PT. Ades pun memberikan bantuan air minum yang diminta tersebut. Demikian juga bila misalnya masyarakat minta bantuan seperti ketika pembuatan jalan kampung, kegiatan remaja masjid, remaja di sekitar kampung, maka perusahaan pun memberikan bantuan. Namun umumnya bantuan tersebut bukan berupa uang melainkan dalam bentuk air minum produk perusahaan ini, karena permintaan bantuan yang diajukan masyarakat memang seperti itu. Selain memberi bantuan air minum kepada kecamatan,

kelurahan dan masyarakat umum, aparat keamanan seperti Koramil dan Polsek pun secara rutin bulanan mendapat bantuan air minum dalam kemasan galon sesuai dengan kebutuhan mereka. Di luar pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar pabrik, manajemen PT. Ades juga atas inisiatif sendiri memiliki kepedulian bila terjadi bencana alam yang menimpa masyarakat, seperti ketika ada bencana alam banjir di Jember beberapa waktu lalu, perusahaan ini memberikan bantuan baik berupa uang maupun berupa produk air minum dalam kemasan.

Dengan adanya aktifitas sosial seperti dikemukakan di atas, selama ini PT. Ades sudah merasa cukup memperhatikan lingkungannya. Hal tersebut dianggap memadai karena dilihatnya tidak ada unjuk rasa ataupun komplain dari masyarakat. Padahal mungkin tidak adanya gejolak yang besar dari masyarakat tersebut sebenarnya lebih dikarenakan oleh tidak adanya limbah produksi perusahaan ini yang mencemari lingkungan sekitar.

Di lain pihak, dari sisi masyarakat, meskipun bagi para karyawan PT. Ades pengambil-alihan oleh Nestle itu memperbaiki kondisi internal perusahaan, tidak demikian halnya yang dirasakan oleh masyarakat. Mengenai perhatian perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat, menurut informasi dari eks karyawan PT. Ades, dari dulu tidak ada kebijakan perusahaan atau alokasi anggaran khusus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan sumbangan katakanlah seperti untuk pembuatan jalan desa, atau jalan kampung, untuk membangun mushola atau pendidikan dari PT. Ades. Demikian pula, menurut pihak kecamatan, selama ini belum ada kompensasi yang diberikan dari PT. Ades kepada Kecamatan. Padahal, menurut pihak kecamatan dan pihak desa, pada masa sebelum diambil alih oleh Nestle mereka secara rutin diberi sumbangan oleh PT. Ades dalam bentuk minuman kemasan gelas sebanyak dua dus setiap bulan. Tapi sejak akhir tahun 2005 (sejak ada kerjasama antara Coca Cola dengan Nestle) bantuan tersebut sudah tidak ada lagi, baik kepada Kecamatan maupun kepada desa dan bahkan itu pun dilakukan tanpa

pemberitahuan. Menghadapi kondisi perubahan ini pihak kecamatan sudah berupaya dengan mengirimkan surat kepada PT. Ades mempertanyakan mengapa sekarang tidak lagi mendapat jatah bantuan air minum -- tetapi tidak mendapat jawaban dari perusahaan tersebut. Kecamatan dan atau desa pun tidak bersikukuh untuk meminta bantuan air minum tersebut, karena bantuan tersebut selama ini diberikan sukarela tanpa harus diminta oleh kecamatan dan atau desa. Hal ini terjadi, menurut pihak desa, semenjak ada pergantian pimpinan di perusahaan tersebut sehubungan dengan masuknya Coca Cola dan Nestle. Dalam konteks ini informan dari PT. Ades memberikan bantahan dengan menyatakan bahwa tidak ada perubahan antara manajemen PT. Ades yang lama, kemudian Coca Cola, dan terakhir Nestle dalam perlakuan-perlakuan pemberian bantuan terhadap aparat, termasuk aparat kecamatan dan desa, semuanya masih tetap berjalan seperti biasa. Tetapi realitanya bertentangan dengan penjelasan informan dari PT. Ades tersebut. Bantahan tersebut hanya mempertegas pembuktian bahwa ada ketidakterbukaan dari perusahaan tersebut dalam hubungannya dengan masyarakat dan aparat pemerintah lokal.

Dalam partisipasinya terhadap masyarakat setempat, selama ini diakui oleh responden bahwa PT. Ades pernah memberikan sumbangan pada penduduk sekitar. Dalam prosesnya, di tingkat masyarakat, permohonan bantuan yang diajukan kepada perusahaan bisa dilakukan langsung oleh pihak yang membutuhkan kepada perusahaan. Misalnya ketika desa mengajukan proposal bantuan kepada perusahaan, maka tidak harus melalui Kecamatan. Demikian pula ketika masyarakat sekitar lingkungan perusahaan mengajukan proposal bantuan kepada perusahaan, tidak harus melalui desa. Meskipun biasanya ketika lingkungan masyarakat mengajukan proposal bantuan kepada perusahaan guna mengadakan kegiatan hari besar nasional seringkali minta persetujuan desa.

Sementara itu, di dalam kebijakan internal perusahaan prosesnya adalah, proposal permintaan bantuan dari masyarakat lokal diterima oleh bagian *Human Resources* dan kemudian diteruskan

pada *Site Manager*. Terhadap permintaan masyarakat lokal untuk kegiatan yang bersifat keagamaan diproses dan diputuskan oleh *Site Manager*, karena *Site Manager* nya sendiri secara personal yang memberi bantuan dengan alasan untuk mempermudah proses dan mempercepat respons terhadap permintaan masyarakat. Hal ini dilakukan karena sekarang ini sejak dipegang oleh Nestle dengan *Site Manager* yang baru, perusahaan mengambil kebijakan tidak memberi bantuan untuk kegiatan yang bersifat keagamaan. Kebijakan ini diambil untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan yang bersifat SARA. Oleh karena itu untuk kegiatan semacam ini biasanya *Site Manager* memberi bantuan secara pribadi saja. Sementara untuk permintaan bantuan yang sifatnya *sponsorship*, prosedur pengajuan proposalnya harus langsung ke Surabaya, tidak bisa melalui *Site Plant Manager* di Purwosari, Pasuruan, karena sudah merupakan keputusan atau kebijaksanaan dari pusat. Bentuk sumbangan yang diminta masyarakat ataupun yang diberikan oleh perusahaan tersebut umumnya dalam bentuk produk air minum dalam kemasan.

Menurut responden tokoh masyarakat, bantuan lainnya yang diberikan oleh PT. Ades, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, sebagai kompensasi pada masyarakat adalah air bersih untuk kebutuhan rumah tangga. Dalam konteks ini perusahaan telah menyediakan satu kran air yang ditempatkan di luar pabrik di depan perusahaan yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar yang membutuhkan air. Namun demikian keberadaan kran untuk umum itu cenderung hanya diketahui oleh sebagian kecil warga saja yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi pabrik tersebut. Khususnya masyarakat kelurahan Sengonagung yang berdekatan dengan PT. Ades. Menurut masyarakat, kran itu pun kadang-kadang setelah jam empat sore airnya sudah mati.

Selain itu bantuan air bersih melalui kran tersebut, dulu pernah dibuat saluran air untuk memenuhi kebutuhan air bagi beberapa rumah yang berada di jalan raya dan terdekat dengan pabrik Ades. Tetapi setelah ada pergantian pimpinan, sejak awal tahun 2006

saluran air tersebut diputus dengan alasan biaya listriknya terlalu mahal.

Bentuk bantuan lainnya pernah diberikan perusahaan ketika membangun kantor Desa Sengonagung. Bantuan yang diberikan oleh PT. Ades tidak berupa uang melainkan berupa bahan bangunan yakni semen sebanyak 15 sak. Namun sayangnya tidak semua aparat desa mengetahui adanya bantuan ini. Yang mengetahui hanya kepala desanya saja. Sementara jajaran di bawahnya seperti Sekretaris Desa ataupun Kepala Urusan Pembangunan tidak mengetahuinya. Implikasinya mereka merasa bahwa perusahaan itu tidak berpartisipasi memberikan bantuan. Persepsi negatif semacam itu semakin menguat karena setelah ada pergantian pimpinan perusahaan, untuk mengajukan proposal bantuan semacam itu menjadi sulit. Dulu sebelum pergantian manajemen pun, proposal bantuan yang diajukan sulit untuk mendapat persetujuan dari perusahaan, tetapi masih diberi. Sekarang ini urusannya menjadi terlalu sulit. Selama ini bantuan paling besar diberikan PT. Ades kepada desa sebesar 400 ribu rupiah, tidak pernah mencapai jutaan rupiah.

Kesulitan semacam itu dirasakan pula oleh masyarakatnya. Bila masyarakat mengajukan proposal permintaan bantuan, proses pengajuannya pun dirasakan sangat birokratis dan memerlukan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk memperoleh jawaban. Padahal kadang-kadang tidak ada realisasinya, atau kalau pun ada jumlahnya sangat kecil, tidak sesuai dengan manfaat yang dapat diambil dari mereka. Padahal, menurut RT setempat, masyarakat meminta bantuan hanya ketika mengadakan kegiatan tujuh belas agustus saja. Itu pun bantuan yang diterimanya hanya dalam bentuk air minum. Pernah dimintakan bantuan dalam bentuk uang, tetapi perusahaan tersebut hanya memberi air minum dan menyuruh air minum dalam kemasan tersebut dijual dulu supaya menjadi uang. Oleh karena itu mereka pun sekarang ini tidak pernah lagi mengajukan permintaan bantuan kepada PT. Ades.

Mengenai pandangan masyarakat terhadap PT. Ades, sekarang ini cenderung tidak peduli, tidak banyak permintaan ataupun harapan-harapan terhadap bantuan perusahaan tersebut.

Kondisi ini justru dipersepsikan oleh PT. Ades bahwa selama ini dirasakan tidak banyak permintaan yang muncul dari masyarakat. Perusahaan ini menginterpretasikan bahwa selama beroperasi dirasakan tidak ada persoalan yang muncul dari masyarakat karena tidak ada tuntutan apa-apa. Yang diminta masyarakat dianggapnya hanya sebatas fasilitas air bersih saja. Padahal masyarakat sendiri mepersepsikannya secara negatif, bahwa perusahaan yang bersangkutan tidak responsif terhadap permintaan masyarakat sehingga mereka merasa bosan untuk meminta bantuan lagi karena sering tidak mendapat respons positif dari perusahaan.

Dari sudut pandang *community development*, deskripsi di atas memperlihatkan bahwa sejauh ini relatif tidak ada kegiatan perusahaan yang ditujukan untuk membantu memberdayakan baik lingkungan, kepentingan daerah, atau pun masyarakat umum. Selain dirasakan minimnya partisipasi PT. Ades terhadap kepentingan sosial ekonomi masyarakat, dalam pengelolaan lingkungan pun sepengetahuan masyarakat tidak ada, misalnya program penghijauan, yang dilakukan oleh PT. Ades. Belum ada kegiatan perusahaan seperti misalnya pelatihan untuk menjadi distributor, agen, atau pedagang produk Ades. Perusahaan belum memiliki niat untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat umum. Perusahaan Ades tidak pernah memberi bantuan seperti beasiswa atau pendidikan bagi anak-anak dari masyarakat lokal. Sementara ini prioritas pengembangan masih diorientasikan pada pengembangan internal perusahaan. Dari sisi pendanaan pun perusahaan ini tidak memiliki dana khusus untuk bisa mendukung kegiatan yang ditujukan untuk membina masyarakat, dana kompensasi, ataupun untuk mengatasi bila terjadi suatu gejala masyarakat di sekitarnya. Bahkan untuk sumbangan-sumbangan guna mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pun sekarang ini bertambah sulit. Dalam kaitannya dengan lingkungan luar perusahaan, PT. Ades menjalankan program SHE (*Safety, Health, and*

Environment). Namun kegiatan ini baru saja diadopsi sehingga kegiatannya masih terfokus pada konsolidasi dan pelatihan internal perusahaan, seperti contohnya kalau dulu untuk limbah poliklinik yang merupakan sampah berbahaya seperti jarum suntik itu dibuang seandainya, tapi dalam waktu setahun ini limbah poliklinik tersebut dibuang ke Rumah Sakit Bangil.

Meskipun tidak banyak bantuan dari PT. Ades yang diberikan kepada dan dirasakan oleh masyarakat, secara umum tidak ada keresahan yang besar terhadap sikap-sikap dari perusahaan yang tidak banyak membantu masyarakat tersebut. Hal ini karena masyarakat menyadari bahwa ada keterbatasan hak dalam mengajukan komplain, mengingat tidak adanya limbah pencemaran yang diakibatkan dari pengolahan air minum dalam kemasan tersebut.

Selain karena hampir tidak adanya pencemaran, tidak adanya gejala ataupun keresahan yang muncul di pihak masyarakat atas sikap PT. Ades yang berkontribusi sangat minimal terhadap lingkungannya, juga terjadi karena lokasi pabrik tersebut terletak di pinggir jalan utama dan berdiri di daerah pesawahan yang jauh dari pemukiman penduduk, sehingga tidak bersentuhan dengan kepentingan lain dari masyarakat lokal. Seperti telah dikatakan di atas, walaupun ada gangguan, hanya masalah kebisingan suara yang terjadi di malam hari. Meskipun sekarang ini sudah ada pemukiman penduduk yang lokasinya relatif dekat dengan pabrik PT. Ades, namun secara historis PT. Ades sudah lebih dulu berlokasi di situ, sehingga penduduk pemukiman tersebut sejak awal sudah menerima kondisinya. Apalagi penduduk pemukiman tersebut hampir seluruhnya merupakan penduduk pendatang dari luar sehingga cenderung tidak mau tahu terhadap lingkungannya.

3.2. Kabupaten Sukabumi

3.2.1. Pemberdayaan Makro Kabupaten Sukabumi

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat (*community development*) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sudah membuat konsepnya dalam Renstrada. Tetapi dalam kebijakannya yang terpenting adalah implementasinya harus memberdayakan masyarakat. Kebijakan tersebut digarisbawahi karena, Menurut wakil bupati, selama ini konsep-konsepnya bagus tapi tidak pernah berhasil di lapangan karena sumberdayanya belum ada. Oleh karena itu, sekarang sedang dilakukan pembenahan terhadap sumberdaya internal Pemda agar ketika pimpinan memberikan konsep mereka dapat mencernanya dengan tidak lagi terlalu sulit.

Secara organisasional, dalam kelembagaan pemerintah daerah terdapat lembaga yang secara khusus menangani pemberdayaan, yakni Badan Pemberdayaan Desa (Bapemdes). Namun dalam operasional kegiatannya lembaga ini terfokus pada upaya memberdayakan kelembagaan pemerintah desa. Oleh karena itu badan ini tidak pernah berinisiatif untuk berkoordinasi dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak lainnya, khususnya yang ada di lingkup perusahaan AMDK. Sementara ini koordinasi dengan perusahaan dilakukan oleh dinas teknis terkait seperti Disnaker, Disperindag, Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan sebagainya. Sejauh ini yang dilakukan oleh Bapemdes adalah pemberdayaan swadaya masyarakat dalam gotong royong. Dalam hal ini Bapemdes memberikan pembekalan mengenai apa sebenarnya kelembagaan itu dan apa tugas fungsinya, bagaimana cara mengorganisasikan kelembagaan di masyarakat desa. Dengan demikian diharapkan mereka mengerti tentang kelembagaan dan betul-betul mengerti akan tugas mereka. Bapemdes berupaya memberdayakan masyarakat melalui penguatan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di desa karena merekalah yang membuat perencanaan, atau usulan program desa. Jadi dalam konteks ini Bapemdes lebih berperan sebagai mediator antara

pemerintahan desa dengan Pemda dan atau menjadi fasilitator dari apa yang disampaikan dari desa kepada Pemerintah Daerah. Bapemdes hanya mengajukan saja usulan dari desa kepada Pemda dan menyalurkan anggaran baik dari APBD maupun anggaran bantuan lain dari pusat dan bantuan-bantuan dari propinsi. Namun demikian dalam konteks perencanaan program Bapemdes juga membuat perencanaan program tersendiri yang didasarkan pada pengamatan dan penyerapan aspirasi masyarakat desa secara langsung. Tentu saja dalam kerangka menjalankan tupoksinya sehingga nuansanya menjadi sangat normatif saja yakni membuat anggaran dan program serta mendistribusikannya. Oleh karena itu upaya pemberdayaan yang dilakukan Bapemdes tidak pernah melakukan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung ataupun mencari peluang untuk melakukan kemitraan dengan pihak pengusaha swasta atau BUMN dalam melakukan pemberdayaan masyarakatnya. Sebenarnya disadari oleh pimpinan pemda sekarang bahwa potensi untuk dilakukan kerjasama dengan perusahaan swasta, khususnya AMDK, yang relatif besar. Persoalannya justru ada pada tingkat pelaksanaan di pemerintahan daerah karena tidak mempunyai inisiatif, kreativitas, dan komitmen yang memadai.

3.2.1.1. Perencanaan *Community Development*

Dalam sistem perencanaan program pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berjenjang yang diawali dengan Musrenbangdus. Jadi mulai dari tingkat Dusun dimintakan usulan-usulannya mengenai rencana kebutuhan-kebutuhan masyarakat setiap tahun. Hasil dari Musrenbangdus tersebut kemudian dibawa ke Musrenbangdes, untuk dibahas secara lebih menyeluruh di tingkat desa. Selanjutnya, usulan yang muncul dari desa tersebut di bawa ke musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan yang disebut Rakorbang tingkat kecamatan. Di sini dilakukan sinkronisasi dengan misi kecamatan untuk menyeleksi semua usulan yang diusulkan desa dan menentukan mana yang kira-

kira harus dibiayai oleh APBD seperti perbaikan jalan-jalan kabupaten, rehabilitasi jalan-jalan kabupaten, sekolah-sekolah dan yang kira-kira didanai melalui ADD (alokasi dana desa) atau program lain dari pemerintah. Setelah dibahas di dalam rapat Rakorbang Kecamatan, hasilnya dibawa ke dalam rapat koordinasi pembangunan di tingkat Kabupaten yang diselenggarakan setiap tahun. Pada tahap ini memang tidak akan seluruh usulan dapat terlaksana atau terealisasi. Beberapa usulan masyarakat sangat mungkin terabaikan karena harus disesuaikan dengan banyaknya kebutuhan dan besarnya kemampuan pembiayaan Kabupaten.

3.2.1.2. Implementasi *Community Development*

Dalam upaya mendorong implementasi *community development* perusahaan, dalam pemberian ijin operasi perusahaan pihak Pemda Kabupaten Sukabumi memberi persyaratan bahwa dalam rekrutmen pegawai harus memperhatikan tenaga kerja lokal, tetapi ketika dia kekurangan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan perusahaan dia diijinkan untuk menarik tenaga kerja dari luar. Jadi tidak ada aturan bahwa yang mengatur bahwa PT. Aqua yang berlokasi di Cicurug hanya menampung orang dari sekitar perusahaan. Realitanya di Cicurug sekarang ini sudah mulai merekrut tenaga kerja dari Jawa.

Pada tataran implementasi program kecamatan, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan hanya menjalankan program pemerintah daerah baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun pemerintah daerah sendiri. Karena digulirkan dari sana, maka ada aturan-aturan yang harus diikuti. Namun tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul dari bawah.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, semua program yang datangnya dari atas, baik kabupaten maupun provinsi, implementasinya diarahkan untuk lebih memacu swadaya masyarakat, untuk lebih memacu rasa kegotongroyongan yang pada

pada saat ini sudah mulai menurun. Artinya bantuan yang di berikan oleh pihak pemerintah lebih berupa stimulan. Karena kalau pun untuk kegiatan pembangunan harus seluruhnya diberikan oleh pemerintah, maka dana yang diberikan pemerintah tidak akan mencukupi. Oleh karena itu tentunya harus dibantu oleh swadaya dari masyarakat setempat, karena pembangunan tersebut memang untuk kebutuhan mereka. Dalam hal ini pembinaan oleh pihak Kecamatan hanya sampai pada lembaga desa, tidak ke masyarakat langsung. Sementara yang berperan menggerakkan masyarakatnya untuk lebih memberdayakan masyarakat dalam upaya meningkatkan gotong royong dan swadaya masyarakat tersebut adalah Kepala Desa, di bawah bimbingan pihak kecamatan.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat belum ada gagasan dari kecamatan untuk menjajagi kemungkinan pendanaan dari pihak industri yang ada di Kecamatan Cicurug. Sementara ini dari pihak desa ada upaya ke arah sana dengan mengupayakan menyerap dana dari setiap kegiatan industri yang ada di sini namun tidak jalan karena biasanya dana yang diberikan tidak optimal.

3.2.2. PT. Aqua Golden Missisipi, Desa Mekar Sari, Kecamatan Cicurug, Kab. Sukabumi, Jabar

3.2.2.1. Kondisi Internal PT. Aqua

Pabrik pertama PT. Aqua di Kabupaten Sukabumi berdiri pada tahun 1994. Dalam perkembangannya hingga sekarang sudah menjadi empat pabrik. Dalam mengeksploitasi air bawah tanah dari Kabupaten Sukabumi ini, perusahaan tidak hanya menggunakannya untuk air baku produksi bagi pabrik Aqua yang ada di Kabupaten Sukabumi saja, melainkan juga diambil/dibawa untuk digunakan sebagai air baku untuk produksi bagi pabrik yang ada di Bekasi, Citeureup, dan Bogor. Oleh karena itu bagi Kabupaten Sukabumi, sumber air bawah tanahnya oleh PT. Aqua tidak hanya digunakan

untuk AMDK melainkan juga untuk AMDT (air minum dalam tangki) yang dibawa oleh perusahaan ke Bogor dan Bekasi.

Selama ini PT. Aqua yang memiliki visi *Sustainable Aqua* (Aqua Lestari), telah memiliki unit *Cooperate Social Responsibility* (CSR) yang bertanggungjawab dalam *community development* perusahaan. Unit CSR ini dibentuk dilandasi oleh keinginan perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance* dalam menjalankan bisnis perusahaannya. Melalui implementasi program dari unit CSR ini diharapkan dapat menghasilkan harmoni antara perusahaan dengan para *stakeholders*/pemangku kepentingan di mana perusahaan beroperasi.

Secara umum, model pendekatan yang dipakai masih sangat strukturalis-formal. Hal tersebut tidak terlepas dari besaran dan karakteristik wilayah lokasi kerja perusahaan yang beragam. *Unit community development* belum baku diterapkan, karena menyangkut *internal resources* yang terbatas. Di lokasi di luar Kantor Pusat tidak ada staf khusus yang menangani *community development*, biasanya ditangani oleh *Human Resources Manager* (HR). Sehingga, selama ini penetrasi dan pendekatan kepada para pemangku kepentingan dilakukan oleh kepala lokasi dan/atau kepala personalia HR. Hanya untuk daerah tertentu (Klaten, Mekarsari, Pasuruan), sudah ada CSR Representatif yang melaksanakan aktivitas mendinamisir sejumlah kelompok sosial dan ekonomi setempat.

3.2.2.2. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data dari perusahaan PT. Aqua Golden Missisipi jumlah karyawan perusahaan Aqua di Kecamatan Cicurug sebanyak 1.360 orang yang terdiri dari 127 perempuan dan 1.233 laki-laki. Mayoritas karyawan (90%) berasal dari wilayah Sukabumi, Bogor dan sekitarnya. Adapun tingkat pendidikan para karyawannya, rata-rata berpendidikan SMP dan SMA (87%), sebagian kecil SD dan Sarjana (23%). Dilihat dari segi umur, mayoritas karyawan (1.123

orang) berada pada kisaran 20–35 tahun. Hanya 13 orang yang berumur di bawah 20 tahun. Sedangkan dari sisi lamanya bekerja di perusahaan, mayoritas karyawan (899 orang) telah bekerja selama 5 tahun atau kurang, mayoritas sisanya telah bekerja di perusahaan antara 6–15 tahun. Hanya 29 orang yang bekerja selama 16 tahun atau lebih.

3.2.2.3. Perencanaan Program *Community Development*

Pembuatan program *community development* diprioritaskan di daerah-daerah yang paling mempunyai banyak masalah, ataupun yang paling positif di dalam menerima/menjalankan program *community development*. Pada waktu menentukan tujuan *community development* terlebih dahulu ditentukan prioritas bidang yang akan digarap ('pilar' CD), misalnya: pelestarian sumber daya alam, pendidikan, polusi, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan pilar tersebut, pada saat penyusunan anggaran perusahaan ditetapkan program apa saja yang akan dilakukan selama setahun ke depan, berapa biayanya (suatu program juga bisa berlangsung lebih dari 1 tahun). Proses ini berlangsung antara 2-4 minggu. Sedangkan perencanaan yang terinci untuk tiap program dilakukan sebelum program dilaksanakan, dan waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung skala besar-kecilnya program. Acuan keberhasilan programnya apakah benar memberi manfaat bagi komunitas, dan *visibility*.

Adapun proses penyusunan perencanaan program *community development* nya diawali oleh Unit CSR dengan membuat proposal dan mengajukannya kepada Pimpinan perusahaan untuk didiskusikan. Dalam proses ini proposal bisa direvisi, ditambah, dikurangi, sampai akhirnya dianggap sudah sesuai/final, dan kemudian disetujui. Proposal program dibuat dengan memperhatikan kepentingan dari para pemangku kepentingan di lokasi perusahaan beroperasi, seperti pemerintah daerah, LSM, masyarakat, dan sebagainya. Penyusunan program tersebut dilakukan dengan pendekatan partisipatoris, artinya penyusunan program tidak dilakukan hanya oleh perusahaan tetapi

juga dengan partisipasi dari para *stakeholders*, sehingga bantuan dalam pelaksanaan program bisa datang dari berbagai pihak. Demikian juga inisiatif bisa datang baik dari perusahaan sendiri maupun dari luar perusahaan. Keuntungannya adalah selain tidak ada program *community development* yang tumpangtindih/*overlapping*, programnya sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Apabila dirasakan bahwa saran dan atau bantuan dari satu pihak akan memberikan keterbatasan yang sifatnya mengganggu organisasi maupun jalannya program, maka saran/bantuan tersebut tidak diambil. Jadi dalam memformulasikan tujuan *community development* perusahaan berusaha menyelaraskan antara kepentingan perusahaan yang tertuang dalam visi dan misinya dengan kepentingan para pemangku kepentingan (Unit CSR, Pimpinan Perusahaan, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, LSM). Dengan melalui partisipasi dari masyarakat dan para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat mendorong mereka mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program *community development* yang akan dijalankan.

Berkaitan dengan pendanaan, program *community development* tersebut memperoleh dana dari anggaran perusahaan, kendati tidak ada persentase khusus bagi alokasi pendanaannya karena disesuaikan dengan kemampuan finansial perusahaan. Pembiayaan bisa dari Perusahaan lokal sendiri atau dari Induk Perusahaan/*parent company*. Manajemen pembiayaan diperlakukan sama seperti untuk pembiayaan operasional rutin perusahaan.

Dari sisi perencanaan program tampak bahwa secara substansial, pada umumnya program *community development* (CD) dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan/diselaraskan dengan kemampuan perusahaan, karena biasanya perselisihan, tekanan, isu-isu, bermula dari kebutuhan masyarakat yang tidak ditangani dengan baik. Masyarakat pun mau bergabung apabila mereka melihat program tsb bermanfaat. Permintaan yang muncul bisa bermacam-macam baik kultural, ekonomi, maupun politis. Selain harus memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam

perencanaan program *community development* juga harus memperhatikan UU atau peraturan yang berlaku sehingga memenuhi kepentingan para *stakeholders* nya agar dapat menciptakan suasana kondusif bagi operasi perusahaan. Perusahaan sangat membutuhkan dukungan para pemangku kepentingan untuk dapat melancarkan operasionalisasi program *community development* yang telah direncanakan, karena tanpa dukungan para pemangku kepentingan tersebut niscaya program *community development* tidak akan mendapatkan hasil baik atau maksimal. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terkait umumnya akan mendukung, apabila program *community development* yang direncanakan memberi manfaat bagi mereka. Biasanya pers akan memberitakan sesuai persepsi yang berkembang atas dasar kadar kepuasan para pemangku kepentingan. Pertimbangan semacam itu sangat esensial karena tujuan pelaksanaan program *community development* selain dibuat untuk kepentingan masyarakat, juga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan perusahaan yang kondusif bagi produktivitas perusahaan itu sendiri. Melalui harmoni dengan para pemangku kepentingan diharapkan akan tercapai perkembangan yang berkesinambungan (*sustainable development*).

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa di dalam merancang program *community development* nya bagi masyarakat sekitar, perusahaan tersebut juga mempunyai pamrih atau *interest* untuk kepentingan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Interest semacam itu dapat dikatakan merupakan hal yang wajar karena perusahaan selalu memperhitungkan *cost and benefit* dalam setiap tindakannya. Dari sudut pandang *community development*, secara normatif dan etisnya, yang penting adalah bahwa perusahaan tersebut paling tidak telah memiliki itikad baik melalui program *community development* nya ingin memberikan “imbal balik” perusahaan kepada masyarakat, karena mereka sudah banyak berkorban untuk industri. Perusahaan menyadari bahwa masyarakat, setidaknya, sudah merelakan lahan yang dimilikinya untuk kepentingan operasi perusahaan. Oleh karena itu, sebagai imbal

balikinya, perusahaan berusaha memperhatikan kepentingan masyarakat dengan memberi mereka kesempatan merasakan pembangunan dari perusahaan.

3.2.2.4. Pelaksanaan/Implementasi Program *Community Development*

Menurut pihak Kecamatan Cicurug sebelum perusahaan berdiri, dalam persetujuan dengan masyarakat setempat termasuk juga dengan pemerintah daerah ketika pembahasan ijin persetujuan dibahas bagaimana komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat setempat. Pada saat itu PT. Aqua memiliki komitmen akan lebih memberdayakan masyarakat dalam artian kesejahteraan masyarakat setempat, terutama masyarakat yang berdekatan dengan perusahaan. Komitmen seperti itu merupakan suatu keharusan agar masyarakat setempat bisa menikmati keberadaan perusahaan. Dalam implementasinya PT. Aqua memberikan kesempatan untuk menyerap tenaga kerja lokal menjadi karyawan di perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat untuk memanfaatkan limbah perusahaan yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti plastik, karton, botol-botol bekas cup Aqua, barang-barang *reject*, yang tentunya bisa dijual sehingga menghasilkan uang untuk masyarakat setempat. Dalam satu hari cukup banyak limbah yang di hasilkan oleh PT. Aqua, hampir satu truk. Masyarakat membeli limbah tersebut dengan harga dasar yang disepakati bersama antara manajemen perusahaan dengan masyarakat yang akan mengambilnya. Harga dasar pembelian yang berlaku sekarang berkisar antara 1.800 hingga 3.000 rupiah per kg. Sementara mereka menjual kembali dengan kisaran harga antara 4.500 hingga 6.000 rupiah per kg, sehingga cukup bisa menghasilkan uang bagi masyarakat. Rata-rata usaha ini dapat memberikan keuntungan bersih bagi pemiliknya, paling kecil sekitar 500 hingga 600 ribuan per kali pengambilan limbah dan yang paling besar bisa mencapai 1 juta lima ratus ribu rupiah per kali pengambilan.

Sehingga per bulannya secara rata-rata dapat memberikan penghasilan bagi pemilik/pengelolanya sebesar 4 juta rupiah. Sementara karyawannya mendapat upah sebesar 25 ribu rupiah per hari, dengan rata-rata lima hari kerja per minggu, maka per bulannya mendapat penghasilan sebesar 500 ribu rupiah. Sekarang ini pemanfaatan limbah perusahaan dikelola oleh beberapa penduduk dari 3 desa yaitu, Mekarsari, Purwosari, dan Nyangkowek. Menurut informan dari kecamatan dan Kepala Desa Purwosari, dalam proses negosiasi awalnya dilakukan dengan Kepala Desa, kemudian pihak desa mengkoordinasikannya dengan masyarakat desa yang berminat dan yang mampu mengelola limbah tersebut. Yang penting bagi perusahaan maupun desa bahwa pengolahan limbah tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan harus mempekerjakan warga sekitar. Orang yang mau mengelola harus memberikan kontribusi pada lingkungan sekitar baik berupa sumbangan dana maupun melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan. Kebijakan semacam ini memang diakui oleh Kepala Desa Mekarsari dan Purwasari karena setiap tahun ada insentif yang diberikan dari pengusaha limbah itu ke desa paling tidak sebesar 500 ribu rupiah. Untuk teknis atau penjadwalan waktu pengambilannya pihak perusahaan berkoordinasi dengan RT dan RW nya untuk mengatur pengambilannya di mana dicapai kesepakatan bahwa limbah tersebut setiap hari diambil secara bergiliran oleh penduduk RT yang berbeda.

Tampaknya ada ketidakjelasan dalam *community development* perusahaan terkait dengan pengaturan penjatahan pengolahan limbah perusahaan tersebut. Kemungkinan besar bahwa kesempatan usaha tersebut diberikan tergantung pada kekuatan lobi perorangan ketimbang kelembagaan desa secara formal. Peluang usaha yang diberikan oleh perusahaan cenderung menjadi usaha perorangan yang terlepas dari pembinaan, baik dari desa maupun perusahaan. Implikasinya, desa sebagai lembaga pemerintahan lokal yang otonom menjadi tersisihkan dalam upaya mengkoordinasikan

kegiatan ekonomi di daerahnya terutama yang terkait dengan perusahaan sebesar PT. Aqua ini.

Dalam konteks penyerapan tenaga kerja usaha pengolahan limbah perusahaan PT. Aqua ini relatif membantu untuk mengurangi pengangguran di tingkat desa. Sebagai contoh, pengelolaan sampah di Purwosari dapat melibatkan 20 orang tenaga kerja desa setempat. Sementara kontribusi yang telah diberikan di antaranya adalah menyumbang untuk pembangunan jalan desa, pembangunan fisik madrasah. Namun demikian bila dilihat dari sudut pandang *community development* yang merupakan tanggung jawab perusahaan dapat dikatakan bahwa PT. Aqua tidak melakukannya secara maksimal, karena sebetulnya lebih cenderung berupa proses jual beli limbah murni, hanya saja prioritas pembelinya diberikan pada masyarakat desa sekitar. Proses selanjutnya dari pengolahan limbah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembeli tersebut, tidak ada intervensi terhadap pengusaha limbah. PT. Aqua tidak lagi terlibat seperti pembinaan dalam proses pengolahan, proses penjualan atau hidup matinya usaha limbah tersebut yang selayaknya dilakukan untuk kepentingan *community development*. Yang penting bagi PT. Aqua dia sudah menekankan bahwa harus ada kontribusi untuk kepentingan rakyat banyak.

Selain kegiatan seperti di atas, dulu PT. Aqua banyak memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar berupa pekerjaan borongan yang bersifat rutin untuk membuat palet yang dibutuhkan perusahaan. Tetapi ternyata masyarakat tidak melaksanakan dengan baik atau tidak sesuai dengan persyaratan kualitas yang ditentukan sehingga akhirnya pekerjaan tersebut tidak lagi diberikan pada masyarakat setempat. Keputusan semacam ini memang bukan salah perusahaan karena dia sudah mencoba memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan bahkan mereka sangat melarang dan marah (mencabut lagi) kalau DO yang didapatkan oleh masyarakat kemudian dijual kepada orang lain.

Di samping itu PT. Aqua juga sering memberikan pekerjaan harian lepas yang tidak permanen kepada masyarakat sekitar seperti misalnya bongkar muat atau mengupas stiker untuk diganti dengan yang baru.

Selain memberikan kesempatan kerja dan pemanfaatan limbah, PT. Aqua juga memberikan bantuan sumbangan-sumbangan yang sifatnya insidentil. Seperti khitanan masal yang dilaksanakan oleh PT. Aqua di Desa Mekarsari yang sudah dilaksanakan sejak tiga periode. Tahun ini yang dikhitan berjumlah 33 orang. Sementara untuk tahun-tahun sebelumnya tidak diketahui jumlahnya mengingat dalam pelaksanaannya tanpa koordinasi dengan pihak desa. Baru pada tahun ini dilakukan koordinasi dengan desa. Itu pun informasinya bersumber dari masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh desa dengan menanyakan dan memberi teguran kepada PT. Aqua karena sebelumnya tidak ada koordinasi dengan desa. Oleh karena itu barulah pihak perusahaan memberikan daftar yang akan dikhitan dan pihak desa menyiapkan orang-orang yang akan di khitannya. Dalam penyelenggaraan khitanan masal ini PT. Aqua memberikan seperangkat pakaian di tambah dengan uang saku seperti uang sakit sebesar seratus ribu rupiah per anak.

Bantuan insidentil lainnya seperti menjelang 17 Agustus mereka memberikan bantuan kepada kepada RT/RW terdekat yang melakukan kegiatan perayaan. Bentuk bantuannya bisa dalam bentuk produk AMDK atau juga dana. Menurut pihak kecamatan untuk permintaan bantuan dalam bentuk produk realisasinya relatif cepat, biasanya dalam satu hari sudah bisa keluar. Namun kalau permintaan bantuannya berupa dana, maka masyarakat harus menyampaikan dalam bentuk proposal. Hanya saja untuk permintaan dana ini realisasinya agak lamban, sehingga biasanya satu bulan sebelumnya harus sudah menyampaikan proposal. Ini terjadi karena kewenangan untuk mengeluarkan bantuan dana dipegang oleh kantor pusat, sehingga PT. Aqua di Cicurug ini tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola atau mengeluarkan dana bantuan, terutama dalam besaran lebih dari 500 ribu rupiah. Oleh karena itu proposal bantuan

yang diajukan masyarakat harus disampaikan dulu ke Jakarta untuk diproses. Mengenai besarnya bantuan dana yang diberikan oleh PT. Aqua, menurut pihak kecamatan selama ini belum pernah mendapat bantuan dalam jumlah yang besar sekali. Sebagai contoh, ketika pihak kecamatan menyelenggarakan upacara menyelenggarakan kegiatan perayaan tujuh belas agustusan atau dalam bakti sosial desa paling besar perusahaan ini hanya memberikan kontribusi 500 ribu rupiah. Dan yang memprihatinkan karena PT. Aqua ini merupakan perusahaan besar maka menjadi panutan bagi perusahaan AMDK lainnya, sehingga bila diminta bantuan rata-rata mereka memberi sekitar 400 ribu hingga 500 ribu rupiah. Jadi jauh di bawah harapan pihak kecamatan, meskipun diakui bahwa kantor kecamatan setiap bulannya sudah mendapatkan sumbangan air mineral untuk kegiatan operasional seperti rapat dan lain sebagainya sebanyak 10 dus aqua gelas. Oleh karena itu dapat dibayangkan ketika desa dan RT/RW yang meminta bantuan, seberapa besar yang diberikan perusahaan.

Bayangan pesimistik semacam itu memang menjadi kenyataan seperti yang dikemukakan oleh Kades Nyangkowek ketika meminta bantuan untuk perayaan hari besar nasional 17 Agustus, PT. Aqua hanya memberi bantuan sebesar 100 ribu rupiah. Memang di samping itu masih menerima bantuan dalam bentuk produk air yang tidak rutin setiap bulan, hanya sewaktu-waktu, seperti ketika dilakukan Pilkada karena desa memang memintanya maka mendapat bantuan sebanyak 8 dus Aqua gelas. Selain itu masyarakat pun ada yang meminta dan mendapat bantuan yang besaran yang diterimanya tanpa sepengetahuan desa. Sementara itu Desa Mekarsari tidak mendapat bantuan rutin sebesar 100 ribu rupiah sebagaimana yang diterima oleh Desa Nyangkowek. Yang dia nikmati hanya 30% dari bagian PBB yang diperoleh dari PT. Aqua yang jumlahnya mencapai 8 juta rupiah per tahun. Bahkan untuk kepentingan pembangunan jalan, desa ini sudah tiga kali mengajukan proposal, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Perusahaan ini hanya memperhatikan jalan yang dilalui saluran pipa air baku dari Desa Cidahu yang melalui Desa Mekarsari. Namun demikian, baik pada perayaan hari besar

nasional (PHN) maupun hari besar Islam (PHBI) umumnya desa ini mendapatkan bantuan 250 ribu rupiah, di samping ada juga bantuan 10 dus minuman air mineral. Di samping itu, pernah mendapat bantuan satu kali untuk rehab pengecatan pos kamling, kemudian kitanan masal untuk masyarakat di wilayah terdekat pabrik Aqua. Menurut Kepala Desa Purwosari besarnya bantuan tersebut tergantung lobi yang memintanya, meskipun dia mengakui bahwa bantuan dana yang pernah diterimanya kebanyakan di bawah 500 ribu rupiah. Menurut pendapatnya, biasanya kalau untuk permintaan bantuan pembangunan fisik PT. Aqua meminta melihat dulu kondisinya. Untuk bantuan fisik biasanya perusahaan memberikan dalam bentuk natura seperti menyuruh mengambil semennya sekitar berapa sak dari toko yang ditunjuknya. Untuk penghijauan pun seperti yang dilakukan di Desa Purwosari dan Mekarsari dia memberikan bibitnya, atau untuk kegiatan perayaan juga biasanya memberikan dalam bentuk spanduk atau kaos. Memang disadari oleh pihak kecamatan bahwa proposal yang masuk cukup banyak, dari kegiatan tingkat kabupaten pun ada sehingga relatif banyak permintaan bantuan yang harus dilayani perusahaan. Namun implikasinya pihak kecamatan seolah-olah tidak merasakan adanya perusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya. Selama ini PT. Aqua dipersepsikan tidak turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan tingkat kecamatan.

Sementara ini belum ada koordinasi antara kecamatan dengan perusahaan kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental di sekitar di sekitar perusahaan. Walaupun pihak kecamatan mengundang perusahaan tersebut untuk berkoordinasi, yang hadir biasanya wakilnya saja bukan pimpinannya yang tentunya tidak bisa memberikan komentar, sehingga mereka hanya sebagai pendengar saja. Implikasinya terasa ada kebutuhan dan kepentingan yang berbeda antara kecamatan dan perusahaan.

Dalam kontribusinya terhadap pendidikan, PT. Aqua memberikan bantuan beasiswa untuk 15 anak murid SD mulai dari kelas satu sampai kelas enam di Desa Mekarsari mulai tahun 2003

sampai sekarang. Beasiswa itu di berikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Khususnya untuk satu RW di dua RT di lingkungan yang wilayahnya terdekat dengan PT. Aqua. Beasiswa yang diberikan berupa uang di mana satu anak itu per semesternya mendapatkan 25 ribu rupiah. Inisiatif pemberian beasiswa ini, menurut responden, berasal dari PT. Aqua sendiri setelah ada contoh dari pihak pabrik lain. Dalam proses seleksinya langsung dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data dari dewan guru, tanpa ada koordinasi dengan desa. Namun, menurut responden dari kecamatan, masih kalah dibandingkan dengan apa yang diberikan Kratingdaeng yang kontribusinya berupa program bantuan beasiswa untuk anak SD sampai SMA meliputi beberapa desa seperti Desa Babakan Pari, Desa Mekarsari, Desa Babakan Jaya, dan desa terdekat lainnya yang jumlahnya sampai 70 orang. Klasifikasi biaya yang diberikan Kratingdaeng per semester untuk murid SD sebesar 25 ribu rupiah per bulan, kemudian SMP 35 ribu rupiah per bulan, dan untuk SMA sebesar 50 ribu rupiah per bulan. Sementara itu, seperti dalam hal pengolahan limbah, Kades Nyangkowek menyatakan bahwa beasiswa tersebut tidak ada di desanya. Yang ada justru dari perusahaan yang lain seperti Kratingdaeng yang memberikan beasiswa untuk warga desa ini kurang lebih 20 juta satu tahun.

3.2.2.5. Respon Masyarakat terhadap PT. Aqua

Mengenai respons masyarakat terhadap PT. Aqua dapat dikatakan variatif dalam arti ada yang positif maupun negatif. Bagi mereka yang pandangannya negatif karena melihatnya dalam kapasitas yang tidak rasional obyektif, mengingat latar belakangnya pernah melamar dan kemudian tidak diterima masuk kerja di perusahaan ini. Namun secara umum bagi masyarakat sekitar PT. Aqua merasakan bahwa keberadaan perusahaan memberikan keuntungan ekonomi. Hal semacam ini terutama dirasakan oleh mereka yang semula tinggalnya paling berdekatan dengan pabrik dan punya tanah dan kemudian menjualnya pada perusahaan tersebut.

Selain itu dukungan masyarakat juga terjadi karena produksi PT.

Aqua memang bersih lingkungan, tidak menimbulkan limbah pencemaran. Kemudian perhatian perusahaan AMDK ini kepada masyarakat dianggap relatif bagus dan memberi peluang bagi masyarakat yang ingin bekerja. Menurut Disnaker, kalau umpamanya masyarakat kekurangan air dan mereka mengambil air ke sana (PT. Aqua) maka akan diberi, khususnya air untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, cuci, masak, belum siap untuk diminum. Bahkan PT. Aqua telah menyediakan kran air di luar pabrik yang dialirkan dari sumur artesisnya untuk masyarakat yang ditempatkan di dekat pos satpam. Sebagian warga di sana mengambil air dari kran itu pada saat-saat tertentu saja, seperti pada waktu mau shalat.

Selama ini belum pernah terjadi konflik antara perusahaan ini dengan masyarakat hingga diakhiri dengan semacam demonstrasi. Menurut BLH perusahaan AMDK yang ada di sini paling bagus perhatiannya kepada masyarakat. Namun demikian mungkin kepedulian PT. Aqua terhadap *community development* memang belum maksimal, contohnya, tepat di depan pabrik PT. Aqua pada saat penelitian ini dilakukan ada masyarakat yang meminta sumbangan di jalan itu untuk membangun mesjid di situ. Jadi dari sudut pandang *community development* tentu saja menjadi pertanyaan besar karena di situ ada PT. Aqua, tapi masyarakatnya masih meminta sumbangan untuk pembangunan mesjid di jalanan. Melihat kenyataan seperti itu bupati sempat menegur ketika ada acara pertemuan dengan perusahaan, agar PT. Aqua yang merupakan perusahaan besar yang telah memiliki empat pabrik membantu pembangunan mesjid itu agar masyarakat tidak meminta bantuan di jalanan. Wakil bupati juga merasakan bahwa PT. Aqua tidak peduli dalam memelihara jalan di daerahnya. Contohnya, jalan masuk ke daerah Cidahu yang dibiarkan rusak, padahal merupakan jalan masuk ke perusahaan Aqua, sementara di Jawa perusahaan tersebut turut berpartisipasi membangun jalan. Hal ini tentu saja cukup mengherankan dan menimbulkan pertanyaan bagi Pemda apakah Aqua di Sukabumi beda dengan Aqua di Pasuruan, karena manajemen pusatnya sama

sehingga *community development*-nya pun dapat dipastikan sama. Atau, apa permasalahannya muncul karena kebijakan manajemen PT. Aqua yang berwenang di Sukabumi, atau karena manajemen tersebut menutup permasalahan ke manajemen di tingkat pusat, atau memang kebijakannya dari pusat seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih belum terjawab. Contoh lainnya, Kepala Desa Nyangkowek menyatakan bahwa sekarang ini ada kantong parkir truk-truk Aqua di desanya tetapi perusahaan tidak ada kontribusi ke desa sama sekali. Padahal dengan adanya kantong parkir ini setiap malam di situ menjadi banyak PSK, karena di situ banyak sopir-sopir truk. Dikatakannya untuk masalah parkir ini masyarakatnya sudah merasakan resah. Dia juga menyayangkan tidak adanya ijin lingkungan, sehingga tidak jelas siapa yang mengizinkan. Padahal sebagai perusahaan besar seharusnya memberikan partisipasi yang lebih baik. Untuk itu pihak desa sudah menandatangani dan melayangkan surat keberatan dengan adanya kantong parkir ini, yang ditembuskan ke Aqua, ke camat. Bahkan dari camat sudah dibuatkan surat lagi dengan ditembuskan ke bupati, namun sampai saat ini masih belum ada tanggapan dan tidak ada tindak lanjut apapun, karena pihak Aqua sendiri merasa bahwa itu merupakan tanggung jawab pihak ekspedisi, bukan Aqua yang mengelola. Sementara masyarakat tahunya yang parkir di situ adalah mobil Aqua. Oleh karena itu masyarakatnya sekarang ini sudah ingin melakukan unjuk rasa tapi masih dapat dikendalikan oleh Kepala Desa dengan alasan sudah melayangkan surat kepada PT. Aqua.

BAB IV

KOMPARASI TEMUAN LAPANGAN

Kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Pasuruan untuk memberdayakan masyarakat adalah: pemberdayaan secara partisipatif. Pemberdayaan yang dilakukan diarahkan kepada peningkatan SDM dengan cara memantapkan keberadaan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maupun kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat khususnya diarahkan pada penduduk miskin.

Dalam konteks upaya memberdayakan masyarakatnya secara makro Kabupaten Pasuruan memiliki lima prioritas pembangunan yang meliputi :

- Pendidikan : *school map*
- Kesehatan
- Pembinaan usaha kecil menengah
- Usaha pertanian
- Industri

Sementara itu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut pada tahap awal lebih menekankan pada pembenahan terhadap sumberdaya manusia internal pemda. Kebijakan ini diambil karena selama ini dirasakan ada kesenjangan di lapangan antara konsep dengan SDM. Dalam upaya mengeliminasi *discrepancy* tersebut perlu terlebih dahulu dilakukan peningkatan kualitas SDM pemberdayaan yang ada di internal pemda agar mampu memahami konsep pemberdayaan yang dibuat sehingga memudahkan dalam implementasinya.

Secara makro Kabupaten Sukabumi memiliki tiga prioritas pembangunan dalam upaya memberdayakan masyarakatnya yakni :

- Perkebunan
- Pertanian
- Pertambangan

Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sudah memiliki lima prioritas pembangunan, namun hingga saat ini *Grand Strategy* dan *Policy* yang dibangun baru terbatas dalam bidang pendidikan. Sejauh ini Pemda Pasuruan belum memiliki strategi pemberdayaan masyarakat yang dirancang untuk mensinergikan/mengatur bagaimana pola hubungan antara masyarakat dengan pemda yang dalam hal ini diwakili PMD. PMD lebih berperan sebagai mediator/fasilitator antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah.

Hampir sama halnya dengan Pasuruan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi juga belum memiliki *Grand Strategy & Policy* yang dapat dijadikan rujukan untuk merealisasikan tiga prioritas pembangunan yang sudah digariskannya. Saat ini Pemda Kabupaten Sukabumi masih disibukan dengan kegiatan pembenahan SDM birokrasi sehubungan dengan pergantian kepala daerah yang baru berlangsung enam bulan. Sementara ini Badan Pemberdayaan Desa (Bapemdes) yang diberi otoritas menangani pemberdayaan masyarakat, dalam realitas operasional kegiatannya terlalu terfokus pada upaya pemberdayaan kelembagaan pemerintah desa seperti BPD dan LPM. Sejauh ini yang dilakukannya adalah pemberdayaan swadaya masyarakat dalam gotong royong, tetapi hal tersebut dilakukannya melalui penguatan kelembagaan formal yang ada di desa. Dengan kata lain Bapemdes lebih berperan sebagai mediator antara pemerintah desa dengan Pemerintah Kabupaten, tidak melakukan pemberdayaan masyarakat. Dia cenderung menjadi fasilitator saja dari apa yg disampaikan dari desa dan menyalurkan bantuan yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten yang lebih berupa stimulan dan dari /Provinsi/Pusat kepada desa yang ditujukan untuk lebih memacu swadaya masyarakat.

Dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melakukannya secara berjenjang dengan menggunakan pendekatan *bottom-up* melalui jalur musrenbang. Perencanaan dilakukan mulai dari tingkat dusun sampai dengan kabupaten. Mekanisme seperti itu berlaku pula untuk perencanaan di Kabupaten Sukabumi karena pola itu memang diberlakukan di semua pemerintah daerah di Indonesia oleh Pemerintah Pusat. Dalam membuat perencanaan tersebut, persoalan yg dihadapi oleh Kecamatan di Pasuruan adalah kurangnya atensi dari tingkat kabupaten ketika melakukan musrenbang kecamatan. Sementara kendala yang dihadapi kecamatan di kabupaten Sukabumi adalah tidak adanya inisiatif dalam mencari terobosan untuk melakukan koordinasi dengan Perusahaan AMDK dalam pemberdayaan masyarakat.

Sumber pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat di kedua kabupaten tersebut cenderung sama yaitu dari sumber APBD maupun anggaran bantuan lain dari pusat/provinsi.

Pada tataran pelaksanaan, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Pasuruan menghadapi kendala dalam upaya mempengaruhi para pengusaha agar berpartisipasi dalam melakukan *community development*. Meskipun pihak Pemda sudah mensyaratkan bagi setiap perusahaan yang akan mendirikan perusahaan agar mempekerjakan tenaga kerja lokal/masyarakat sekitar, harus ramah lingkungan, baik dengan masyarakat maupun alam sekitarnya. Namun realitasnya tidak mudah karena perusahaan pun memiliki kepentingan sendiri. Selain itu masyarakat pun harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam rekrutmen pegawai yang tentunya tidak mudah untuk dipenuhi mengingat rendahnya kualitas SDM yang tersedia di sekitar lokasi perusahaan.

Sama halnya dengan di atas, Pemda Kabupaten Sukabumi pun menghadapi kendala dalam implementasi *community development* yakni tidak dimilikinya inisiatif, kreativitas dan komitmen yg memadai baik dari pihak aparatur maupun pihak

AMDK. Untuk mendorong implementasi *community development* perusahaan, dalam pemberian ijin operasi perusahaan, sebagaimana dengan Pemda Kabupaten Pasuruan, pihak Pemda Kabupaten Sukabumi pun memberi persyaratan bahwa dalam rekrutmen pegawai harus memperhatikan tenaga kerja lokal. Namun karena rendahnya kualitas SDM lokal yang tersedia, maka tidak semua tenaga kerja perusahaan dapat diisi oleh tenaga lokal.

Dilihat dari pendirian perusahaannya, eksistensi PT. Ades Waters Indonesia sudah berdiri dari tahun 1987 sehingga lebih dulu daripada PT. Aqua Golden Missisipi yang baru didirikan 7 tahun kemudian yakni tahun 1994. Namun demikian bila dilihat dari jumlah karyawannya PT. Aqua tampak jauh lebih besar dengan jumlah karyawan 1.360 orang yang terdiri dari 1.233 karyawan laki-laki dan 127 karyawan perempuan. Sementara total karyawan PT. Ades hanya sekitar seperlimanya yaitu 245 orang yang terdiri dari 41 karyawan laki-laki dan 204 karyawan perempuan. Sementara bila dilihat dari tingkat pendidikan karyawannya, mayoritas karyawan kedua perusahaan berpendidikan SLTA atau sederajat.

Dalam konteks *community development*, secara organisasional dan manajerial PT. Ades belum memiliki Unit CSR. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini secara substansial belum memiliki *concern* terhadap upaya pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya sudah menjadi indikator umum untuk melihat kesehatan perusahaan. Realitasnya dari sudut pandang *community development*, sejauh ini memang tidak ada kegiatan perusahaan yang ditujukan untuk memberdayakan baik untuk kepentingan lingkungan, daerah, maupun masyarakat umum. Meskipun mulai ada indikasi yang mengarah pada *community development* dalam masa ke depan sehubungan dengan masuknya perusahaan multinasional Nestle dengan mengadopsi *Safety, Health, and Environment* (SHE), namun hingga saat ini masih disibukan oleh penguatan internal organisasinya. Kegiatan yang dilakukan masih terfokus pada konsolidasi dan pelatihan internal perusahaan, belum melibatkan masyarakat di luar perusahaan.

Sementara itu secara organisasional dan manajerial PT. Aqua sudah memiliki Unit CSR. Kondisi ini mengindikasikan adanya komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat setempat. Dan itu telah dibuktikannya di daerah Klaten yang relatif berhasil dalam memberdayakan masyarakat sekitarnya dengan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Namun demikian sejauh ini model pendekatan masih sangat strukturalis-formal. Implikasinya membuat proses pertemuan dengan para *stakeholders* belum dapat dilakukan dengan baik. Kekurangan lainnya adalah bahwa Unit CSR tersebut belum dibakukan di setiap kantor (pabrik) cabang karena terkendala oleh *internal resources* yg terbatas.

Dilihat dari sisi perencanaan, implikasi dari belum dimilikinya unit *community development* oleh PT. Ades maka diapun tidak memiliki sistem dan mekanisme perencanaan untuk pemberdayaan masyarakat. Ketiadaan perencanaan *community development* tersebut karena dari dahulu memang tidak ada kebijakan perusahaan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar.

Tidak demikian halnya dengan PT. Aqua, perusahaan ini telah memiliki sistem perencanaan dengan menentukan prioritas bidang yang akan digarapnya yang disebut “pilar” *community development* yaitu pelestarian SDA, pendidikan, polusi, pertanian, dan sebagainya. Perencanaan dibuat oleh Unit CSR dengan memperhatikan kepentingan para *stakeholders* yang selanjutnya diusulkan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Pedomannya program *community development* dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan UU/peraturan yang berlaku. Program yang akan dilakukan disusun selama setahun ke depan berikut anggarannya. Melalui implementasi program dari unit CSR diharapkan dapat menghasilkan harmoni antara perusahaan dengan para *stakeholders* di mana perusahaan beroperasi.

Pada tataran implementasi, PT. Ades memberlakukan mekanisme bantuan dengan cara, bagi pemohon yang membutuhkan bantuan mengajukan proposal bantuan langsung kepada perusahaan; tidak harus selalu melalui desa atau kecamatan. Prosesnya, proposal diterima *Human Resources*, kemudian diteruskan kepada *Site Manager*. Sementara untuk bantuan untuk *sponsorship*, prosedur pengajuan harus ke Surabaya. Bantuan yang pernah diberikan antara lain, perusahaan memberikan fasilitas air bersih kepada masyarakat sekitar dengan menyediakan pipa kran air yang dapat digunakan masyarakat, memberikan bantuan air minum produk Ades pada kegiatan 17 Agustus di tingkat kecamatan/kelurahan/desa, sekolah, kegiatan keagamaan kepada pihak muspika, masyarakat umum. Bantuan lain yang pernah diberikan berupa bahan bangunan semen untuk membangun kantor Desa Sengonagung. Bantuan paling besar yang pernah diberikan ke desa sebesar Rp.400.000,-. Kelemahannya adalah tidak ada koordinasi antara Kecamatan dengan Perusahaan, karena terjadi hubungan yang kurang harmonis di antara Kecamatan dengan Perusahaan

Implementasi *community development* yang berlaku di PT. Aqua, secara organisasional program *community development* dikelola sama halnya dengan unit-unit lain yang berada dalam perusahaan. Perusahaan menyediakan SDM untuk memperlancar pelaksanaan program, dibekali *training* yang sesuai dengan kebutuhan program *community development* saat itu. Namun sampai saat ini kualitas keterampilan yg dimiliki personal unit pelaksana *community development* masih standar, dalam arti masih perlu ditingkatkan. Dalam mengimplementasikan program, biasanya perusahaan mengajak para pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dengan harapan agar ada rasa memiliki. Perusahaan mengajak peran serta masyarakat setempat. Strategi implementasi tersebut dapat dikatakan *on the right track* mengingat pada akhirnya upaya pemberdayaan itu harus berujung pada pemandirian masyarakat. Sayangnya realitas menunjukkan bahwa tidak banyak anggota

komunitas di luar perusahaan terlibat, sehingga tingkat partisipasinya masih rendah.

Menyangkut programnya, selama ini perusahaan PT. Aqua memberikan peluang kepada masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaan, karena kebijakan ketenagakerjaan di Aqua memprioritaskan 75% pekerjaan kepada warga setempat. Perusahaan menyediakan kran air di luar pabrik untuk masyarakat yang membutuhkan air untuk mandi, cuci, masak. Memberikan bantuan sumbangan yang sifatnya insidental, seperti khitanan massal. Memberikan kontribusi di bidang pendidikan seperti beasiswa di Desa Mekarsari kepada 15 anak SD kelas I s/d kelas VI yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai sekarang, Rp.25.000,-/semester. Selain itu perusahaan juga memberikan bantuan yang bentuknya natura untuk bantuan fisik, bibit tanaman penghijauan dan sebagainya. Memberikan spanduk, kaos untuk perayaan hari besar. Selama ini bantuan dana yang diberikan perusahaan berkisar Rp.400.000,- s/d Rp.500.000,-. Dalam konteks usaha ekonomi, Perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan limbah perusahaan yang masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti plastik, karton, botol, bekas *cup* Aqua, barang *reject* untuk dijual. Kemudian memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk melakukan pekerjaan borongan yang sifatnya rutin, seperti membuat palet untuk perusahaan. Bentuk yang lain adalah memberikan pekerjaan harian lepas yang tidak permanen kepada masyarakat sekitar, seperti bongkar muat atau mengupas stiker untuk diganti baru.

Dalam hal kontrol perusahaan terhadap program bantuan atau *community development*, PT. Ades tidak melakukan kontrol. Hal ini dapat dimengerti karena perusahaan ini memang tidak memiliki program yang terencana dan tertata. Berbeda halnya dengan PT. Aqua, perusahaan ini telah memiliki mekanisme kontrol yang didesain secara berjenjang, walaupun tampaknya belum diimplementasikan dengan baik.

Dalam kaitannya dengan respon masyarakat terhadap perusahaan, masyarakat di sekitar PT. ADES merasa sulit untuk mendapatkan sumbangan seperti untuk pembuatan jalan desa/kampung, membangun mushola, pendidikan (fasilitas sekolah /beasiswa dll). Proses pengajuan proposal dirasakan sangat birokratis dan memerlukan waktu sehari-hari dan berminggu-minggu untuk memperoleh jawaban. Namun demikian hal yang dipersepsikan positif adalah tidak adanya limbah pencemaran yang diakibatkan dari pengolahan air minum dalam kemasan. Implikasi dari rendahnya respons perusahaan terhadap kebutuhan masyarakat sekitar menyebabkan masyarakat menjadi cenderung tidak peduli, tidak banyak permintaan atau harapan-harapan terhadap bantuan perusahaan.

Sementara itu respon negatif masyarakat terhadap PT. Aqua adalah keresahan warga atas keberadaan kantong-kantong parkir untuk truk Aqua, karena setiap malam menjadi sarang PSK dan perusahaan ini tidak cukup tanggap terhadap keluhan yang muncul dari mereka. Hal lain, proses pengajuan proposal memerlukan waktu sehari-hari dan berminggu-minggu untuk memperoleh jawaban, sementara bantuan yang diperoleh tidak sebesar yang mereka harapkan. Hal yang positif, tidak ada limbah pencemaran yang diakibatkan dari pengolahan air minum dalam kemasan.

BAB V

KESIMPULAN

Selama ini belum ada kerjasama ataupun koordinasi di antara pemangku kepentingan (pemda, LSM dan perusahaan) dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, baik dalam tataran perencanaan maupun pelaksanaan *community development*, sehingga tidak ada sinergi dalam upaya memberdayakan masyarakat. Hal tersebut kemudian menyebabkan para pemangku kepentingan berjalan sendiri-sendiri, seolah-olah di antara mereka tidak ada keterkaitan satu sama lain. Sejauh ini, *community development* yang dilakukan oleh Pemda terbatas pada kelembagaan desa seperti Badan Pemberdayaan Desa (Bapemdes) dengan struktur lainnya seperti Badan Pemberdayaan Desa (BPD) serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sebagai wadah untuk memudahkan penyaluran bantuan. Dengan kata lain peran Pemda hanya bertindak sebagai fasilitator dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Sementara pemberdayaan yang dilakukan cenderung bersifat karitatif yang tidak mengarah pada pemandirian masyarakat.

Secara paradigmatik perusahaan AMDK, khususnya Ades, sejauh ini masih menganut pandangan “*korporasi tradisional*” yang *profit oriented*, di mana segala keuntungan diorientasikan semata-mata untuk kepentingan perusahaan (*The business of business is business*, urusan bisnis adalah bisnis). Padahal perusahaan pada hakekatnya merupakan institusi pencipta kesejahteraan masyarakat, yang memiliki tujuan tunggal yaitu memaksimalkan keuntungan bagi pemiliknya dan keberadaannya dipercaya dapat menciptakan lapangan kerja. Namun realitanya bantuan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat masih berupa donasi yang bersifat karitatif yang tidak mengarah pada upaya pemberdayaan.

Sejauh ini PT. Ades belum memiliki unit CSR dan belum melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Bantuan, walaupun ada,

masih bersifat bantuan-bantuan insidental (karitas) sebagai upaya untuk merespon permintaan yang diajukan oleh masyarakat dan itupun diberikan sangat minimal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PT. Ades tidak memiliki program, mekanisme kerja, sistem personalia dan alokasi biaya operasional untuk kegiatan *community development* yang terancang. Namun secara optimistik tampaknya perusahaan tersebut akan mengarah ke sana, karena sekarang sejak bergabung dengan Nestle, perusahaan tersebut sedang mengembangkan program SHE (*Safety, Health and Environmmet*), yang terkait dengan ISO, kendatipun sekarang masih pada tahap penguatan internal organisasinya. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut juga masih belum terlihat.

Dari sudut pandang *community development*, sejauh ini relatif tidak ada kegiatan perusahaan yang ditujukan untuk membantu pemberdayaan, baik untuk kepentingan lingkungan, daerah, atau pun masyarakat umum. Belum ada kegiatan perusahaan seperti misalnya pelatihan wira usaha untuk menjadi distributor, agen, atau pedagang produk Ades. Sepertinya, perusahaan belum memiliki niat untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat umum. Perusahaan Ades tidak pernah memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak, seperti bea siswa bagi anggota masyarakat lokal. Sementara ini prioritas pengembangan masih diorientasikan pada pengembangan internal perusahaan. Dari sisi pendanaan pun perusahaan ini tidak memiliki dana khusus untuk bisa mendukung kegiatan pembinaan masyarakat, dana kompensasi, ataupun untuk mengantisipasi bila terjadi suatu gejolak masyarakat di sekitarnya.

Implikasi dari tidak adanya unit CSR perusahaan, maka tidak ada perencanaan yang terarah yang dilakukan perusahaan dalam upaya memberdayakan masyarakat. Implikasinya tentu saja tidak ada program *community development* yang dijalankan, serta minimnya bantuan yang diberikan oleh perusahaan. Konsekuensinya menimbulkan persepsi yang negatif dari kalangan masyarakat, bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan manfaat bagi pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakatpun cenderung bersikap tidak peduli

lagi serta tidak banyak harapan dan tuntutan terhadap perusahaan tersebut.

Meskipun tidak banyak bantuan yang diberikan pada dan dirasakan oleh masyarakat dari PT. Ades, secara umum tidak ada keresahan yang besar terhadap sikap-sikap dari perusahaan yang tidak banyak membantu masyarakat tersebut. Hal ini karena masyarakat menyadari bahwa ada keterbatasan hak dalam mengajukan tuntutan, mengingat tidak adanya limbah pencemaran yang diakibatkan dari pengolahan air minum dalam kemasan tersebut.

Selain karena hampir tidak adanya pencemaran, tidak adanya gejolak ataupun keresahan yang muncul di pihak masyarakat atas sikap PT. Ades yang memberikan kontribusi sangat minimal terhadap lingkungannya tersebut, juga karena lokasi pabrik perusahaan tersebut terletak di pinggir jalan utama dan berdiri di daerah pesawahan yang jauh dari pemukiman penduduk sehingga tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan lain dari masyarakat lokal.

Ada kesan bahwa ada ketidakpedulian yang relatif tinggi baik pada pihak industri maupun pihak masyarakat untuk proaktif melakukan kerjasama yang bersifat simbiose mutualistik dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat. Diakui oleh tokoh masyarakat setempat bahwa sebetulnya bukan karena ketidakpedulian masyarakat, tetapi lebih karena karakter masyarakat lokal yang cenderung bersikap pasrah (nrimo).

Hampir sama halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi pun belum mempunyai rancangan mengenai mekanisme koordinasi untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan AMDK dalam upaya *community development*, sehingga mengakibatkan dalam melakukan program-program *community development* mereka terkesan berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu untuk jangka panjang perlu membentuk hubungan yang harmonis agar tercipta suasana yang

kondusif bagi kedua belah pihak yang memungkinkan untuk tercapainya *sustainable development*. Di satu sisi perusahaan harus lebih meningkatkan komunikasi mengenai program *community development*nya agar diketahui para pemangku kepentingan, di sisi lain para pemangku kepentingan lainpun harus lebih akomodatif terhadap kepentingan perusahaan.

Dalam konteks pengembangan *community development* di daerah Sukabumi, PT. Aqua dijadikan *leading institution* oleh pemerintah untuk mengembangkan CSR, mengingat Aqua merupakan perusahaan AMDK terbesar, sehingga diharapkan apabila perusahaan itu mengembangkan CSR akan diikuti oleh perusahaan AMDK lainnya.

Secara organisasional, berbeda dengan PT. Ades, perusahaan PT. Aqua saat ini sudah memiliki unit CSR tersendiri yang diberi kewenangan untuk melaksanakan program *community development* perusahaan. Dengan demikian, perusahaan sudah memiliki mekanisme kerja, sistem personalia dan alokasi anggaran biaya operasional *community development* yang lebih tertata. Bahkan unit CSR ini dikelola sama seperti halnya unit lain yang ada dalam perusahaan.

Namun demikian realitas di lapangan, khususnya di Kabupaten Sukabumi, tidak terlihat adanya sistem perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi *community development* yang dilakukan oleh perusahaan. Pelaksanaan program terkesan dilaksanakan secara insidental dan bersifat karitatif, tergantung permintaan bantuan dari masyarakat sekitar. Namun demikian, harus diakui bahwa sumbangan yang diberikan oleh PT. Aqua ini lebih responsif daripada apa yang diberikan oleh PT. Ades, walaupun masyarakat sekitar tetap mempunyai persepsi bahwa PT. Aqua tidak memberdayakan masyarakat. Masyarakat masih mempunyai ekspektasi bahwa PT. Aqua pada suatu saat akan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di lokasi mereka.

Kendati dalam mekanisme penyusunan program *community development* yang dirancang oleh perusahaan diharuskan untuk memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (pemda, LSM, masyarakat) di lokasi perusahaan itu didirikan, namun realitanya menunjukkan bahwa baik dalam tataran perencanaan maupun pelaksanaan program *community development* tidak melibatkan peranan para pemangku kepentingan tersebut. Besar dugaan bahwa dalam perusahaan yang bersangkutan masih terdapat kendala dalam lingkup *internal resources* sehingga lebih lanjut menyebabkan belum terdapatnya panduan baku dalam penerapan *community development*. Kondisi yang demikian, pada gilirannya, menyebabkan penetrasi dan pendekatan kepada para pemangku kepentingan sangat tergantung pada kepala lokasi perusahaan.

Dalam rangka implementasi *community development*, seringkali perusahaan menghadapi persoalan yang berkaitan dengan masalah keuangan, kewenangan, dan sumberdaya manusia. Sedangkan di luar perusahaan persoalan muncul baik dari masyarakat (motivasi, konsistensi, teknologi, kultural, kelompok pengganggu), Pemda (*overlapping* program, kesesuaian program, koordinasi program, dll) maupun LSM (perbedaan kepentingan, keterlibatan, paradigma, dll). Persoalan semacam ini seharusnya sudah teridentifikasi dengan baik ketika perusahaan melakukan evaluasi untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, implementasi dan hasil, yang kemudian dijadikan *feedback* dalam perencanaan program *community development* tahap selanjutnya. Namun sayangnya sejauh ini evaluasi program tersebut belum dilakukan. Tindakan yang dilakukan perusahaan baru sebatas monitoring saja, tanpa ada tindak lanjut dalam perencanaan berikutnya.

Matrik Kesimpulan

PT ADES :	PT. AQUA :
<ul style="list-style-type: none"> - Sec paradigmatik, sejauh ini PT. ADES masih menganut pandangan “korporasi tradisional” yg <i>profit oriented</i>, di mana segala keuntungan diorientasikan semata-mata unt kepentingan perusahaan. - Masih pada orientasi penguatan internal organisasi persh - PT. ADES belum memiliki Unit CSR maupun melaksanakan pemberdayaan masyarakat. - Dng tdk adanya Unit CSR, maka tidak adanya perencanaan yg terarah dlm upaya memberdaya-kan masy dan tdk adanya program CD yg dijalankan. - Tdk ada kegiatan prsh yg dituju- kan unt membantu pemberdayaan, baik unt kep.lingkungan, kep. daerah maupun masy umum. - Prsh akan mengarah pada pemben tukan CD, krn sekarang sejak ber-gabung dengan Nestle, prsh tsb sdg mengembangkan program SHE (<i>Safety, Health and Environmnet</i>), yg terkait dng ISO. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sec umum keberadaan prsh memb keuntungan ekonomis. - PT. Aqua dijadikan <i>leading institution</i> oleh pemerintah untuk mengembangkan CSR. - Belum ada kerjasama/koordinasi pemberdayaan di antara para <i>stakeholders</i>, baik dlm perencanaan maupun pelaksanaan CD. Shg tdk ada sinergi dlm upaya pemberdayaan masy. - Pihak kecamatan seolah-olah tdk merasakan adanya prsh besar yg beroperasi di wilayahnya. PT. AQUA dipersepsikan tdk turut berpartisipasi dlm kegiatan pembangunan di tingkat kec. - Kendala dalam lingkup <i>internal resources</i>, shg lebih lanjut menyebabkan belum terdapatnya panduan baku dlm penerapan CD. - Pelaksanaan program terkesan dilaksanakan secara insidental dan bersifat karitatif, tergantung permintaan bantuan dari masyarakat sekitar.

<ul style="list-style-type: none">- Keberadaannya sangat membantu masy setempat, krn dapat menam-pung tenaga kerja (90% merekrut org di sekitar lokasi prsh)- Bantuan-bantuan incidental bersifat karitatif, sebagai upaya unt merespon permintaan yg diajukan oleh masyarakat.- Minimnya partisipasi perusahaan thdp kepentingan sosial ekonomi masy dan pengelolaan lingkungan menimbulkan persepsi yg negatif dari masy, bahwa prsh tdk mem- berikan manfaat bagi pemberdaya an masyarakat.- Krn tdk ada limbah pencemaran yg diakibatkan dari pengolahan AMDK, maka tdk ada gejala/ konflik dari masy sekitar.- Masy cenderung tdk peduli, tdk banyak permintaan atau harapan-harapan thdp bantuan perusahaan.	<ul style="list-style-type: none">- Dukungan masy terjadi krn PT. AQUA bersih lingkungan, tidak menimbulkan limbah pencemaran.- Evaluasi program blm dilakukan, yg dilakukan prsh baru sebatas monitoring saja, tanpa ada tindak lanjut dalam perencanaan berikutnya.- Kepedulian perusahaan belum maksimal.
--	--

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anonim, (March 1974), "Social Responsibilities of Business Managers," *Academy of Management Journal*, pp. 135-138
- Alberta *Community Development*. (1999). Brochure. Edmonton Alberta: *Alberta Community Development*.
- Alfred, Chandler, (1962). *Strategy and Structure*, Cambridge MIT Press.
- Beatty, Paulette T (1981), *The Concept of Need: Proposal for Working Definition*, *Journal of The Community Development Society*, Michigan, Volume 12 No.2.
- Coleman, James. (1988). *Social Capital in the Creation of Human Capital*, *American Journal of Sociology*, Vol. 94, 1988.
- Craig, G. dan M. Mayo (ed.), (1995). *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*, London: Zed Books.
- Crowther, David, (2006) special issue of Social Responsibility Journal, Homepage of the Social Responsibility Research Network, De Montfort University, UK (SRRNet)
- Eaton, Joseph W (ed), (1986), *Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional: dari Konsep ke Aplikasi*, diterjemahkan oleh Pandam Guritno dan Aldi Jeni, UI Press, Jakarta.
- Fulmer, Robert M. (1988) *The New Management*, Fourth Edition, Macmillan Publishing Company, USA.
- Goudy, Willis J. & John L. Tail, (1979), *Integrating Research with Local Community Development Programs*, *Journal of the Community Development Society*, Volume 10 No. 2,

- Hamilton, Stephen F (1980), *Elements of a Successful Pilot Project 4-H Community Development in Cortland County*, New York, Journal of The Community Development Society, Volume 11 No. 2, Michigan.
- Hay, Robert and Ed Gray (March 1974) *Social Responsibilities of Business Managers*, Academy of Management Journal.
- Khisna, Anirudh, dan Elizabeth Shrader. (1999). "Social Capital Assessment Tool", Makalah yang dibawakan pada "Conference on Social Capital and Poverty Reduction", The World Bank, Washington, D.C., 22-24 Juni, 1999.
- "Kompas" terbitan 22, 23, 24 Pebruari, dan 15 Maret 2006.
- Kretzmann, J. and McKnight, J. (1993). *Building Communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*, Chicago. IL: ACTA Publishers.
- Lofland, John & Lyn H Lofland (1984), *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observations and Analysis*, Second Edition: Wodsworth Publishing Company, Belmont California.
- Nadj, Shobirin. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Konteks Otonomi Daerah*, makalah, dibawakan dalam *Workshop "Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Publik dalam Perspektif Lokal"*, Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK-LIPI), Jakarta, 20 Agustus 2002.
- SKMBUMN Nomor 236/MBU/Tahun 2003, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- Sorter, Bruce W. & Charles H. Simpkinson (1979), *Coordinated Networks – A Method for Community Development*, Journal of the Community Development Society, Volume 10, No. 2, Michigan.

- Tahajuddin, Ujud, et al, (2005), "*Community Development Industri Petrokimia*", Internal Report, Pranata Pola Cipta, Jakarta
- UN ad hoc Group of experts on Community Development (1963). *Community Development and National Development*. New York, NY: UN.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Van Rees, W. (1991). Neighbourhood, the State and Collective Action, *Community Development Journal*. Vol. 26, No. 2, p. 99-100.
- Widianarko, Budi. (2005). Air: Hak Asasi Versus Komodifikasi. *Renai, Kajian Politik Lokal dan Sosial Humaniora*, Tahun V, No.1.
- Woolcock, Michael, dan Deepa Narayan. (2000). "*Social Capital: Implications for Development Theory, Research and Policy*", *The World Bank Research Observer*, Vol. 15, No. 2, 2000.
- Zulkarnain, Iskandar dkk., (2005) Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI Press, Jakarta.

